BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

LAPORAN KINERJA 2025

LAPORAN KINERJA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN 2025

Tim Penyusun :

Adhe Phoppy Wira Ethika, SP, M.Si

Tania Pra Dhani, STP, MM

Bambang Suryaningrat, SP

Soimah Munawaroh, SPt

BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
JALAN RAGUNAN NO 29 PASAR MINGGU, JAKARTA 12540 POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204 FAKSIMIL (021) 7806044

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAKIN UNIT KERJA LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Unit Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut.

Jakarta, 23 Januari 2026

Koordinator Tim Reviu

Kapoksi PE BRMP Perkebunan

Kapoksi PE BRMP Tanaman Pangan

Kapoksi PPT BRMP Biogen

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah wajib menyusun LAKIN setiap akhir tahun anggaran.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian selama Tahun 2025 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran lingkup BBPPMP serta dukungan pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah, baik institusi Pemerintah, Swasta, Akademisi hingga peran Petani. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Besar harapan kami, Laporan Kinerja BBPPMP Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran kinerja bagi lingkup BBPPMP secara khusus dan mendukung program keberhasilan BRMP secara menyeluruh dan dapat memberikan manfaat serta menjadi umpan balik (*feedback)* bagi proses perencanaan selanjutnya.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja BBPPMP Tahun 2025 ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BBPPMP selanjutnya.

Bogor, Januari 2026

Kepala Balai Besar,

Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP) merupakan salah satu Unit Kerja (UK) yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, BBPPMP memiliki tugas melaksanakan pengembangan, penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi, serta modernisasi pertanian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, BBPPMP diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerjanya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) BBPPMP TA. 2025.

Sesuai dengan Renstra BRMP tahun 2025-2029, tujuan BRMP adalah: 1) Merumuskan dan melaksanakan pendampingan penerapan standar sehingga diterapkan oleh pelaku usaha dan 2) Merakit teknologi digital, *smart farming* dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk dimanfaatkan oleh *stakeholder* untuk meningkatkan produksi.

Dalam rangka mendukung capaian tujuan dan sasaran BRMP maka pada tahun 2025 BBPPMP mengimplementasikan program utama yakni : 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, melalui sasaran meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian; 2) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, melalui sasaran meningkatnya adopsi teknologi modernisasi pertanian yang adaptif; dan Program Dukungan Manajemen, melalui sasaran terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima dan Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntable dan Berkualitas.

Hasil pengukuran capaian kinerja di tahun 2025 menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar **106,13%.** Rata - rata nilai capaian di atas 100 persen sehingga dikategorikan sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kegiatan BBPPMP telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Secara keseluruhan indikator kegiatan dapat mencapai sesuai sasaran yaitu : 1) Indikator presentase pelaku usaha pertanian yang menerapkan standar pertanian dengan capaian 117,63%; 2) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian dengan capaian 100,65% dan 3) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian dengan capaian 100,11%. Namun demikian indikator persentase peningkatan ketersediaan teknologi modernisasi pertanian yang adaptif tidak terlaksana karena tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut untuk Tahun 2025.

Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2025 lingkup BBPPMP sebesar Rp469.023.555.000. Seiring dengan dinamika adanya perubahan kebijakan nasional maka dilakukan penyesuaian anggaran, pagu total anggaran lingkup BBPPMP sampai akhir bulan Desember 2025 menjadi sebesar Rp470.441.862.000 berdasarkan pagu total, sedangkan berdasarkan pagu efektif sebesar Rp454.970.533.000. Realisasi anggaran Lingkup BBPPMP per 31 Desember 2025 berdasarkan data SP2D, adalah sebesar Rp436.793.753.000, atau sebesar 92,85% dari pagu total dan 96% dari pagu efektif.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 antara lain dipacu oleh koordinasi yang baik antara pihak manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, pencapaian indikator kinerja pada tahun 2025 masih dijumpai beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan diperbaiki oleh seluruh jajaran BBPPMP dengan mengoptimalkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi serta sosialisasi peningkatan kapabilitas dan pembinaan program.

Upaya memperbaiki kinerja BBPPMP ke depan adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan *stakeholder* di daerah dalam perencanaan kegiatan terkait lokasi, waktu pelaksanaan, pelaksana kegiatan dan dukungan terhadap program daerah;
2. Setiap kegiatan memerlukan dukungan anggaran dan peralatan yang memadai, sumberdaya manusia yang handal dan ketrampilan yang cukup dalam pendampingan penerapan standar;
3. Adanya jaminan kualitas pada pengadaan benih sumber serta adanya antisipasi awal terhadap kendala pada kegiatan perbenihan;
4. Perlu perencanaan yang matang dalam proses pelaksanaan anggaran dan kegiatan agar efektif, efisien dan berdayaguna;
5. Peranan pimpinan dan koordinasi yang baik antar bagian dalam menyiapkan dokumen-dokumen penilaian ZI sangat diperlukan untuk pelaksanaan Zona Integritas dan mewujudkan WBK dan WBBM.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU iii
KATA PENGANTAR v
IKHTISAR EXSEKUTIF vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Kedudukan Tugas, Fungsi dan Organisasi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian 3
1.3. Tantangan dan Peran Strategis ..... 1**Error! B**
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 1920
2.1. Rencana Strategis Organisasi 20
2.2.1. Visi 20
2.1.2. Misi 21
2.1.3. Tujuan 21
2.1.4. Sasaran 22
2.1.5. Kebijakan 22
2.1.6. Program dan Kegiatan 23
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 25
III. AKUNTABILITAS KINERJA 30
3.1. Capaian Kinerja 30
3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 33
3.1.2. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 69
3.1.3. Perbandingan Kinerja Antar Tahun (2023- 2025) 70
3.1.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Target Renstra RTahun 2025– 2029 73
3.1.5. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi Keberhasilan 75
3.1.6. Capaian Kinerja BBPPMP Lainnya 76
3.1.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya 86
3.2. Akuntabilitas Keuangan 88
3.2.1. Satker BBPPMP 88
3.2.2. Lingkup BBPPMP 9086
3.2.3. Hibah Langsung Luar Negeri 94
3.2.4. Pinjaman Luar Negeri 95
3.2.5. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 99
3.2.6. Penggunaan PNBP lingkup BBPPMP Tahun 2025 103
IV. PENUTUP 105
4.1. Simpulan 105
4.2. Permasalahan dan Tindak Lanjut 105
4.2.1. Permasalahan 105
4.2.2. Tindak Lanjut 106

4.2.3. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja 106
LAMPIRAN..... 107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran pegawai lingkup BBPPMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 7
Tabel 2. Sebaran Sumber Daya Manusia Lingkup BBPPMP Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2025 8
Tabel 3. Keragaan aset UPBS, Laboratorium dan IP2MP lingkup BBPMP 9
Tabel 4. Instalasi Pengujian Dan Penerapan Modernisasi Pertanian lingkup BBPPMP Tahun 2025 12
Tabel 5. Program, Sasaran, Kegiatan dan Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025-2029 sesuai Renstra BRMP Tahun 2025-2029 23
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Awal BBPSIP (Januari s/d Maret) Tahun 2025 25
Tabel 7. Perjanjian Kinerja Revisi I BBPPMP Tahun 2025 27
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Revisi ke II BBPPMP Tahun 2025 27
Tabel 9. Pengukuran Kinerja BBPPMP Tahun 2025 30
Tabel 10. Target Usaha Tani Tahun 2025 - 2029 32
Tabel 11. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian (%) 33
Tabel 12. Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian lingkup BBPPMP Tahun 2025 34
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian 58
Tabel 14. Hasil Penilaian Zona Integritas Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian oleh Tim *Assessor* 58
Tabel 15. Capaian Nilai Zona Integritas Lingkup BBPPMP Tahun 2025 59
Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Tahun 2025 60
Tabel 17. Capaian Nilai IKPA lingkup BBPPMP Tahun 2025 63
Tabel 18. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 - 2025 66
Tabel 19. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 – 2025 67
Tabel 20. Capaian Kinerja BBPPMP Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2025-2029 70
Tabel 21. Data Monitoring Produksi Benih Padi Sertifikasi Lingkup BBPPMP 73
Tabel 22. Data Monitoring Produksi Benih Bawang Putih Sertifikasi Lingkup BBPPMP 76
Tabel 23. Serapan Anggaran BBPPMP berdasarkan data SPM dan SP2D 2025 84
Tabel 24. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 Satker BBPPMP. 85
Tabel 25. Serapan Anggaran lingkup BBPPMP berdasarkan data SPM dan SP2D per Jenis Belanja Tahun 2025. 87
Tabel 26. Realisasi Per Satker 88
Tabel 27. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 90

Tabel 28.Realisasi Pinjaman Luar Negeri Lingkup BBPPMP Tahun 2025 93
Tabel 29.Perencanaan Anggaran Tahunan (*Annual Work Plan-AWP*) Tahun 2025... 94
Tabel 30.Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 95
Tabel 31.Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 2024 96
Tabel 32.Realisasi PNPB Lingkup BBPPMP Tahun 2025 96
Tabel 33.Realisasi Penggunaan PNBP lingkup BBPPMP Tahun 2025..... 98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPMP Tahun 2025 62
Gambar 2. PPID Informatif Terbaik Peringkat ke 5 Kementan 78
Gambar 3. Capaian Perpustakaan Terbaik ke-7 lingkup Kementerian Pertanian..... 79
Gambar 4. Capaian BBPPMP Untuk *Outstanding Country Winners* AFACI 81
Gambar 5. Nilai Efisiensi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 Berdasarkan Standar Biaya Keluaran 83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BBPPMP Berdasarkan Permentan No. 39 Tahun 2025 103
Lampiran 2. Data Aset Laboratorium Lingkup BBPPMP yang sudah terakreditasi 104
Lampiran 4. Data Aset Laboratorium Lingkup BBPPMP yang Belum Operasional dan belum terakreditasi 106
Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal) 107
Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi I) 108
Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi II) 110
Lampiran 8. Rencana Aksi BBPPMP Tahun 2025 112
Lampiran 9. Manual IKU 118
Lampiran 10. SK Tim Pengelola Kinerja Organisasi 128
Lampiran 11. SOP Laporan Kinerja 133
Lampiran 12. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja 136
Lampiran 13. Hasil Uji Benih Padi Satker BRMP NTT oleh Balai Pengujian Padi 141

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Keberadaan sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Produk yang dihasilkan oleh sektor pertanian mencakup pangan segar yang dikonsumsi secara langsung serta bahan baku pangan olahan yang selanjutnya diproses oleh agroindustri. Dengan demikian, sektor pertanian memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor-sektor lain dalam rantai nilai pangan, mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi. Peran strategis tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai fondasi dalam mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional.

Salah satu komoditas strategis dalam sektor pertanian adalah padi, yang berperan sebagai sumber pangan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Keberlanjutan produksi padi menjadi faktor kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan stabilitas sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Januari 2026, produksi beras pada periode Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,71 juta ton, meningkat 4,09 juta ton atau 13,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Capaian produksi beras tersebut sejalan dengan peningkatan produksi padi nasional yang pada periode Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 60,25 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat 7,10 juta ton GKG atau 13,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini ditopang oleh pertumbuhan luas panen yang mencapai dua digit sekitar 12,98 persen serta dukungan kondisi cuaca yang relatif baik di sebagian besar sentra produksi. Luas panen sepanjang Januari hingga Desember 2025 diperkirakan mencapai 11,35 juta hektare, naik sekitar 12,98 persen dibanding tahun 2024.

Capaian ini tidak terlepas dari konsistensi pelaksanaan berbagai program strategis pertanian yang terus diperkuat sepanjang 2025. Program tersebut antara lain perluasan areal tanam dan peningkatan indeks pertanaman, optimalisasi lahan pertanian, serta penguatan sarana dan prasarana produksi seperti penyediaan benih unggul bermutu, pupuk, alsintan, dan dukungan mekanisasi pertanian.

Disamping itu untuk menjamin ketersediaan pangan yang bermutu, aman dikonsumsi, dan berkelanjutan, diperlukan penerapan standar dan instrumen pertanian sebagai acuan dalam seluruh tahapan produksi pangan, mulai dari budidaya hingga penanganan pascapanen. Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, khususnya dalam penyediaan pangan bagi masyarakat, baik dalam bentuk pangan segar maupun sebagai bahan baku bagi industri pengolahan. Namun demikian, penerapan standar instrumen

pertanian di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, tingkat adopsi teknologi oleh pelaku usaha, serta efektivitas pengawasan dan pendampingan.

Komoditas strategis terutama tanaman pangan, dan juga komoditas hortikultura, peternakan dan komoditas lainnya yang menunjang ketersediaan pangan akan terus diupayakan peningkatan produktivitas serta mutu hasil pertaniannya. Untuk mengakselerasi tujuan tersebut selain ditentukan oleh penerapan standar, tentu juga harus ada dukungan modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi, mekanisasi, sistem informasi, serta inovasi budidaya berperan penting dalam meningkatkan efisiensi usaha tani, mengurangi kehilangan hasil, dan memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

BBPPMP berperan strategis dalam mendorong peningkatan pelaku usaha tani penerap standar pertanian yang terintegrasi dengan penerapan modernisasi pertanian. Melalui pengembangan, penerapan, dan diseminasi inovasi pertanian yang terstandar, BBPPMP memastikan bahwa standar pertanian dapat diterapkan secara efektif oleh petani dan pelaku usaha. Peningkatan jumlah pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian yang didukung oleh modernisasi pertanian menjadi salah satu indikator kinerja yang mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada dan hilirisasi pangan. Capaian kinerja tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan produksi dan kualitas pangan nasional, tetapi juga memperkuat daya saing produk pertanian, memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha, serta mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Peningkatan adopsi teknologi modernisasi pertanian yang adaptif merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung transformasi sistem pertanian menuju pertanian yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Teknologi modernisasi pertanian yang adaptif, baik berupa inovasi budidaya, mekanisasi, maupun sistem pendukung pengelolaan usaha tani, menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan sektor pertanian, khususnya keterbatasan sumber daya, perubahan iklim, serta tuntutan peningkatan produksi pangan nasional. Oleh karena itu, mendorong adopsi teknologi oleh pengguna menjadi sasaran strategis yang harus dicapai secara terencana dan terukur.

Peningkatan ketersediaan teknologi menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya peningkatan adopsi, karena teknologi yang tersedia secara memadai dan terstandar akan mempercepat proses penerapan oleh petani, pelaku usaha, dan lembaga terkait. Melalui peningkatan ketersediaan teknologi modernisasi pertanian yang adaptif, BBPPMP memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan dan diterapkan tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga mampu mendorong outcome berupa meningkatnya tingkat adopsi di lapangan. Ketersediaan teknologi terapan yang adaptif menjadi pondasi bagi peningkatan adopsi teknologi modernisasi pertanian secara berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan pertanian nasional.

Pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 oleh BBPPMP harus dilaporkan dalam Laporan Kinerja yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja instansi, baik dari sisi keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi. Penyusunan LAKIN BBPPMP Tahun 2025 mengacu pada Draft Rencana Strategis BBPPMP Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja BBPPMP Tahun 2025.

1.2. Kedudukan Tugas, Fungsi dan Organisasi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Kementerian Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan nasional dalam waktu sesingkat-singkatnya, pemerintah telah melakukan transformasi kelembagaan melalui pembentukan BRMP. Transformasi ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024, yang menandai perubahan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) menjadi BRMP.

Transformasi tersebut merupakan langkah strategis Kementerian Pertanian dalam memperkuat peran kelembagaan yang tidak hanya berfokus pada penyusunan dan penerapan standar, tetapi juga pada akselerasi penerapan teknologi pertanian modern secara masif dan terintegrasi. BRMP diharapkan menjadi garda terdepan dalam mendorong modernisasi pertanian, guna meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, serta daya saing sektor pertanian nasional.

Modernisasi pertanian merupakan kunci utama dalam peningkatan produksi pangan nasional, dimana penerapan teknologi modern mampu meningkatkan produktivitas hingga dua kali lipat serta menekan biaya produksi secara signifikan. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, BRMP mengemban tugas dan fungsi strategis dalam perekayasaan, perakitan, pengujian, penerapan, dan penyebarluasan teknologi pertanian modern, sehingga inovasi yang dihasilkan dapat langsung diadopsi oleh petani dan pelaku usaha tani.

Secara historis, BRMP merupakan kelanjutan dan penguatan peran kelembagaan yang sebelumnya dijalankan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

(Balitbangtan), yang telah menghasilkan berbagai inovasi pertanian diantaranya varietas unggul, teknologi budidaya, serta alat, mesin pertanian dan lainnya. Transformasi menjadi BSIP kemudian memperkuat aspek standarisasi instrumen pertanian. Selanjutnya, melalui pembentukan BRMP, peran tersebut diperluas untuk mengawal hilirisasi inovasi pertanian agar lebih aplikatif, adaptif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan produksi pangan nasional.

Dengan transformasi ini, BRMP diharapkan mampu menjadi motor penggerak modernisasi pertanian, menjembatani hasil inovasi dengan kebutuhan lapangan, serta mempercepat adopsi teknologi di seluruh rantai nilai pertanian. Seluruh kinerja BRMP diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian, khususnya dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Perubahan ini juga didukung oleh kebijakan resmi melalui Permentan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, BRMP terdiri dari Sekretariat Badan dan 4 Pusat Perakitan dan Modernisasi. Organisasi Unit Pelaksana Teknis BRMP diatur dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, yang terdiri dari 7 Balai Besar Perakitan dan Modernisasi, 15 Balai Perakitan dan Pengujian, 33 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian, 1 Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, dan 2 Loka Perakitan dan Pengujian.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025, BBPSIP resmi bertransformasi menjadi BBPPMP. BBPPMP sebagai satuan kerja eselon II di bawah BRMP kini menjalankan tugas untuk melaksanakan pengembangan, penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi, serta modernisasi pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 BBPPMP menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program, anggaran, dan kerja sama di bidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian;
2. Pelaksanaan perekayasaan dan pengembangan paket teknologi spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan koordinasi penerapan hasil perakitan dan modernisasi pertanian;
4. Pelaksanaan penerapan, diseminasi, dan bimbingan teknis modernisasi pertanian;
5. Pelaksanaan pengembangan metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi;
6. Pelaksanaan identifikasi dan penyusunan model pertanian modern;

7. Pelaksanaan penilaian kesesuaian standar nasional indonesia di bidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai besar pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian.

Disamping melaksanakan tugas pokoknya, BBPPMP diberi mandat untuk membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan di BPMP seluruh Indonesia. BPMP memiliki tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
2. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern; Pelaksanaan penerapan, diseminasi, dan bimbingan teknis modernisasi pertanian;
3. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian; Pelaksanaan identifikasi dan penyusunan model pertanian modern;
4. Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
5. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2025 Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) melaksanakan pengukuhan Ketua Substansi dan Ketua Tim Kerja, yang ditetapkan melalui Kepmentan 649 /Kpts/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Jabatan Fungsional Lingkup UPT Kementan.

Berdasarkan surat keputusan tersebut struktur organisasi BBPPMP hanya mempunyai dua pejabat struktural yaitu Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian dan Kepala Bagian Tata Usaha. Pimpinan

tertinggi adalah Kepala BBPPMP, yang dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha membawahi Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga, Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara dan Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi dibantu oleh Ketua Tim Kerja Program, Ketua Tim Kerja Evaluasi, dan Ketua Tim Kerja Teknis Pengembangan dan Modernisasi Pertanian. Ketua Kelompok Kerja Sama dan Diseminasi Pertanian dibantu oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama, Ketua Tim Kerja Diseminasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian, dan Ketua Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian. Struktur Organisasi BBPPMP dapat dilihat pada Lampiran 1.

Pada tanggal 31 Desember 2025, terjadi perubahan transformasi BPMP yang berada di bawah BBPPMP menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP). Hal ini berdasarkan pada Permentan No 39 Tahun 2026 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Peubahan tersebut mengakomodir kenaikan eselonoring dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (IIIa) menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (IIb), sedangkan BBPPMP tidak mengalami perubahan eselonoring maupun Tusi. Berdasarkan Permentan No 39 Tahun 2026, BBPPMP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39B, BBPPMP menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
2. Pelaksanaan koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
3. Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern;
4. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, pengembangan dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
5. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, sertifikasi benih/bibit, dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;

8. Pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya, lingkup BBPPMP didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 2.104 orang hingga 31 Desember 2025, dengan tingkat pendidikan yang beragam mulai dari SD hingga S3. Komposisi SDM didominasi oleh jenjang pendidikan S1, S2, dan SLTA. Berdasarkan tingkat pendidikan sebaran SDM lingkup BBPPMP tertinggi hingga terendah adalah jenjang pendidikan S1: 729 orang; SLTA: 524 orang; S2: 452 orang; D3 145 orang; D4: 121 orang; S3: 87 orang; SD: 25 orang; dan SLTP 21 orang. Secara rinci sebaran pegawai lingkup BBPPMP berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran pegawai lingkup BBPPMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Satker	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	BBPPMP	4	23	30	3	0	4	0	0	8	1	4	77
2	BPMP Aceh	2	16	17	4	0	4	0	0	24	2	2	71
3	BPMP Sumut	4	14	32	2	0	1	0	0	9	0	0	62
4	BPMP Sumbar	2	15	28	3	0	12	0	0	16	0	0	76
5	BPMP Bengkulu	3	17	30	3	0	6	0	0	18	0	0	77
6	BPMP Riau	2	17	19	0	0	0	0	0	18	0	0	56
7	BPMP JAMBI	2	12	25	4	0	5	0	0	18	1	0	67
8	BPMP Sumsel	2	12	26	3	0	2	0	0	5	1	0	51
9	BPMP Lampung	1	12	24	4	0	7	0	0	24	4	0	76
10	BPMP Jabar	3	17	20	2	0	5	0	0	23	0	2	72
11	BPMP Jakarta	1	14	11	0	0	3	0	0	6	0	1	36
12	BPMP Jateng	3	17	43	4	0	10	0	0	29	0	0	106
13	BPMP Yogya	6	21	30	5	0	11	0	0	13	0	1	87
14	BPMP Jatim	3	15	29	3	0	4	0	0	34	2	0	90
15	BPMP Bali	3	18	26	3	0	2	0	0	19	0	0	71
16	BPMP NTT	5	23	28	2	0	4	0	0	19	2	0	83
17	BPMP NTB	4	6	20	10	0	5	0	0	30	2	4	81
18	BPMP Sulut	2	13	12	4	0	0	0	0	9	1	0	41
19	BPMP Sulteng	2	10	17	3	0	0	0	0	19	0	0	51
20	BPMP Sulsel	3	23	37	4	0	1	0	0	30	2	5	105
21	BPMP Sultra	2	14	23	4	0	1	0	0	15	1	1	61
22	BPMP Kalteng	4	3	12	6	0	6	0	0	6	0	0	37
23	BPMP Kalbar	0	12	14	7	0	2	0	0	14	0	1	50
24	BPMP Kaltim	3	23	18	5	0	11	0	0	16	0	1	77
25	BPMP Kalsel	1	12	17	6	0	4	0	0	13	0	2	55
26	BPMP Maluku	1	6	14	6	0	5	0	0	12	1	0	45
27	BPMP Papua	4	12	16	2	0	6	0	0	7	0	0	47

No	Satker	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
28	BPMP Banten	2	16	15	1	0	3	0	0	21	1	0	59
29	BPMP Babel	4	5	19	5	0	1	0	0	4	0	0	38
30	BPMP Gorontalo	4	8	12	1	0	3	0	0	13	0	1	50
31	BPMP Malut	4	9	4	5	0	4	0	0	8	0	0	40
32	BPMP Papua Barat	1	6	11	1	0	2	0	0	6	0	0	34
33	BPMP Sulbar	0	9	8	2	0	4	0	0	4	0	0	35
34	BPMP Kep. Riau	0	3	8	1	0	7	0	0	14	0	0	40
	Jumlah	**87**	**452**	**729**	**121**	**0**	**145**	**0**	**0**	**524**	**21**	**25**	**2104**

Sementara itu jumlah pegawai lingkup BBPPMP tertinggi berada di BPMP Jawa Tengah sebanyak 108 orang dan BPMP Sulawesi Selatan sebanyak 105 orang sedangkan terendah berada di BPMP Maluku 30 orang. Secara umum sebaran jumlah SDM lingkup BBPPMP sangat bervariatif hal ini disebabkan karena adanya perpindahan pegawai lingkup BBPPMP khususnya peneliti yang pindah ke BRIN, selain itu juga umumnya dipengaruhi oleh masa periode lama berdirinya BPMP.

Sedangkan Komposisi SDM berdasarkan kelompok jabatan fungsional, maka SDM yang duduk pada jabatan fungsional lingkup BBPPMP adalah sebanyak 1.050 orang yang tersebar di 20 jabatan fungsional. Jabatan fungsional dengan urutan tiga tertinggi dan tiga terendah sebagai berikut: Penyuluh: 401 orang; Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP): 131 orang; Pengawas Benih Tanaman (PBT): 113 orang; Arsiparis: 88 orang; Analisis Standar: 43 orang; Analisis SDM Aparatur 31 orang; dan Pranata SDMA: 24 orang. Secara rinci sebaran pegawai lingkup BBPPMP berdasarkan jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran Sumber Daya Manusia Lingkup BBPPMP Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2025.

No	Fungsional	Jumlah
1	Pustakawan	26
2	Pranata komputer	26
3	Teknisi Litkayasa	36
4	Arsiparis	88
5	Penyuluh Pertanian	401
6	Pengendali OPT	19
7	Pengawas Bibit Ternak	6
8	Perencana	17
9	Pengawas Benih Tanaman	113
10	Pranata Humas	18
11	Pengawas Mutu Pakan	5
12	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	131
13	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1
14	Analis Kebijakan	1
15	Analis Pengelola Keuangan (APK) APBN	24

No	Fungsional	Jumlah
16	Pranata Keuangan APBN	30
17	Analis Sarana Prasarana (Sapras)	10
18	ASTA	43
19	Analis SDM Aparatur	31
20	Pranata SDMA	24
	Jumlah	1050

Selain dukungan SDM, kepemilikan dan pengelolaan aset menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBPPMP serta BRMP lingkup di provinsi. Aset yang dikelola mencakup aset laboratorium sebanyak 30 unit, Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) sebanyak 91 unit, dan Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP) sebanyak 61 unit. Sarana dan prasana berperan sebagai sarana utama dalam pengembangan, pengujian, penerapan, dan diseminasi teknologi pertanian modern. Keragaan aset UPBS, Laboratorium dan IP2MP lingkup BBPMP dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Keragaan aset UPBS, Laboratorium dan IP2MP lingkup BBPMP

No.	**Satker**	**UPBS Perbenihan**		**UPBS Perbibitan Ternak**	**Laboratorium**		**IP2MP**
		Padi	**Jagung**		**Akreditasi**	**Belum Akreditasi**	
	Jumlah	**21**	**54**	**16**	**10**	**20**	**61**
1	BB Penerapan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Aceh	Tidak ada	1	Tidak ada	Tidak ada	1	2
3	Sumatera Utara	Tidak ada	1	1	1	Tidak ada	2
4	Sumatera Barat	Tidak ada	1	1	1	Tidak ada	5
5	Riau	1	2	Tidak ada	Tidak ada	1	2
6	Jambi	1	2	1	Tidak ada	1	1
7	Bangka Belitung	1	2	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	4
8	Sumatera Selatan	1	2	1		1	2
9	Lampung	Tidak ada	1	1	1	Tidak ada	2
10	Bengkulu	1	2	1	1	Tidak ada	0
11	Banten	Tidak ada	1	1	Tidak ada	1	1
12	DKI Jakarta	Tidak ada	1	Tidak ada	Tidak ada	1	0
13	Jawa Barat	Tidak ada	1	Tidak ada	1	Tidak ada	1
14	Jawa Tengah	Tidak ada	1	1	1	Tidak ada	3
15	DI Yogyakarta	1	2	1	1	Tidak ada	1
16	Jawa Timur	Tidak ada	1	1	Tidak ada	1	2
17	Bali	1	2	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0
18	NTB	1	2	1	1	Tidak ada	2
19	NTT	1	2	Tidak ada	Tidak ada	1	4
20	Kalimantan Barat	1	2	Tidak ada	Tidak ada	1	3
21	Kalimantan Tengah	Tidak ada	1	Tidak ada	Tidak ada	1	1
22	Kalimantan Selata	Tidak ada	1	Tidak ada	Tidak ada	1	4
23	Kalimantan Timur	1	2	Tidak ada	1	Tidak ada	3
24	Sulawesi Utara	1	2	Tidak ada	Tidak ada	1	1

No.	Satker	UPBS Perbenihan		UPBS Perbibitan Ternak	Laboratorium		IP2MP
		Padi	Jagung		Akreditasi	Belum Akreditasi	
25	Gorontalo	1	2	1	Tidak ada	1	1
26	Sulawesi Tengah	1	2	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	1
27	Sulawesi Selatan	1	2	1	Tidak ada	Tidak ada	4
28	Sulawesi Tenggara	1	2	1	Tidak ada	1	2
29	Maluku	1	2	1	Tidak ada	Tidak ada	1
30	Papua	1	2	1	Tidak ada	Tidak ada	2
31	Maluku Utara	1	2	Tidak ada	Tidak ada	1	1
32	Papua Barat	Tidak ada	1	Tidak ada	1	Tidak ada	3
33	Sulawesi Barat	1	2	Tidak ada	Tidak ada	1	0
34	Kepulauan Riau	1	2	Tidak ada	Tidak ada	1	0

a. Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS)

UPBS punya peran strategis sebagai pendukung aset modernisasi pertanian, terutama karena benih adalah aset biologis paling dasar dalam sistem pertanian modern. UPBS yang dimiliki oleh satker lingkup BBPPMP seluruhnya berjumlah 91 UPBS dengan rincian UPBS padi sebanyak 21, UPBS jagung sebanyak 54 dan UPBS perbibitan ternak sebanyak 16. Apabila dilihat dari kepemilikan aset tersebut, seluruh BRMP propinsi memiliki UPBS Jagung, BRMP yang memiliki UPBS padi sebanyak 21 UPBS, sedangkan satker yang memiliki UPBS perbibitan ternak sebanyak 16 UPBS. UPBS merupakan pondasi teknologi pertanian itu tersedia, bermutu, dan berkelanjutan. UPBS memproduksi dan mengelola benih sumber (BS, BD, BP) dari varietas unggul terbaru. Ini menjadi aset kunci modernisasi karena mempunyai nilai tambah yaitu; 1) Produktivitas lebih tinggi, 2) Tahan cekaman (hama, penyakit, iklim ekstrem) dan 3) Sesuai dengan sistem budidaya modern (mekanisasi, presisi).

Tanpa benih unggul yang stabil, alat dan teknologi modern tidak akan optimal. UPBS merupakan penghubung antara inovasi riset dan penangkar/petani serta penyedia bahan awal untuk perbanyakan benih skala luas. UPBS dapat mendukung pertanian melalui; sistem produksi benih sesuai standar sertifikasi, pengendalian mutu genetik, fisiologis, dan fisik benih dan penerapan manajemen produksi berbasis data. UPBS memperkuat ekosistem agribisnis dengan menjamin ketersediaan benih sumber bagi penangkar, mengurangi ketergantungan impor varietas dan menjadi aset negara dalam ketahanan pangan.

Dalam pelaksanaannya, modernisasi pertanian yang dikembangkan dan diterapkan tidak terlepas dari prinsip-prinsip standardisasi dan penjaminan mutu, sehingga proses produksi pertanian dapat berlangsung secara konsisten dan memenuhi persyaratan kualitas. Standardisasi dan penilaian kesesuaian terhadap teknologi, sistem, dan proses pertanian menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian mutu, melindungi pengguna dan konsumen, serta meningkatkan kepercayaan terhadap produk pertanian nasional. Dengan demikian, integrasi antara penerapan standar dan modernisasi pertanian

diharapkan mampu mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk pertanian Indonesia.

b. Aset Laboratorium

Aset laboratorium merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam penguasaan dan pemanfaatan unit kerja BRMP di provinsi dengan pembinaan teknis oleh BBPPMP. Berdasarkan hasil inventarisasi aset, sebanyak 27 BRMP lingkup BBPPMP di provinsi tercatat memiliki aset laboratorium dengan tingkat kesiapan yang bervariasi. Dari jumlah tersebut, 10 BRMP telah memiliki laboratorium terakreditasi, sehingga mampu melaksanakan fungsi pengujian dan penjaminan mutu sesuai standar yang berlaku. Laboratorium terakreditasi tersebut mendukung berbagai ruang lingkup pengujian, antara lain pengujian kimia, tanah, pupuk, benih, tanaman, air, dan pascapanen, meskipun sebagian masih memerlukan penguatan lanjutan berupa peningkatan sarana prasarana, penambahan dan peningkatan kompetensi SDM analis, perluasan ruang lingkup pengujian, serta pelaksanaan reakreditasi secara berkala.

Selanjutnya, sebanyak 10 BRMP memiliki laboratorium yang telah operasional namun belum terakreditasi. Laboratorium pada kategori ini telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan teknis perekayasaan, perakitan, dan penerapan teknologi pertanian, namun masih memerlukan pemenuhan persyaratan akreditasi, antara lain peningkatan sarana dan prasarana laboratorium, pemenuhan kompetensi SDM analis sesuai metode standar (SNI), serta penyempurnaan sistem manajemen mutu. Sebagian laboratorium pada kategori ini telah memiliki rencana akreditasi dalam jangka waktu tertentu.

Adapun sebanyak 7 BRMP lainnya memiliki laboratorium yang belum operasional dan belum terakreditasi. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan peralatan, kebutuhan renovasi atau perbaikan sarana prasarana, belum tersedianya SDM yang kompeten, serta kondisi SDM yang sedang menjalani tugas belajar. Laboratorium pada kategori ini memerlukan upaya reaktivasi dan penguatan secara menyeluruh agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Secara rinci aset laboratorium terkait status operasional dan akreditasi dapat dilihat pada Lampiran 2,3, dan 4.

Secara keseluruhan, variasi tingkat kesiapan aset laboratorium tersebut menunjukkan bahwa penguatan sarana dan prasarana laboratorium masih menjadi agenda strategis BBPPMP dan BRMP ke depan, baik melalui peningkatan jumlah laboratorium terakreditasi, optimalisasi laboratorium yang telah operasional, maupun reaktivasi laboratorium yang belum beroperasi. Upaya ini sejalan dengan prinsip standardisasi dan penjaminan mutu dalam modernisasi pertanian, serta mendukung pelaksanaan tugas BRMP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025.

c. Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP)

Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP) merupakan lahan milik BRMP Propinsi yang digunakan untuk pengujian dan penerapan modernisasi pertanian. Pemanfaatan IP2MP merujuk pada PMK No 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara dan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian No 1255/Kpts/PL.020/H/10/2025 tentang Penerapan Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian dan Laboratorium Pada Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Pemanfaatan IP2MP sebagai pengembangan teknologi pertanian modern, pelaksanaan konservasi plasma nuftah dan produksi benih sumber. Pemanfaatan lahan kebun sebagai fasilitas utama untuk penyelenggaraan perakitan, pengujian dan penerapan, demonstrasi, pengembangan skala lapang serta diseminasi inovasi pertanian spesifik lokasi. IP2MP lingkup BBPPMP sebanyak 61 unit, yang berada pada 28 BRMP Propinsi dengan luas areal 2.243,10 ha yang tersebar pada beberapa agroekosistem. Secara rinci keragaan IP2MP lingkup BBPMP Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Instalasi Pengujian Dan Penerapan Modernisasi Pertanian lingkup BBPPMP Tahun 2025

No.	Satker	Nama KP (Menurut Kepmentan No. 93/2019)	Luas Lahan KP (ha)	Agroekosistem KP
	BBPPMP	**61**	**2.243,10**	
1	Aceh	Paya Gajah	142,00	Lahan kering
2	Aceh	Gayo	19,50	Lahan Kering
3	Sumatera Utara	Gurgur	36,94	Dataran tinggi lahan kering
4	Sumatera Utara	Pasar Miring	20,00	Padi Sawah
5	Sumatera Barat	Sitiung	95,75	Lahan Kering
6	Sumatera Barat	Sukarami	152,67	Dataran tinggi
7	Sumatera Barat	Bandarbuat	1,17	Dataran Rendah, lahan sawah, lahan kering
8	Sumatera Barat	Rambatan	6,95	Lahan Kering
9	Sumatera Barat	Guguak	0,95	Lahan Kering
10	Riau	Siak Hulu	3,10	Lahan Kering
11	Riau	Sei Mandau	8,86	Lahan Rawa
12	Jambi	Sungai Tiga	3,43	Lahan Kering
13	Kepulauan Bangka Belitung	Petaling	28,33	Lahan Kering
14	Kepulauan Bangka Belitung	Koba	10,00	Lahan rawa lebak dangkal, Tengahan dan Dalam
15	Kepulauan Bangka Belitung	Batu Betumpang	40,00	Lahan Rawa

No.	Satker	Nama KP (Menurut Kepmentan No. 93/2019)	Luas Lahan KP (ha)	Agroekosistem KP
16	Kepulauan Bangka Belitung	Gantung	15,00	Lahan tadah hujan (eks tambang)
17	Sumatera Selatan	Kayu Agung	20,00	Lahan rawa lebak dangkal, Tengahan dan Dalam
18	Sumatera Selatan	Karang Agung	20,00	Lahan rawa pasang surut
19	Lampung	NATAR	60,00	Lahan kering masam
20	Lampung	TEGINENENG	10,00	Lahan kering masam
21	Banten	Singamerta	6,98	Lahan sawah dan lahan kering
22	Jawa Barat	Cipaku	3,50	Lahan kering
23	Jawa Barat	Pusakanagara	40,68	Lahan kering Sistim Irigasi Pompanisasi
24	Jawa Tengah	Magelang	2,08	Lahan sawah dan kering
25	Jawa Tengah	Ungaran	8,00	Lahan kering
26	Jawa Tengah	Batang	5,00	Lahan sawah
27	DI Yogyakarta	Banyakan	4,13	Lahan terdiri dari : Lahan sawah, Lahan kering dan perbukitan
28	Jawa Timur	Mojosari	22,00	Lahan sawah dan kering
29	Jawa Timur	Karangploso	5,50	lahan sawah dan kering
30	Nusa Tenggara Barat	Sandubaya	7,10	Lahan kering iklim kering
31	Nusa Tenggara Barat	Pototano	10,80	Lahan kering iklim kering
32	Nusa Tenggara Timur	Naibonat	35,00	Lahan kering iklim kering
33	Nusa Tenggara Timur	Maumere	6,00	lahan kering iklim kering
34	Nusa Tenggara Timur	Waingapu	100,13	lahan kering iklim kering
35	Nusa Tenggara Timur	Lili	35,00	Lahan kering iklim kering
36	Kalimantan Barat	Simpang Monterado	164,32	Lahan kering
37	Kalimantan Barat	Selakau	49,30	lahan pasang surut
38	Kalimantan Barat	Sungai Kakap	12,00	lahan pasang surut
39	Kalimantan Tengah	Unit Tatas	25,00	lahan pasang surut
40	Kalimantan Selatan	Banjarbaru	4,25	lahan kering
41	Kalimantan Selatan	Barabai	9,80	lahan kering tadah hujan
42	Kalimantan Selatan	Pleihari	12,00	lahan kering dan sawah tadah hujan
43	Kalimantan Selatan	Alabio	5,00	Rawa Lebak
44	Kalimantan Timur	Lempake	10,00	Lahan rawa

No.	Satker	Nama KP (Menurut Kepmentan No. 93/2019)	Luas Lahan KP (ha)	Agroekosistem KP
45	Kalimantan Timur	Samboja	10,00	Lahan rawa
46	Sulawesi Utara	Pandu	92,50	Lahan kering
47	Gorontalo	Tilong Kabila	3,50	Lahan sawah dan lahan kering
48	Sulawesi Tengah	Sidondo	30,00	Lahan kering dataran rendah
49	Sulawesi Selatan	Luwu	31,00	Sawah dan kebun
50	Sulawesi Selatan	Bone-Bone	36,00	kebun
51	Sulawesi Selatan	Jeneponto	27,60	Lahan kering dataran rendah
52	Sulawesi Selatan	Gowa	96,00	
53	Sulawesi Tenggara	Wawatobi	15,30	lahan sawah irigasi
54	Sulawesi Tenggara	Onembute	20,50	Lahan kering dataran rendah
55	Maluku	Makariki	300,00	lahan kering, dataran rendah iklim basah
56	Papua	Jayawijaya	0,12	Lahan kering
57	Papua	Merauke	0,98	Lahan kering
58	Maluku Utara	Bacan	279,00	Lahan kering dataran rendah iklim basah
59	Papua Barat	Andai	20,00	Lahan kering dataran rendah (bekas rawa)
60	Papua Barat	Amban	1,30	Lahan Kering
61	Papua Barat	Sorong	1,20	Lahan Kering dan Sawah

1.3. Tantangan dan Peran Strategis

Transformasi sistem pertanian nasional menuju pertanian yang produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan menghadirkan berbagai tantangan strategis. Tantangan tersebut antara lain meningkatnya tuntutan terhadap mutu dan keamanan pangan, keterbatasan sumber daya lahan dan tenaga kerja, dampak perubahan iklim yang semakin nyata terhadap stabilitas produksi, serta masih belum optimalnya tingkat adopsi teknologi dan penerapan standar instrumen pertanian oleh petani dan pelaku usaha tani. Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan peran kelembagaan yang mampu menjembatani kebijakan, inovasi teknologi, dan kebutuhan nyata di lapangan.

Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 menetapkan sasaran strategis "Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian" sebagai bagian dari upaya percepatan pencapaian swasembada pangan dan penguatan ketahanan pangan nasional. Sasaran ini menekankan pentingnya memastikan bahwa teknologi dan inovasi pertanian tidak hanya dihasilkan, tetapi juga dapat diakses, dipahami, dan diterapkan secara luas oleh petani dan pelaku usaha tani. Keberhasilan sasaran tersebut ditandai dengan terjadinya perubahan

pengetahuan, sikap, dan keterampilan pengguna, serta meningkatnya tingkat adopsi teknologi yang berdampak langsung pada peningkatan kapasitas usaha tani, efisiensi produksi, dan kesejahteraan petani.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Renstra Badan BRMP Tahun 2025–2029 menegaskan peran BRMP sebagai penggerak utama dalam perakitan, penerapan, dan modernisasi pertanian melalui pengembangan paket teknologi yang adaptif, terstandar, dan siap diterapkan di lapangan. Fokus BRMP diarahkan pada penguatan hilirisasi inovasi pertanian agar lebih aplikatif, spesifik lokasi, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian. Dalam konteks ini, tantangan utama BRMP adalah memastikan ketersediaan teknologi modernisasi pertanian yang relevan dengan kebutuhan pengguna sekaligus mendorong peningkatan tingkat adopsi secara berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, BBPPMP memegang peran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat yang berada di bawah BRMP. BBPPMP berfungsi sebagai penghubung antara inovasi dan teknologi hasil perakitan dengan implementasi di lapangan melalui kegiatan pengembangan, perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, penyusunan model, penerapan, diseminasi, dan bimbingan teknis modernisasi pertanian. Melalui pendekatan yang terintegrasi, BBPPMP berperan dalam peningkatan kualitas dan daya saing produk pertanian melalui pengembangan dan penerapan teknologi modernisasi pertanian yang adaptif dan siap diterapkan di lapangan, sekaligus mendorong peningkatan adopsi oleh petani, pelaku usaha tani, dan kelembagaannya.

Melalui kegiatan pengembangan, perekayasaan, pengujian, dan penerapan teknologi, BBPPMP memastikan bahwa teknologi yang tersedia dapat menjawab kebutuhan pengguna, sesuai dengan kondisi agroekosistem, serta mendukung efisiensi dan produktivitas usaha tani. Penyediaan teknologi yang relevan dan teruji menjadi fondasi penting dalam mendorong pemanfaatan teknologi secara lebih luas oleh petani, pelaku usaha, dan lembaga terkait.

Peran strategis BBPPMP juga mencakup penguatan integrasi antara penerapan standar instrumen pertanian dan modernisasi pertanian, sehingga proses produksi pertanian dapat berlangsung secara konsisten, efisien, aman, dan berkelanjutan. Integrasi tersebut menjadi penting untuk menjamin mutu hasil pertanian, meningkatkan daya saing produk, serta memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, struktur organisasi yang adaptif, serta sinergi dan pembinaan terhadap Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) di seluruh provinsi, BBPPMP diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BRMP dan Kementerian Pertanian, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan, hilirisasi, dan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi BBPPMP dijabarkan sebagai berikut :

A. Arah Kebijakan

1. Pelaksanaan perekayasaan dan pengembangan paket teknologi modern melalui perluasan kolaborasi dengan berbagai mitra;
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengembangan metode dan pengelolaan produksi benih sumber mendukung swasembada pangan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan di bidang perencanaan, penerapan dan ketatausahaan;
4. Peningkatan penyusunan dan pengelolaan kerja sama di bidang pengembangan, perekayasaan dan penerapan hasil perakitan dan modernisasi pertanian yang saling menguntungkan;
5. Perbaikan pengelolaan aset-aset terkait dengan Kebun Percobaan, laboratorium dan sarana pendukung lainnya;
6. Mendorong peningkatan peran BBPPMP dalam penerapan dan diseminasi pertanian modern;
7. Peningkatan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas BBPPMP.

B. Strategi BBPPMP

Bertolak dari arah kebijakan tersebut BBPPMP menjabarkan strategi pencapaian dan langkah-langkah operasional sebagai berikut :

1. Perekayasaan dan Pengembangan Berkolaborasi

Kolaborasi dilakukan dengan UK/UPT lingkup BRMP, lembaga penelitian lain, universitas dan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga lain dalam rangka meningkatkan kuantitas paket teknologi, kualitas hasil dan kebermanfaatan hasil perekayasaan paket teknologi pertanian modern yang adaptif.

2. Pengembangan Metode dan Pengelolaan produksi benih sumber

Pengembangan metode dalam produksi benih sumber bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan ketersediaan benih sumber yang unggul, bermutu, dan berdaya hasil tinggi. Beberapa aspek utama dari pengembangan metode meliputi: a) Optimalisasi proses produksi benih; b) Optimalisasi proses pengolahan benih (meningkatkan teknologi pengeringan, pemilahan, dan penyimpanan benih agar tetap memiliki viabilitas tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama); c) Peningkatan sistem manajemen produksi.

Pengelolaan produksi benih sumber mencakup serangkaian aktivitas mulai dari perencanaan produksi, pelaksanaan produksi benih sumber, dan pengelolaan produksi benih sumber.

a. Perencanaan produksi

Perencanaan produksi mempertimbangkan dengan cermat dan teliti target produksi, ketersediaan sumber daya, alokasi waktu serta ketersediaan lahan usahatani.

b. Pelaksanaan produksi benih sumber

Produksi benih sumber dilaksanakan sesuai dengan panduan produksi benih yang dipersyaratkan untuk memperoleh benih yang lolos sertifikasi.

c. Pengelolaan produksi benih sumber

Pengelolaan produksi benih sumber difokuskan pada proses sertifikasi benih, distribusi dan penyimpanan benih yang layak untuk menjaga kualitas benih.

3. Peningkatan kualitas layanan di bidang perencanaan, penerapan dan ketatausahaan melalui sosialisasi internal, media sosial dan publikasi terkait.

4. Penyusunan dan Pengelolaan Kerjasama

a. Kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan, perekayasaan dan penerapan paket teknologi;

b. Membuka jejaring komunikasi dan kerjasama dengan lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi, sekolah atau pesantren), organisasi kemasyarakatan, Pemerintah daerah dan Kementerian lain dengan prinsip saling menguntungkan.

5. Pengelolaan aset laboratorium dan Kebun Percobaan

a. Mendorong akreditasi laboratorium bagi yang belum terakreditasi;

b. Meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan laboratorium untuk mendukung peningkatan kualitas perekayasaan dan pemanfaatan dari pihak luar dengan mekanisme PNBP;

c. Pendayagunaan kebun percobaan melalui berbagai aktivitas yang mendukung peningkatan efektifitas pengelolaan KP;

d. Peningkatan sarana dan prasana mencakup modernisasi fasilitas laboratorium, KP, dan infrastruktur pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam proses perekayasaan dan perakitan.

6. Peningkatan peran BBPPMP dalam penerapan dan diseminasi pertanian modern

a. Kegiatan penerapan dan diseminasi teknologi terhadap pelaku direncanakan dengan baik dan terukur;

b. Melibatkan lembaga penerap dan stakeholder lainnya yang terkait dalam perencanaan pendampingan agar dapat terdokumentasikan dengan baik setiap aktivitas pendampingan yang dilakukan;

c. Proses diseminasi perlu dilakukan secara terstruktur melalui berbagai pendekatan, seperti demonstrasi lapangan, pelatihan, pendampingan teknis, dan pengemasan dalam bentuk paket teknologi yang siap pakai;

d. Peningkatan kapasitas penyuluh lapangan sebagai agen transformasi;

e. Penyusunan kurikulum pelatihan berbasis teknologi pertanian modern dan dan program diseminasi digital untuk memperluas jangkauan diseminasi;

f. Melakukan evaluasi penerapan dan diseminasi agar memperoleh umpan balik dan penerapan standar pertanian dilakukan berkelanjutan.

7. Peningkatan kompetensi SDM

SDM dengan kompetensi yang baik mendukung tercapainya penyelenggaraan manajemen yang transparan dan akuntabel

a. Kompetensi SDM pengelola keuangan melalui berbagai pelatihan berkaitan dengan pengelolaan keuangan

b. Kompetensi SDM pengelola barang dan jasa

c. Kompetensi SDM pengelola kepegawaian

d. Kompetensi SDM pengelola kehumasan

e. Kompetensi SDM Fungsional teknis lainnya

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP) secara hirarkis merupakan satuan kerja di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Dalam kerangka *hierarchical strategic plan*, visi dan misi yang disusun oleh BBPPMP mengacu dan selaras dengan visi dan misi pembangunan pertanian nasional serta visi dan misi BRMP. Penyelarasan tersebut dimaksudkan untuk membangun kesamaan persepsi dan arah kebijakan mengenai masa depan pembangunan pertanian dan perdesaan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi BBPPMP dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian tujuan strategis BRMP dan Kementerian Pertanian.

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis dan tantangan pembangunan pertanian ke depan, visi dan misi BBPPMP dirumuskan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, dan modernisasi pertanian yang adaptif dan berkelanjutan. Visi dan misi tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu akselerator pembangunan pertanian dan perdesaan melalui pengembangan dan penerapan teknologi, inovasi, serta pendekatan modern yang relevan dengan kebutuhan pengguna dan kondisi agroekosistem.

Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap unit kerja di lingkungan BBPPMP dituntut untuk memiliki standar kinerja yang mengacu pada standar mutu pelayanan kepada masyarakat, serta menunjukkan konsistensi dan komitmen terhadap mutu manajemen sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis BRMP Tahun 2025–2029. Proses penyusunan Rencana Strategis Revisi BBPPMP 2025–2029 dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur dengan melibatkan unsur manajemen dan pejabat fungsional BBPPMP, guna memastikan bahwa perencanaan yang disusun bersifat partisipatif, terukur, dan implementatif. Renstra tersebut menjabarkan misi, tujuan, indikator kinerja, sasaran, serta arah kebijakan dan strategi BBPPMP sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian nasional.

2.1. Rencana Strategis Organisasi

2.1.1. Visi

Visi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP) mengacu kepada visi Badan Perakitan Modernisasi Pertanian dan visi Kementerian Pertanian, maka visi BBPPMP kedepan, yaitu "*Menjadi Lembaga Unggulan dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertanian Terapan Modern yang Inovatif untuk Mendukung Pertanian Maju Berkelanjutan".*

2.1.2. Misi

Misi BBPPMP selaras dengan misi BRMP, mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Melaksanakan perekayasaan dan pengembangan paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
2. Melaksanakan penerapan, diseminasi dan peningkatan kapasitas penerap standar di bidang modernisasi pertanian;
3. Mengembangkan metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi
4. Mengembangkan model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani;
5. Melaksanakan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian

2.1.3. Tujuan

1. Terlaksananya perekayasaan dan pengembangan paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional dengan indikator tujuan: paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional ;
2. Terlaksanya penerapan, diseminasi dan peningkatan kapasitas penerap standar di bidang modernisasi pertanian dengan indikator tujuan: (1) lembaga penerap standar yang didampingi, (2) petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming dan modern ;
3. Terlaksananya metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi dengan indikator tujuan: (1) benih/bibit sumber spesifik lokasi
4. Terbentuknya model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani dengan indikator tujuan: model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani ;
5. Terlaksananya penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian dengan indikator tujuan: penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian

2.1.4. Sasaran

Adapun Sasaran Kegiatan BBPPMP adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian dengan indikator kinerja utama: Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian;
2. Meningkatnya Adopsi Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif dengan indikator kinerja utama: Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif;
3. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator kinerja utama: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
4. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator kinerja utama: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

Sasaran, indikator kinerja dan target capaian untuk Tahun 2025– 2029 sesuai Renstra BBPPMP Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 5.

2.1.5. Kebijakan

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, BBPPMP menetapkan kebijakan antara lain:

1. Penguatan penerapan standar instrumen pertanian melalui fasilitasi, pendampingan, dan penilaian kesesuaian;
2. Percepatan pengembangan dan penerapan teknologi modernisasi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim dan spesifik lokasi;
3. Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas;
4. Penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan hasil.

2.1.6. Program dan Kegiatan

Dalam mendukung kebijakan tersebut, BBPPMP melaksanakan beberapa program strategis, yaitu:

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, melalui kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, untuk meningkatkan persentase pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian;
2. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, melalui kegiatan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, untuk meningkatkan ketersediaan dan adopsi teknologi modernisasi pertanian yang adaptif;
3. Program Dukungan Manajemen, melalui kegiatan dukungan manajemen dan fasilitasi standardisasi instrumen pertanian, guna mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berkualitas.

Pada tahun 2025, BBPPMP menetapkan target persentase pelaku usaha pertanian yang menerapkan standar pertanian lebih tinggi dibandingkan target BRMP, didukung oleh alokasi kegiatan ICARE yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan capaian output. Sementara itu, untuk indikator adopsi teknologi modernisasi pertanian yang adaptif, tahun 2025 menjadi tahap awal pelaksanaan kegiatan sehingga capaian adopsi memerlukan waktu melalui tahapan proses implementasi dan pendampingan. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, BBPPMP diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam mendukung swasembada pangan nasional, meningkatkan daya saing pertanian, serta mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan. Kontribusi BBPPMP sangat dituntut dalam mengambil peran ikut mendukung program di bidang pertanian dengan mengalokasikan anggaran di tahun 2025 dalam mendukung program-program di bidang pertanian tahun 2025 seperti termuat dalam Tabel 5.

Tabel 5. Program, Sasaran, Kegiatan dan Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025-2029 sesuai Renstra BRMP Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri						-		
Kegiatan : Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian								
	Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian	Persentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian	Persentase	4,67	15,89	15,89	31,78	31,78
Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas						-		
Kegiatan : Perakitan dan Modernisasi Pertanian								
	Meningkatnya Adopsi Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	Persentase	-	20	20	20	20
Program Dukungan Manajemen								
Kegiatan : Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian								
	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Nilai	85,53	86,09	86,20	86,25	86,30
	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)	Nilai	90,15	91,5	92,0	92,5	93,0

Target BBPPMP pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 untuk indikator Persentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian dengan nilai yang lebih tinggi yaitu 14,29 % sedangkan target BBPPMP yang terdapat pada Renstra BRMP memiliki target 4,67%, karena BBPPMP mendapat alokasi kegiatan ICARE dan kegiatan program strategis lainnya yang memiliki potensi besar yang bisa memfasilitasi pencapaian output terhadap peningkatan jumlah pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian.

Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya Adopsi Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif dengan indikator Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif tahun 2025 ini belum memiliki target, hal ini disebabkan kegiatan BRMP yang berbasis modernisasi pertanian yang adaptif yang baru dimulai tahun ini, dimana proses adopsi terdiri dari beberapa tahapan sehingga untuk mencapai tingkat adopsi maka masih membutuhkan waktu.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK diharapkan terwujud adanya komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perencanaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan *stakeholder* (*bottom up*) diselaraskan dan mengakomodasi program yang bersifat *top down* sehingga kebijakan perencanaan anggaran ditetapkan sesuai rencana kinerja yang disepakati melalui PK sebagai tolok ukur keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja BBPPMP. Kinerja BBPPMP dihitung berdasarkan PK Kepala BBPPMP sebagai Kepala Unit Kerja. PK tersebut telah mengakomodasi PK seluruh satker lingkup BBPPMP. PK yang digunakan menjadi acuan penyusunan LAKIN Tahun 2025 merupakan PK terakhir yang ditetapkan pada bulan Desember 2025.

PK Awal Tahun 2025 awal ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2024, masih bernaung dengan label Lembaga BBPSIP dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 469.023.555.000. Secara rinci anggaran masing-masing program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp.218.386.450.000; Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar -, dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.250.637.105.000.

Pada PK awal, terdiri dari indikator kinerja ;

1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dengan target 34 SNI;
2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dengan target 21 lembaga;
3) Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan dengan target – unit;
4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dengan target 80; dan
5) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dengan target 85.

Indikator kinerja jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan merupakan target perbanyakan benih dalam satuan unit. indikator ini tidak dilaksanakan karena saat penetapan PK awal ini saat BSIP sedang pada masa persiapan transformasi lembaga menjadi BRMP, yang mana pada saat beralih ke BRMP maka sudah tidak melakukan kinerja dengan indikator jumlah produk instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (unit). Secara lengkap PK awal dapat dilihat pada Lampiran 5. Sasaran dan indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Awal dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Awal BBPSIP (Januari s/d Maret) Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	34
		Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)	21
2.	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah produk standar instrumen pertanian (unit)	-
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	80

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
4	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Anggaran (NKA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	85

Seiring dengan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) bertransformasi menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) demikian pula Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) menjadi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP) sesuai Perpres No 192 Tahun 2024 dan Permentan No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2025 dan telah diundangkan pada tanggal 8 April 2025, Berita Negara RI Tahun 2025 Nomor 250, maka PK juga dilakukan revisi ke I pada Bulan Mei 2025.

PK revisi ke I disahkan pada tanggal 3 Mei 2025 dengan total pagu anggaran sebesar Rp464.514.476.000, yang dapat dilihat pada Lampiran Pada PK revisi tersebut terdapat perubahan anggaran dari masing-masing indikator, disebabkan karena adanya realokasi anggaran dari kegiatan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Insdustri untuk program dukungan manajemen dan kegiatan perbenihan. Secara rinci anggaran masing-masing program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp 134.856.450.000. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp 32.163.640.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp297.494.386.000.

Alokasi anggaran Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 mengalami beberapa kali penyesuaian seiring dengan kebijakan refocusing, realokasi program, serta penambahan kegiatan strategis. Pada PK awal, total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp469,02 miliar, yang kemudian mengalami perubahan pada PK revisi I per Mei 2025 menjadi Rp464,51 miliar, atau berkurang sebesar Rp4,51 miliar.

Penurunan anggaran pada PK Revisi I terutama disebabkan oleh realokasi anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang berkurang sebesar Rp83,53 miliar, seiring dengan pemindahan anggaran kegiatan pendampingan program strategis ke kegiatan Dukungan Manajemen dan kegiatan pendampingan program strategis di unit kerja pusat serta balai lingkup BRMP. Pada saat yang sama, muncul alokasi baru pada Program Ketersediaan sebesar Rp32,16 miliar yang diperuntukkan bagi kegiatan perbenihan, sehingga turut mengimbangi penurunan anggaran pada program lainnya. Selain itu, Program Dukungan Manajemen mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp46,86 miliar sebagai dampak langsung dari realokasi kegiatan dari Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri. Pada PK revisi I, revisi sasaran kegiatan, indikator kinerja utama, target dan anggaran sesuai perubahan nomenklatur dari BBPSIP ke BBPPMP, termuat pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Revisi I BBPPMP Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Persentase pelaku usaha pertanian yang menerapkan standar pertanian (%)	50
2.	Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif	Persentase pemenuhan kebutuhan benih/bibit sumber spesifik Lokasi (%)	80
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorietasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)	85
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)	85

Selanjutnya, pada PK Revisi II per Desember 2025, total anggaran kembali mengalami peningkatan menjadi Rp470,44 miliar, atau bertambah sebesar Rp5,93 miliar dibandingkan PK Revisi I. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh penambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,47 miliar pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, serta penambahan anggaran kegiatan perbenihan bawang putih pada Program Ketersediaan sebesar Rp7,41 miliar. Di sisi lain, terjadi pengurangan anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2,96 miliar yang direalokasikan untuk mendukung kegiatan perbenihan bawang putih sebagai salah satu komoditas strategis nasional. PK Revisi II ini merupakan PK terakhir Tahun 2025 yang digunakan sebagai dasar pada penyusunan Lakin 2025, yang dapat dilihat pada Tabel 8. Secara rinci PK revisi II dapat dilihat pada Lampiran 7.

Secara keseluruhan, dinamika anggaran PK Tahun 2025 mencerminkan fleksibilitas kebijakan penganggaran BBPPMP dalam merespons prioritas strategis nasional, khususnya penguatan perbenihan komoditas strategis dan pendampingan program strategis dan optimalisasi dukungan manajemen. Penyesuaian anggaran ini menjadi bagian dari upaya memastikan efektivitas pelaksanaan program, meskipun pada sisi lain memerlukan penguatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan agar perubahan anggaran yang terjadi tidak berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Revisi ke II BBPPMP Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
1.	Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian	1.1. Persentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian	14,29	%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
2.	Meningkatnya Adopsi Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	2.1. Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	-	%
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorietasi pada Layanan Prima	3.1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	85,53	Nilai (0-100)
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	89,00	Nilai (0-100)

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

BBPPMP selalu berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (*input*), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses), serta keluaran (*output*). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2025. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi BBPPMP.

Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan IKU dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya secara periodik beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal. Salah satu bentuk pemantauan yang dilakukan adalah dengan membuat matriks Rencana Aksi (Renaksi). Renaksi BBPPMP Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 8.

Pada tahun anggaran 2025, sesuai dengan IKU dan PK yang disesuaikan dengan Draft Renstra BBPPMP 2025-2029, BBPPMP telah menetapkan empat sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian;
2. Meningkatnya Adopsi Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif;
3. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dan ;
4. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Selanjutnya, keempat sasaran tersebut diukur dengan empat indikator kinerja *output* berupa:

1. Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian;
2. Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif;

3. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

Pengukuran Indikator Kinerja (IKU) dilakukan melalui perhitungan rata-rata capaian kinerja yang merupakan gabungan dari beberapa IKU yang sifatnya *Maxsimize* sehingga nilai kinerja nya akurat (menggunakan polarisasi dan perspektif). Pengukuran kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan manual IKU BBPPMP Tahun 2025 yang dapat dilihat pada Lampiran 9.

Penetapan kategori keberhasilan sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tanggal 5 April tahun 2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: 1) Sangat berhasil jika capaian>100%; 2) Berhasil jika capaian 80-100%; 3) Cukup berhasil jika capaian 60-79%, dan 4) Tidak berhasil jika capaian 0-59%.

Tabel 9. Pengukuran Kinerja BBPPMP Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja (%)	Capaian sesuai LAKIN (%)
1.	Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian	Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian	14,29	34,03	238,21	117,63
2.	Meningkatnya Adopsi Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	-			
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	85,53	86,09	100,65	100,65
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	90,15	90,25	100,11	100,11
	Total					**106,13**

Berdasarkan Tabel 9, capaian indikator kinerja BBPPMP tahun 2025 sebesar 106,13% atau termasuk dalam kategori sangat berhasil. Seluruhnya untuk

sasaran BBPPMP masuk dalam kategori sangat berhasil dengan nilai lebih dari 100%. Indikator dimaksud adalah:

1. Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian
2. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

Namun demikian untuk indikator Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif pada Tahun 2025 belum ditetapkan targetnya, karena pada Tahun 2025 belum tersedia alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut.

Keberhasilan pencapaian sasaran sesuai yang ditetapkan pada PK didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana serta sumberdaya anggaran. Disamping itu keberhasilan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup BBPPMP. Keberhasilan pencapaian didukung juga oleh pengawalan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Kegiatan pengawalan ini dilegalkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan dan Modernisasi Pertanian Nomor : 522/Kpts/OT.200/H.12/05/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernsasi Pertanian seperti dapat dilihat pada Lampiran 10.

Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Metode yang dilakukan dengan memantau kemajuan capaian kinerjanya secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan beserta kendala yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyusunan LAKIN yang ditujukan agar penyusunan LAKIN sesuai dengan tahapan yang ditetapkan yang melibatkan seluruh unsur-unsur penyusun LAKIN yang dilegalkan sesuai SK No 521/Kpts/OT.200/H.12/05/2025 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun Anggaran 2025 Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian. Hal ini dimaksudkan agar LAKIN yang disusun dapat sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan. Secara rinci SOP LAKIN dan SK Tim Penyusun LAKIN dapat dilihat pada Lampiran 11 dan 12.

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian

Sasaran meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian memiliki indikator kinerja yaitu: presentase pelaku usaha pertanian yang menerapkan standar pertanian. Jumlah Pelaku Usahatani yang menerapkan standar pada tahun berjalan di lingkup Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian diperoleh melalui kegiatan produksi benih sumber spesifik lokasi, ICARE dan Lembaga Penerap Standar yang didampingi.

Indikator Kinerja 1:

Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian

Untuk mengukur capaian indikator tersebut, dilihat berdasarkan pelaku usaha yang menerapkan standar pertanian pada tahun berjalan dibandingkan target pelaku usaha yang menerapkan standar pertanian selama lima tahun. Pelaku usaha dimaksud dapat merupakan kelompok tani, koperasi, produsen benih, dll. Presentase pelaku usaha pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 14,29%. Target tersebut merupakan perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 34 pelaku usaha dengan asumsi masing-masing satker lingkup BBPPMP memiliki 1 pelaku usaha dibagi dengan target pelaku usaha selama 5 tahun sebanyak total 238 pelaku usaha, dengan rincian target tahun 2025 sampai tahun 2027 sebanyak 34 pelaku usaha, tahun 2028 sampai 2029 sebanyak 68 pelaku usaha, seperti tercantum pada tabel 10.

Tabel 10. Target Usaha Tani Tahun 2025 - 2029

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Target Usaha Tani (pelaku usaha)	34	34	34	68	68	238

Capaian pelaku usaha yang menerapkan standar pertanian pada tahun 2025 sebanyak 81 pelaku usaha. Dengan demikian presentase pelaku usaha pertanian yang menerapkan standar pertanian sebesar 34,03%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 14,29% maka capaian kinerja pada indikator pertama sebesar 238,21% yang dapat dilihat pada Tabel 11.

Berdasarkan Permentan 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi yang menjelaskan bahwa capaian kinerja output maksimal 120%. Dengan demikian walaupun capaian kinerja pada indikator Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian telah mencapai 238,21%,

tetapi nilai yang dihitung sebagai capaian maksimal hanya 120%. Hal ini dapat diasumsikan capaian usaha tani sebanyak 40 usaha tani sehingga mencapai nilai kinerja sebesar 117,63%, telah memenuhi batas maksimal di bawah 120%.
Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pendampingan sebesar Rp26.369.292.000 dengan realisasi sebesar Rp25.822.271.203 atau 97,93%. Secara rinci realisasi pelaku usaha yang menerapkan standar pertanian Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 11. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian (%)

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)	Tertulis di LAKIN
Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian	%	14,29	34,03	238,21	117,63

Tabel 12. Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian lingkup BBPPMP Tahun 2025

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
1	Aceh							
		Bungong Jaroe Riting	Desa Riting, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Propinsi Aceh	Janeng (Gadung)	Pendampingan oleh BRMP Aceh terkait penerapan standar kemasan produk	Juli -Desember 2025	SNI 01-4306-1996 Keripik ubi jalar	Juli - Desember 2025
2	Sumatera Utara							
		Kilang Padi Siputri	Desa Celawan, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai.	Beras	Pelatihan dan Pendampingan Penerapan SNI 6128:2020 Beras.	17 Desember 2025	SNI 6128:2020 Beras	19 Desember 2025
3	Sumatera Barat							
		Kelompok Tani Inovasi	Jorong Belubus Nagari Sungai Talang Kec.Guguak Kab.Lima Puluh Kota	Kakao	Budidaya, Pasca Panen dan Olahan Kakao	6 November 2025	SNI 2323:2008/Amandemen 1:2010 Biji kakao-AMANDEMEN 1	November - Desember 2025
		Kelompok Tani Mandiri	Jorong Belubus Nagari Sungai Talang Kec.Guguak Kab.Lima Puluh Kota	Kakao	Budidaya, Pasca Panen dan Olahan Kakao	6 November 2025	SNI 2323:2008/Amandemen 1:2010 Biji kakao-AMANDEMEN 1	November - Desember 2025
		Kelompok Tani Sejahtera	Jorong Belubus Nagari Sungai Talang Kec.Guguak Kab.Lima Puluh Kota	Kakao	Budidaya, Pasca Panen dan Olahan Kakao	6 November 2025	SNI 2323:2008/Amandemen 1:2010 Biji kakao-AMANDEMEN 1	November - Desember 2025
4	Riau							
		Kelompok Tani "Jang Jaya"	Jl. Parit Jang RT/RW 02/01, Desa Kedaburapat, Kec.Rangsang Pesisir, Kab.Kep.Meranti	Kopi Bubuk Merk My Limer Coffee	Pendampingan dari BRMP Riau pada tanggal 23 Oktober 2025 untuk monitoring penerapan SNI SNI 8964:2021	23 Oktober 2025	SNI 8964:2021 Kopi sangrai dan kopi bubuk	Januarl 2025

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
		Nata de Coco "Salju"	Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.	Olahan Kelapa	Sosialisasi SNI 01-4317-1996 Nata dalam kemasan oleh BSN dan BRMP Riau	11 November 2025	SNI 01-4317-1996 Nata dalam kemasan	November 2025
5	Jambi							
		Kelompok Tani Selang Rengas	Dusun Pulau Pinang, RT 01, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi	Benih Padi	Penguatan keberlanjutan penerapan standar: 1. SNI 8969:2021 - Indonesian Good Agricultural Practices (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik. 2. SNI 7331:2021: Ketentuan Gudang Komoditas Pertanian.	28 Oktober 2025	1. SNI 8969:2021 - Indonesian Good Agricultural Practices (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik. 2. SNI 6233:2015 Benih padi inbrida. 3. SNI 7331:2021: Ketentuan gudang komoditas pertanian.	Oktober 2025
6	Sumatera Selatan							
		Poktan Suka Maju	Desa Sukanegara, Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan	Padi	Bimtek SL Tematik oleh BPP Nusa Bakti	Mei - Agustus 2025	1. SNI 8969:2021 - IndoGAP – Cara budidaya tanaman pangan yang baik. 2. SNI 6233:2015, Produksi benih padi inbrida.	Juli - Oktober 2025
		Poktan Mekar Jaya	Desa Ganti Warno, Kecamatan Belitang	Padi	Bimtek SL Tematik oleh BPP Nusa Bakti	Mei - Agustus 2025	1. SNI 8969:2021 - Indonesian Good	Juli - Oktober

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
			III, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan				Agricultural Practices (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik. 2. SNI 6233:2015 Produksi benih padi inbrida.	2025
7	Bengkulu							
		Brigade Pangan Tunas Muda	Desa Sari Mulyono, Kecamatan Sukaraja. Kabupaten Seluma	Padi	1. Bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan brigade pangan angkatan XXIII 2. Pelatihan penyiapan tenaga kompeten brigade pangan 2025 3. Pelatihan pengelolaan keuangan BP di dinas pertanian kabupaten seluma 4. Sosialisasi diseminasi standar isntrumen pertanian provinsi Bengkulu " PTT)padi sawah dan SNI produksi benih padi sehat"	1.23 September 2025 2.28 Oktober 2025 3.4 November 2025 4.6 November 2025	GAP Budidaya Padi Sawah/PTT Padi Sawah	November dan Desember 2025
		Kelompok Tani Padang Segaro	Desa Dusun Baru 2, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara	Padi	Sosialisasi Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Padi	28 Juni 2025	1. Kepmentan Nomor 966 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan.	Juli

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
							2. SNI 6233:2015 Benih padi inbrida. 3. SNI 8969:2021 - Indonesian Good Agricultural Practices (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik. 4. GAP Budidaya Padi Sawah/PTT Padi Sawah.	
8	Bangka Belitung							
		Gapoktan Hikmah Tani	Banyuasin, Riausilip, Bangka, Babel	Padi	Budidaya Padi Sawah	21 November 2025	GAP Budidaya Padi Sawah	31 Mei 2025
		Kimak Bahrin Lestari	Kimak, Merawang, Bangka, Babel	Padi	Budidaya Padi Sawah	21 November 2025	GAP Budidaya Padi Sawah	31 Mei 2025
9	Kepulauan Riau							
		Karya Tani Jaya	Kelurahan Sungai Lekop, Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau	Padi	1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Pendamping Mendukung Program Swasembada Pangan di Kabupaten Bintan. 2. Pendampingan Program Pengembangan Padi Lahan Kering pada	23 Juli 2025	SNI 8969:2021 Indonesian Good Agriculture Practices (IndoGAP) - Cara budidaya tanaman pangan yang baik	Mei s.d. Desember 2025

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
					Lahan Perkebunan dan Lahan Kering Lainnya di Kepulauan Riau Swadaya Petani).			
10	Lampung							
		Koperasi Produsen Srikandi Maju Bersama	Dusun Sidorejo Pekon Ngarip Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus	Kopi, Pupuk	1. Sekolah Lapang GAP kopi, GHP kopi, dan GAP ternak kambing 2. Pelatihan GAP Kesehatan Hewan 3. Visit Remora farm	1.8-9 Oktober 2025 2.13-19 Oktober 2025 3.22-25 Oktober 2025	4.GAP Kopi, GHP kopi-kambing 5.SOP Usaha Pupuk Anorganik 6.SNI 01-2907-2008 Biji kopi	Oktober 2025
11	Banten							
		Koperasi Anugerah Aren Banten Nusantara	Munjul, Pandeglang, Banten	Gula Aren Semut	1. Pelatihan Good Hygiene Practices (GHPs) & Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 2. Pelatihan agroforesti komoditas gula aren 3. Pelatiahan pengolahan HHBK gula aren 4. Pembinaan pemeriksaan kesehatan koperasi	10 Oktober 2025	SNI 3743:2021 Gula palma	November 2025
12	DKI Jakarta							
		Gapoktan Rorotan Jaya	Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Jakarta	Padi	Bimtek teknik budidaya spesifik untuk petani padi di Jakarta	24 Juli 2025	SNI 8969:2021 Indonesian Good Agriculture Practices (IndoGAP) - Cara budidaya tanaman pangan yang baik	Juli s.d Desember 2025

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
		Poktan Padi Jakarta Barat (Jawa Indah, Hizbul Wathan, Karya Tani)	Kecamatan Kalideres, Kelurahan Semanan, Jakarta barat	Padi	Bimtek budidaya padi spesifik Jakarta	26 Juni 2025	SNI 8969:2021 Indonesian Good Agriculture Practices (IndoGAP) - Cara budidaya tanaman pangan yang baik	Juni s,d Desember 2025
13	Jawa Barat							
		Koperasi Produsen Horti Agro Makmur	Kec.Pasirwangi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	Kentang	Bimbingan Teknis	Oktober 2025	Penerapan GAP dan GHP Kentang	Desember 2025
		Koperasi Produsen Cikajang Agro Prakarsa	Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	Kentang	Bimbingan Teknis	Oktober 2025	Penerapan GAP dan GHP Kentang	Desember 2025
		Koperasi Produsen Putra Cisurupan Berdaya	Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	Kentang	Bimbingan Teknis	Oktober 2025	Penerapan GAP dan GHP Kentang	Desember 2025
		Koperasi Produsen Sukaresmi Mulus Rahayu	Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	Kentang	Bimbingan Teknis	Oktober 2025	Penerapan GAP dan GHP Kentang	Desember 2025
		Koperasi Produsen Eptilu Membangun Indonesia	Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	Kentang	Bimbingan Teknis	Oktober 2025	Penerapan GAP dan GHP Kentang	Desember 2025
		Koperasi Produsen Peternak Cikal Maju	Kec.Pasirwangi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	Ternak Domba	Bimbingan Teknis	Oktober 2025	Penerapan GFP Domba	Desember 2025

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
		Koperasi Produsen Multi Pihak Rasana Rasyidah Mandiri	Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	Ternak Domba	Bimbingan Teknis	Oktober 2025	Penerapan GFP Domba	Desember 2025
		Brigade Sri Unggul	Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat	Padi	Bimbingan Teknis dan demplot	Oktober 2025	Penerapan GAP dan GHP Padi	Desember 2025
14	D.I Yogyakarta							
		Kelompok Wanita Tani SARI RASA	Babakan Cirawada RT 03/RW 03 Losari Brebes	Olahan Pisang	VUB Pisang Hasil Kultur Jaringan, SOP Kebun Pisang Terstandar, Pembuatan Keripik Pisang Varian Rasa dan Es Krim Pisang	Desember 2025	SNI 01-4315-1996 Keripik pisang	Desember 2025
		KUB Nira Lestari	Kokap, Kabupaten Kulon Progo	Gula Semut	-		SNI 6729-2016 Sistem pertanian organik	Oktober sampai desember
15	Jawa Tengah							
		Gapoktan WR Supratman	Kaligesing, Purwerejo, Jawa Tengah	Manggis organik			SNI 6729-2016 Sistem pertanian organik	
16	Jawa Timur							
		KA. Barokah	Kampung Anyar RT.02/RW.01, Desa Sukolilo, Kec. Jabung, Kab. Malang, Jawa Timur	Hortikultura (Keripik Buah & Sayur)	1.Pelatihan CCPOB 2.Pelatihan Keamanan Pangan	1. 7 Nov 2025 2. 24 Nov 2025 3. 24 Des 2025	Sertifikasi HACCP	Desember 2025
		Sri Tanjung	Dusun Mangi	Hortikultura	1.Pelatihan CCPOB	1. 7 November	Sertifikasi HACCP	Desember

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
			RT.04/RW.05, Desa Sukosari, Kec. Kasembon, Kab. Malang, Jawa Timur	(Minuman Serbuk Instan Tradisional)	2. Pelatihan Keamanan Pangan 3. Pelatihan Awareness HACCP	2025 2. 24 November 2025 3. 24 Des 2025		2025
		Koperasi Produsen Mangga Putar Maslahat Pasuruan	Kecamatan Rembang dan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	Mangga	1. Pelatihan olahan mangga 2. Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit pada tanaman mangga 3. Pelatihan K3 4. Pelatihan perbenihan mangga	16 Oktober s/d 5 November 2025	GAP, GHP, K3	Desember 2025
		Koperasi Produsen Jagung Jaya Abadi Pasuruan	Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	Jagung	1. Pelatihan olahan jagung 2. Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit pada tanaman mangga 3. Pelatihan K3 4. Pelatihan pengoperasian mesin dryer biji jagung	10-31 Oktober 2025	GAP, GHP, K3	Desember 2025
17	Bali							
		Koperasi Produsen Tani Kini Dharma Kriya	Desa Belantih Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Provinsi Bali	Kopi Arabika	Bimbingan teknis penerapan SNI 01-2007-2008 Biji kopi dan SNI Bina UMK	Oktober dan November 2025	SNI 01-207-2008 Biji kopi	Desember 2025
18	Nusa Tenggara Timur							
		CV. Magna Jaya (Merk olahan biji kopi Bajawa "Sombra Coffee")	Kelurahan Liliba, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT.	Kopi	1. Pendampingan penerapan standar peningkatan mutu produk tahun 2025 2. Sistem Manajemen Mutu	September-Desember 2025	SNI 8964:2021 Kopi sangrai dan kopi bubuk	Oktober - Desember 2025

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
					SNI/ISO 9001:2015 3. Sosialisasi SNI 8964:2021 tentang Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk			
19	Nusa Tenggara Barat							
		1. Koperasi Ngaro Ngarat Jaya Usaha 2. Koperasi Petani Peternak Modern 3. Koperasi Makmur Aman Sejahtera	1. Desa Bunut Baok, Praya, Lombok Tengah, NTB 2. Desa Panji Sari, Praya, Lombok Tengah, NTB 3. Desa Jago, Praya, Lombok Tengah, NTB	1. Jagung dan Ayam KampunG 2. Jagung dan Ayam 3. Ayam Kampung	1. Standar/GAP Budidaya Ayam Kampung 2. Pemanfaatan Bahan Lokal Sebagai Pakan ternak Alternatif Ayam Kampung 3. Standar Penanganan Kesehatan hewan ternak ayam Kampung 4. Standar pembuatan pakan alternatif untuk ayam kampung	1. 11 Desember 2025 2. 27 Desember 2025 3. 29 Desember 2025 4. 7,9,14,16,21, dan 23 Oktober 2025	1. Standar/ GAP Budidaya Ayam Kampung Unggul. 2. SNI 9283:2023 Benih jagung Hibrida. 3. SNI 8405-2:2023 Bibit ayam umur sehari/KURI.	Desember 2025
		UD. Rempah Organik Lombok=Muhir	Dewe Some, Sakra, Lombok Timur, NTB	Vanili Organik	1. Standar Budidaya Vanili Organik 2. Standar Pengedalian OPT Pada tanaman Vanili Organik		Standar Budidaya Vanili Organik (Standar USDA-Amerika Serikat)	Desember 2025
		Asosiasi Petani Vanili Organik Lombok Indonesia=Rusian	Sembalun, Lombok Timur, NTB	Vanili Organik	1. Standar Budidaya Vanili Organik 2. Standar Pengedalian OPT Pada tanaman Vanili Organik		Standar Budidaya Vanili Organik (Standar USDA-Amerika Serikat)	Desember 2025
		Koperasi Maju Mandiri Modern (3M)	Tanak Rarang	Jagung	Standar Produksi Benih Jagung Hibrida	10 Desember 2025	SNI 9283:2023 Benih jagung hibrida	Desember 2025
		PB Sari Makmur	Jln Sunan Sudar	Padi inbrida	1. Mengikuti Pelatihan	1. 2010	1. Penggunaan Benih	

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
			Kebon Jaya Barat, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram		Perbenihan di Bogor, Jawa Barat. 2. Mengikuti Bimtek Perbenihan & Teknologi Produksi Benih Padi oleh BRMP NTB. 3. Penangkar Padi untuk Pulau Sumbawa & Lombok (Luas 100 ha, Produksi 800 ton/tahun). 4. Membina banyak kelompok tani dengan sistem kerjasama UD Sari Makmur.	2. November 2024 3. April 2010 4. Januari - Desember 2025	Unggul berlabel dan bersertifikat sejak tahun 2015. 2. Menerapkan benih unggul terbaru (BK, Pajajaran, Situbondo) di tahun 2025 dengan provitas tinggi. 3. Melaksanakan rekomendasi pemupukan sesuai kebutuhan tanaman. 4. Melaksanakan Sistem Tanam Jajar Legowo.	
		Poktan Adu Nasib	Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram	Padi	1. Pelatihan oleh Dinas Pertanian Provinsi NTB. 2. Bimtek Produksi Benih Padi dan GAP Standar Budidaya Padi oleh BRMP NTB 3. Pelatihan Pengendalian Hama oleh Bapeltabun Provinsi.	Agustus, Oktober dan November 2025	1. Penggunaan benih unggul berlabel dan bersertifikat sejak 2014. 2. Menggunakan benih Inpari 49 Jembar dan Inpari 32; kerjasama penangkaran dengan UPBS BRMP NTB tahun 2025.	Agustus, Oktober dan November 2025

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
							3. Pemupukan sesuai rekomendasi kebutuhan tanaman. 4. Sistem Tanam Jajar Legowo (2:1 dan 4:1). 5. Pengendalian HPT sesuai rekomendasi.	
		PB TEMAS SEJAHTERA, NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT, NTB	Narmada, Lombok Barat, NTB	Padi	Mengikuti SOP Produksi benih Padi yang dilaksanakan oleh BRMP NTB.	Mei-Agustus 2025	1. Penggunaan Benih Unggul berlabel dan bersertifikat sejak tahun 2015. 2. Menerapkan benih unggul terbaru (Inpari 49 Jembar). 3. Kerjasama penangkaran dengan UPBS BRMP NTB tahun 2025 dengan provitas tinggi dan pembinaan kelompok tani anggota. 4. Melaksanakan rekomendasi pemupukan sesuai kebutuhan tanaman. 5. Melaksanakan	Mei-Agustus 2025

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
							Sistem Tanam Jajar Legowo (4:1). 6. Melakukan pengendalian HPT sesuai rekomendasi. 7. Penggunaan alat panen combine harvester.	
20	Kalimantan Selatan							
		KT. Tabah Berdayung	Kurau, Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Padi	Pendampingan terkait Pengenalan VUB, teknologi budidaya, Penangkaran benih padi	April -Mei 2025	Sertifikasi benih	Mei-Des 2025
		KT. Karya Baru	Kurau, Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Padi	Pendampingan terkait Pengenalan VUB, teknologi budidaya, Penangkaran benih padi	April -Mei 2025	Sertifikasi benih	Mei-Des 2025
		KT. Karya Maju	Madastana, Barito Kuala, Kalimantan Selatan	Padi	Pendampingan terkait Pengenalan VUB, teknologi budidaya, Penangkaran benih padi	April -Mei 2025	Sertifikasi benih	Mei-Des 2025
21	Kalimantan Barat							
		Koperasi Segarau Bangun Tani	Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalbar	Jeruk	1. Pelatihan penguatan manajemen korporasi petani pada korporasi	Oktober 2025	1. SNI 8185-2015 Mesin panen padi kombinasi (*Paddy*	Okt-Des 2025

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
					petani oleh BRMP Kalimantan Barat. 2. Pelatihan penguatan manajemen UPJA dan operasional alsintan oleh BRMP Kalimantan Barat.		*combine harvester*) 2. SNI 8185:2019/AMD1:2024 Combine harvester	
		Koperasi Sungai Kelambu Sejahtera	Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat	Padi	1. Pelatihan Teknologi PTT Budidaya Padi 2. Pelatihan Operasional Mesin Tanam Padi (Rice Transplanter) 3. Sosialisasi Aplikasi Sakti Core System untuk mencatat transaksi masuk dan keluar 4. Manajemen UPJA	Oktober-November 2025	1. Standar Teknologi PTT Budidaya Padi 2. SNI 6233:2015 Benih padi inbrida	Okt-Des 2025
		Koperasi Tebas Gemilang Jaya	Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat	Padi	1. Pelatihan Teknologi PTT Budidaya Padi 2. Pelatihan budidaya padi Sistem RAISA 3. Pelatihan Operasional Mesin Tanam Padi (Rise Transplanter) 4. Pelatihan perawatan dan troubleshotting Mesin Disesel 5. Pelatihan pembuatan perata (Leveller) pada pengolahan tanah budidaya padi 6. Pelatihan penggunaan pupuk hayati	Oktober-November 2025	1. Standar Teknologi PTT Budidaya Padi 2. Standar Produksi Beras	Okt-Des 2025

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
					7. Manajemen UPJA			
		Koperasi Tebas Mekar Bersatu	Desa Tebas Sungai, Kec. Tebas, Kab. Sambas	Padi	1. Pelatihan Penguatan Manajemen Koperasi Petani oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat. 2. Pelatihan Penguatan Manajemen UPJA dan Operasional Alsintan oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat. 3. FGD Model Desa Mandiri Benih oleh Balai.	Oktober-November 2025	Teknologi budidaya tanaman padi dengan pendekatan PTT	Okt-Des 2025
		Koperasi Sejiram Jaya Bersama	Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalbar	Jeruk	1. Pelatihan penguatan manajemen korporasi petani pada korporasi petani oleh BRMP Kalimantan Barat. 2. Pelatihan penguatan manajemen UPJA dan operasional alsintan oleh BRMP Kalimantan Barat.	Oktober 2025	1. SNI 8185-2015 Mesin panen padi kombinasi (*Paddy combine harvester*) 2. SNI 8185:2019/AMD1:2024 Combine Harvester	Okt-Des 2025
22	Kalimantan Tengah							
		Gapoktan Sinar Harapan	Kec. Teluk Sampit, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi	Padi	Bimbingan Teknis tentang: 1. Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	25 November 2025	SNI 8969:2021 Indonesian Good Agriculture Practices	Oktober

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
			Kalimantan Tengah		2. Penanganan Pascapanen yang Baik (Good Handling Practices) Komoditas Padi 3. Standardisasi Beras sesuai SNI 6128-2020 4. Pentingnya Standar Instrumen Pertanian dalam Usahatani 5. Pengenalan SNI Lingkup Pertanian		(IndoGAP) - Cara budidaya tanaman pangan yang baik	
23	Kalimantan Timur							
		KPB Sumber Makmur	Marangkayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	Padi	Pendampingan Perbenihan standar oleh tim Perbenihan dan UPT-PSB TPH Prov Kaltim	30 Mei 2025	Produksi Benih Terstandar	Mei-Des
		KPB Tani Maju	Kelurahan Lempake, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Padi	Pendampingan Perbenihan standar oleh tim Perbenihan dan UPT-PSB TPH Prov Kaltim	2 Juli 2025	Produksi Benih Terstandar	Juli-Des
		KPB Padat Karya	Anggana, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	Padi	Pendampingan Perbenihan standar oleh tim Perbenihan dan UPT-PSB TPH Prov Kaltim	2 September 2025	Produksi Benih Terstandar	Sep-Des
		KT Rukun Sentosa	Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Padi	Pendampingan Perbenihan standar oleh tim Perbenihan dan UPT-PSB TPH Prov Kaltim	19 Maret 2025	Produksi Benih Terstandar	Mar-Des
		CV Sinar Tani	Tanjung Palas, Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara	Padi	Pendampingan Perbenihan standar oleh tim Perbenihan BRMP Kaltim	4 Juni 2025	Produksi Benih Terstandar	Juni-Des

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
24	Sulawesi Utara							
		Koperasi Usaha Tani Warisa	Kec.Talawaan Kab.Minahasa Utara Prov.Sulawesi Utara	Kelapa dan jagung	Standard Mutu Kelapa-Jagung	16 Desember 2025	Standard/ GAP Budidaya	Desember
		Koperasi Sinar Pagi Sejahtera	Kec.Kauditan Kab.Minahasa Utara Prov.Sulawesi Utara	Jagung	Standard Mutu Kelapa-Jagung	8 November 2025	Standard/ GAP Budidaya	Nopember - Desember
25	Sulawesi Barat							
		Puncak Mandiri	Alu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat	Padi Gogo	Bimbingan Teknis	November 2025	SNI 8969:2021 Indonesian Good Agriculture Practices (IndoGAP) - Cara budidaya tanaman pangan yang baik pangan	November - Desember 2025
		Harapan Mulyo	Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat	Padi	Pendampingan	Mei-September 2025 (Pendampingan)	1. SNI 6233:2015 Benih padi inbrida 2. Good Agricultural Practices (GAP) 3. Good Harvesting Practices (GHP)	Mei-Septembe r 2025
		Padaelo	Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat	Padi	Pendampingan	Agustus-Desember 2025 (Pendampingan)	1. SNI 6233:2015 Benih padi inbrida 2. GAP Padi sawah	Agustus-Desember 2025
		Sinar Maros	Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat	Padi	Pendampingan	Agustus-Desember 2025 (Pendampingan)	1. SNI 6233:2015 Benih padi inbrida 2. GAP (Good Agricultural Practices) padi	Agustus-Desember 2025

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
							sawah	
26	Sulawesi Tenggara							
		Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera	Aere, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara	Sapi Potong	Bimbingan Teknis dan Pendampingan	15 dan 16 oktober 2025	SNI 7763:2024 Pupuk organik padat	Oktober - November 2025
		Koperasi Produsen LEM Sejahtera Kab. Kolaka Timur	Lambandia, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara	Kakao	Bimbingan Teknis dan Pendampingan	21 Oktober 2025	Permentan No 48 tahun 2014 tentang pedoman teknis budidaya kakao yang baik (GAP)	Oktober 2025
		Sipakainge	Aere, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara	Sapi Potong	Sosialisasi dan Pendampingan	21 Agustus 2025	bimbingan teknis atau sosialisasi GAP (*Good Agricultural Practice*) dan GHP (*Good Handling Practice*) sapi potong	Agustus - November 2025
		Tekad Merata	Lambandia, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara	Kakao	Sosialisasi dan Pendampingan	25 November 2025	bimbingan teknis atau sosialisasi GAP (*Good Agricultural Practice*) dan GHP (*Good Handling Practice*) kakao	November 2025
		Harapan Maju	Lambandia, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara	Kakao	Sosialisasi dan Pendampingan	3 Desember 2025	bimbingan teknis GAP terkait pengendalian OPT kakao	Desember 2025
27	Sulawesi Tengah							
		Lembaga Pemasyarakatan Lapas Palu,	Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Desa Langaleso Kec. Dolo	Hortikultura (cabai)	Sosialisasi, Bimbingan teknis, dan Pendampingan	April-Agustus 2025	Good Agriculture Practices (GAP) Cabai	

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
		Sulawesi Tengah	Kab. Sigi Sulteng					
28	Sulawesi Selatan							
		UD. Harapan Tani	Jl. Poros Pallangga, Kel. Bungaejaya, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Sulsel	Padi	1.Sosialisasi 2.Pelatihan teknis 3.Pendampingan	3 November 2025	SNI 6233:2015 Benih padi inbrida	
		Koperasi Bawakaraeng Maju Bersama	Desa Kanreapia, Kec. Tombolopao, Kab. Gowa	Kentang	Sosialisasi, bimbingan teknis tentang produksi benih kentang kelas G2 terstandar	31 Oktober 2025	SNI 9227:2023 Produksi umbi kentang	
		Koperasi Tonasa Sukses Mandiri	Desa Tonasa, Kec. Tombolopao, Kab. Gowa	Sapi Potong	Sosialisasi, bimbingan teknis tentang pengolahan pakan sapi (rumput gajah)	1 November 2025	SNI 9316:2024 Benih setek rumput gajah	
29	Gorontalo							
		Kelompok Tani Semangat Baru	Desa Bunggalo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo	Padi Sawah	Sosialisasi Teknis Diseminasi Standar Budidaya Padi SNI IndoGAP Tanaman Pangan SNI 8969:2021	24 Oktober 2025	Pendampingan Kegiatan SNI IndoGAP Tanaman Pangan (Budidaya Padi Sawah)	September-Desember 2025
		Koperasi Produsen Sukma Melati Hutabohu	Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Pupuk Organik Padat	Pelatihan penerapan SNI 7763:2018 dan Standar Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015	1.13 Juli 2023 2.27 Juli 2023	SNI 7763:2018 Pupuk organik padat	Juni-Desember 2023
		UMKM Helco Melati	Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Kelapa	Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	28 Oktober 2025	1.SNI 8904:2020 Minyak goreng kelapa 2.SNI 9001:2015 Sistem manajemen	Januari-Desember 2025

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
							mutu 3. CPPOB Minyak Goreng 4. SNI 3741:2013 Minyak goreng	
		UD Taat Karya	Desa Bulotalangi, Kec Bolango Timur, Kab Bone Bolango, Gorontalo	Beras Medium dan Premium	Pelatihan penerapan Standar Beras dan Standar Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015	11 Juni 2024	SNI 6128:2020 Beras	Juni-Desember 2024
30	Maluku							
		Usaha Baru	Kilo 7, Makariki, Amahai, Maluku Tengah	Padi	Bimtek IndoGAP; Bimtek Penanganan Pascapanen Padi	1. 17 Oktober 2025 2. 18 November 2025	1. SNI 8969:2021 Indonesian Good Agriculture Practices (IndoGAP) - Cara budidaya tanaman pangan yang baik 2. SNI 6233:2015: Benih padi inbrida	Septembe r-Desember 2025
31	Maluku Utara							
		CV. Halmahera Agro Mandiri (HAGRI) - Penangkaran Benih Padi	Desa Soa hukum, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara,Provinsi Maluku Utara	Padi	Budidaya Tanaman Padi Ter-standar	31 Mei 2025	1. Sertifikat Standar No.1102251214360 001 (Perizinan Berusaha Berbasis Risiko), diterbitkan 11 Feb 2025 2. SNI 8969:2021 Indonesian Good Agriculture Practices (IndoGAP) - Cara budidaya tanaman	Juli-Desember

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
							pangan yang baik	
		Budidaya dan Pasca panen Pala Organik	Desa Simau, Kec. Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara	Pala	Updating Data Untuk Inspeksi Internal di Lapangan secara Mandiri	19 Juni 2025	SNI 6729:2016 Sistem pertanian organik	Juli - Desember
32	Papua							
		Kelompok Wanita Tani Huruwaka	Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Prop Papua	Sagu	Sosialisasi SNI 3729:2023 Pati sagu	21 Oktober 2025	SNI 3729:2023 Pati sagu	Oktober s/d Desember
		Kelompok Wanita Tani Asmat	Kabupaten Asmat Prop Papua Selatan	Sagu	Sosialisasi SNI 3729:2023 Pati sagu	14-17 Juli 2025	SNI 3729:2023 Pati sagu	Agustus - Desember
		Kelompok Wanita Tani Mimika	Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika Prop Papua Tengah	Sagu	Sosialisasi SNI 3729:2023 Pati sagu	2-4 November 2025	SNI 3729:2023 Pati sagu	Agustus s/d Desember
33	Papua Barat							
		Koperasi Pemasaran AMIN (Anak Milenial Inspiratif Negeri)	Desa Duguhani, Distrik Sururey, Kabupaten Pegunungan Arfak	Biji Kopi	1. Pengenalan SNI dan HACCP 2. Pendampingan Penyusunan SOP Pasca Panen Biji Kopi	28 Oktober 2025	SNI 01-2907-2008 Biji kopi	September s/d Desember 2025
34	BRMP Penerapan							
		Koperasi Produksi Petani Berkah Sejahtera	Desa Sungai Pangkalan I, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat	Padi dan kelapa sawit	Peningkatan kapasitas perkoperasian dan Manajemen kelembagaan Ekonomi Kawasan pertanian kepada Pengurus anggota dan penyuluh pendamping.	Desember 2025	Pengembangan pemasaran berbasis digital.	Desember 2025

No	Satker BRMP	Nama Usaha Tani	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Komoditas	Jenis Pelatihan Yang Diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan/ Pendampingan	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Waktu Pelaksanaan Penerapan Standar
		Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Karuna Marioriawa Bengkel Alat dan Mesin Pertanian	Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan	Padi	Peningkatan kapasitas perkoperasian dan Manajemen kelembagaan Ekonomi Kawasan pertanian serta Teknik Perbengkelan Alsintan kepada Pengurus anggota dan penyuluh pendamping.	17-18 Desember 2025	Pengembangan pemasaran berbasis digital.	Desember 2025
		Koperasi Bolaromang Sejahtera Bersama	Desa Bolamorang, Kecamatan Tombolo, Pao, Kabupaten Gowa	Penggemukan sapi potong dan perbanyakan benih kentang	Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pakan Ternak Alternatif	Agustus - Desember 2025		Desember 2025

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 12, pada tahun 2025 pelaku usaha yang telah menerapkan standar pertanian sebanyak 81 pelaku usaha tani dari target yang ditetapkan sebanyak 34 usaha tani dengan asumsi masing- masing BRMP Propinsi memiliki 1 lembaga. Capaian yang jauh melebihi target didukung oleh adanya kegiatan pendampingan yang tidak hanya berasal dari kegiatan pendampingan lembaga penerap standar, namun juga berasal dari kegiatan perbenihan, ICARE dan pendampingan program strategis.

Pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian adalah individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi pertanian dengan mengikuti pedoman dan standar tertentu guna menjamin mutu hasil pertanian, keamanan pangan, kelestarian lingkungan, serta keberlanjutan usaha. Pelaku usaha tani dimaksud meliputi Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, perusahaan perorangan, produsen benih, brigade pangan dan koperasi.

Standar pertanian yang diterapkan antara lain adalah ; SNI 01-4306-1996 Keripik ubi jalar, SNI 6128:2020 Beras, SNI 2323:2008/Amandemen 1:2010 Biji kakao-AMANDEMEN 1, SNI 8964:2021 Kopi sangrai dan kopi bubuk, SNI 01-4317-1996 Nata dalam kemasan, SNI 8969:2021 - Indonesian Good Agricultural Practices (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik, SNI 6233:2015 Benih padi inbrida, SNI 7331:2021 Ketentuan gudang komoditas pertanian, GAP Budidaya Padi Sawah/PTT Padi Sawah, Kepmentan Nomor 966 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, SNI-01-2007-2008 biji kopi, SNI 3743:2021 Gula palma, SNI 01-4315-1996 Keripik pisang, SNI 6729-2016 Sistem pertanian organik, SNI 9227:2023 Produksi umbi kentang kelas benih sebar (G2), SNI 8405-1: 2017 Kuri Ayam KUB 1, SNI 9283:2023 Benih jagung Hibrida, SNI 8405-2:2023 Bibit ayam umur sehari/KURI, SNI 8185-2015 Mesin panen padi kombinasi (Paddy combine harvester), SNI 8185:2019/AMD1:2024 Combine harvester, SNI 7763:2024 Pupuk organik padat, SNI 9316:2024 Benih setek rumput gajah, SNI 8904:2020 Minyak goreng kelapa, SNI 9001:2015 Sistem manajemen mutu, SNI 3741:2013 Minyak goreng, dan SNI 3729:2023 Pati sagu.

Sebagian besar komoditas yang dikembangkan dalam penerapan standar adalah komoditas padi. Beberapa komoditas selain padi yaitu janeng (gadung), beras, kakao, cabai, sapi potong, kelapa, pupuk, gula aren semut, kentang, kopi, domba, pisang, manggis organik, mangga, jagung, ayam kampung, vanili organik, jeruk, cabai, pupuk organik padat, pala, sagu, dan kelapa sawit.

Permasalahan yang dihadapi usaha tani dalam menerapkan standar diantaranya adalah :

1. Rendahnya pemahaman terhadap standar GAP. Kondisi saat ini masih banyak pelaku usaha tani yang belum memahami prinsip, manfaat dan tahapan penerapan GAP secara menyeluruh. Dalam rangka mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, dapat dilakukan beberapa langkah

tindak lanjut diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis petani dan penyuluhan

2. Intensitas penyuluhan dan bimbingan teknis terkait GAP masih terbatas, sehingga penerapan di lapangan belum optimal. Dalam kegiatan usaha tani termasuk penerapan standar diperlukan pencatatan kegiatan budidaya, namun sebagian besar petani belum terbiasa melakukan administrasi usaha tani. Dalam rangka mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, dapat dilakukan beberapa langkah tindak lanjut diantaranya melalui monitoring dan evaluasi, menyusun sistem pencatatan yang sederhana sehingga mudah dipahami serta mendorong penerapan standar secara berkelompok melalui kelompok tani dan koperasi untuk peningkatan daya saing.

Sasaran 2

Meningkatnya Adopsi Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif

Sasaran indikator dimaksud adalah jumlah adopsi teknologi modernisasi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan di lingkup Balai Besar Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian melalui kegiatan perekayasaan dan perakitan. Sasaran indikator ini mendukung capaian Indikator

Kinerja Sasaran Program Persentase Pelaku Usaha Pertanian yang Memanfaatkan Teknologi Digital, *Smart Framing*, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (%) dan Sasaran Program Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Indikator Kinerja 2:

Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif (%)

Peningkatan ketersediaan teknologi modernisasi pertanian yang adaptif yang dimaksud adalah jumlah adopsi teknologi pertanian adaptif pada tahun berjalan di lingkup Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian**.** Jumlah adopsi diperoleh dari jumlah adopsi teknologi pertanian yang adaptif dibagi dengan total target teknologi pertanian yang adaptif yang diadopsi selama 5 tahun.

Pada Tahun 2025 indikator dimaksud belum dilaksanakan karena belum tersedianya anggaran untuk perhitungan persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif, namun mulai Tahun 2026

indikator tersebut mulai dihitung. Permasalahan dan tindaklanjut belum dapat dilakukan karena pada tahun 2025 tidak dilaksanakan kegiatan ini.

Sasaran 3

Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian adalah tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur melalui pemenuhan komponen pengungkit dan hasil, yang mencerminkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas dari korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil penilaian Tim Penilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BRMP. Tujuan dari penerapan Zona Integritas untuk mewujudkan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian yang berintegritas dan profesional melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Indikator Kinerja 3:

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)

Pembangunan ZI dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan ZI menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka pembangunan ZI harus dilaksanakan di seluruh instansi pemerintah.

Dasar hukum Zona Integritas berdasarkan Permenpan RB No. 10/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Evaluasi diperlukan bagi Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) internal Kementan maupun nasional. Adapun unit kerja yang belum pernah mendapat predikat ZI-WBK/WBBM akan dilakukan penilaian mandiri (*Self Assessment*) oleh tim *assessor* yang merupakan Tim Penilai Internal BRMP yang telah disahkan oleh Kepala BRMP. Hasil evaluasi dan penilaian mandiri tersebut akan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilaian Intern (TPI) Kementan untuk dilakukan *Quality Assurance*. Hasil penilaian disahkan oleh Kepala BRMP melalui Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi

Pertanian Nomor 1550/Kpts/PW.410/12/2025 tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025.

Penilaian Zona Intergritas BBPPMP dilakukan oleh Pusat Perakitan dan Modernisasi BRMP Tanaman Pangan sebagai tim *assessor* dengan nilai sebesar 86,09. Nilai capaian kinerja indikator nilai pembangunan zona integritas dapat dilihat pada Tabel 13. Hasil Penilaian Zona Integritas BBPPMP oleh Tim *Assessor* dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Nilai	85,53	86,09	100,65

Tabel 14. Hasil Penilaian Zona Integritas Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian oleh Tim *Assessor*

	Area Perubahan	Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
A	**PENGUNGKIT**	**60,00**					
1	Manajemen Perubahan	8,00	3,37	3,42	6,79	84,86	OK
2	Penataan Tata Laksana	7,00	2,88	2,17	5,04	72,00	OK
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	10,00	4,51	3,95	8,46	84,56	OK
4	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,01	4,60	8,61	86,10	OK
5	Penguatan Pengawasan	15,00	5,53	6,88	12,40	82,89	OK
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,40	4,97	9,37	93,68	OK
	TOTAL PENGUNGKIT				**50,67**	**84,84**	**OK**
B	**HASIL**	**40,00**					
I	**BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL**	**22,50**			**19,85**	**88,22**	**OK**
a.	Nilai survey persepsi korupsi (survei eksternal: Indeks persepsi anti korupsi/IPAK)	17,50			16,10	92,00	OK
b.	Capaian kinerja lebih baik daripada capaian kinerja sebelumnya	5,00			3,75	75,00	OK
II	**PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA**	**17,50**			**15,58**	**89,00**	
	Nilai persepsi kualitas pelayanan (Survei Ekternal Indeks Persepsi Kualitas Pelayanann Publik/IPKP)	17,50			15,58	89,00	OK
	TOTAL HASIL				**35,43**	**85,56**	
	NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				**86,09**		

Berdasarkan hasil penilaian ZI, BBPPMP telah mencapai hasil sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu sebesar 86,09 dari target yang ditetapkan sebesar 85,53 dengan nilai capaian 100,65%.

Penilaian Zona Integritas di seluruh BRMP Propinsi dapat mencapai nilai ZI sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian nilai ZI pada masing-masing BRMP Propinsi dapat dilihat pada Tabel 15.

Permasalahan yang dihadapi dalam penilaian ZI antara lain dinamika lembaga dari BBPSIP menjadi BBPPMP mengakibatkan perubahan beberapa dokumen seperti Renstra, PK, Renja dan DIPA. Dalam rangka mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, dapat dilakukan dengan segera mempersiapkan draft dokumen perubahan sehingga dapat mempersingkat waktu dari terbitnya Permentan 10 tahun 2025.

Tabel 15. Capaian Nilai Zona Integritas Lingkup BBPPMP Tahun 2025

No	Satker BRMP Propinsi	Nilai ZI		
		Target	Realisasi	Persentase
1	BPMP Aceh	82,94	83,52	100,70
2	BPMP Sumatera Utara	87,16	88,19	101,18
3	BPMP Sumatera Barat	82,19	83,78	101,93
4	BPMP Riau	85	85,53	100,62
5	BPMP Jambi	85	86,28	101,51
6	BPMP Bangka Belitung	87,79	87,86	100,08
7	BPMP Sumatera Selatan	88,65	88,76	100,12
8	BPMP Lampung	82,11	84,49	102,90
9	BPMP Bengkulu	85	88,81	104,48
10	BPMP Banten	88,27	88,51	100,27
11	BPMP DKI Jakarta	85,56	87,68	102,48
12	BPMP Jawa Barat	83,04	83,44	100,48
13	BPMP Jawa Tengah	81	82,50	101,85
14	BPMP DI Yogyakarta	83,88	84,91	101,23
15	BPMP Jawa Timur	82,74	83,48	100,89
16	BPMP Bali	84	84,1	100,12
17	BPMP NTB	88,24	89,38	101,29
18	BPMP NTT	82	82,15	100,18
19	BPMP Kalimantan Barat	83	84,17	101,41
20	BPMP Kalimantan Tengah	82	82,07	100,09
21	BPMP Kalimantan Selatan	82	84,3	102,80
22	BPMP Kalimantan Timur	85,1	85,59	100,58
23	BPMP Sulawesi Utara	80,04	81,76	102,15
24	BPMP Gorontalo	86	88,55	102,97
25	BPMP Sulawesi Tengah	87,01	87,24	100,26

No	Satker BRMP Propinsi	Nilai ZI		
		Target	Realisasi	Persentase
26	BPMP Sulawesi Selatan	80,02	83,14	103,90
27	BPMP Sulawesi Tenggara	83	84,47	101,77
28	BPMP Maluku	84,74	86,1	101,60
29	BPMP Papua	86,54	86,56	100,02
30	BPMP Maluku Utara	85,77	86,04	100,31
31	BPMP Papua Barat	85,00	85,64	100,75
32	BPMP Sulawesi Barat	84,61	85,47	101,02
33	BPMP Kepulauan Riau	79,53	80,99	101,84

Sasaran 4

Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART DJA.

Indikator Kinerja 4:

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)

IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja pemerintah, khususnya terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Secara sederhana, IKPA menunjukkan seberapa baik anggaran dikelola, bukan hanya seberapa besar anggaran terserap, tetapi juga ketepatan, kepatuhan, dan akuntabilitasnya.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)	Nilai	90,15	90,25	100,11

Penetapan target IKPA BBPPMP sebesar 90,15 pada Tahun 2025 mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas pengelolaan anggaran satuan kerja, khususnya: a. Tingginya proporsi belanja kontraktual dan kegiatan berskala nasional, b. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan penyesuaian jadwal, perubahan kebijakan, serta dinamika pelaksanaan program prioritas, dan c. Antisipasi risiko keterlambatan realisasi dan penyesuaian dokumen pelaksanaan anggaran. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, target ditetapkan realistis dan achievable, tanpa mengurangi komitmen peningkatan kualitas pengelolaan anggaran. Target IKPA BBPPMP tahun 2024 sebesar 90 sehingga target IKPA Tahun 2025 sudah mengalami peningkatan 0,15 dibandingkan tahun 2024.

Nilai IKPA BBPPMP hingga tanggal 23 Januari 2025 sesuai pada Tabel 16 mencapai 90,25 dari target 90,15 diperoleh persentase capaian kinerja 100,11% memperoleh kategori BAIK, dengan rincian sebagai berikut:

1) Nilai kualitas perencanaan anggaran sebesar 80,34 (revisi DIPA 100, deviasi halaman III DIPA 60,68);
2) Nilai kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 88,44 (penyerapan anggaran 91,01, belanja kontraktual 100, penyelesaian tagihan 100, dan pengelolaan UP dan TUP 89,44) ; dan
3) Nilai kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100 (capaian output 100) yang dapat dilihat pada Gambar 1.

Capaian IKPA lingkup BBPPMP secara keseluruhan dapat tercapai sesuai dengan target yang ada di dalam PK Tahun 2025 masing-masing BRMP Provinsi. Secara rinci capaian IKPA masing-masing BRMP Provinsi dapat dilihat pada Tabel 17. Berdasarkan data Tabel 17 diketahui bahwa dari 34 satker terdapat 16 satker yang meraih kategori SANGAT BAIK (47,06%), dan 18 satker kategori BAIK (52,94%). Capaian nilai IKPA diperoleh dari Aplikasi Online SMART DJA dengan tanggal cut off 23 Januari 2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	023	018	648673	BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN	Nilai	100.00	60.68	91.01	100.00	100.00	89.44	100.00	91.25	100%	1.00	90.25
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.10	18.20	10.00	10.00	8.94	25.00				
					Nilai Aspek	80.34		95.11				100.00				

Gambar 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPMP Tahun 2025

Tabel 17. Capaian Nilai IKPA lingkup BBPPMP Tahun 2025

No	Satker	Nilai IKPA	%	Persentase Capaian	Kategori
		Target	Realisasi		
1	BPMP Gorontalo	95,02	100	105,24	Sangat Baik
2	BPMP Jakarta	96,03	100	104,13	Sangat Baik
3	BPMP DI Yogyakarta	91,55	98,72	107,83	Sangat Baik
4	BPMP Papua	92,7	98,55	106,31	Sangat Baik
5	BPMP Jambi	95	98,29	103,46	Sangat Baik
6	BPMP NTT	94,54	98,16	103,83	Sangat Baik
7	BPMP Riau	91	97,74	107,41	Sangat Baik
8	BPMP Sumatera Utara	93,29	97,15	104,14	Sangat Baik
9	BPMP Bangka Belitung	91,01	96,86	106,43	Sangat Baik
10	BPMP Kepulauan Riau	91	96,27	105,79	Sangat Baik
11	BPMP Kalimantan Timur	92,24	96,18	104,27	Sangat Baik
12	BPMP NTB	91	95,58	105,03	Sangat Baik
13	BPMP Bengkulu	94,85	95,32	100,5	Sangat Baik
14	BPMP Aceh	93,92	95,26	101,43	Sangat Baik
15	BPMP Banten	91	95,1	104,51	Sangat Baik
16	BPMP Maluku	93,33	95,09	101,89	Sangat Baik
17	BPMP Jawa Tengah	91	94,95	104,34	Baik
18	BPMP Sulawesi Selatan	91	94,89	104,27	Baik
19	BPMP Maluku Utara	93,49	94,5	101,08	Baik
20	BPMP Jawa Barat	91	94,3	103,63	Baik
21	BPMP Bali	91	94,22	103,54	Baik
22	BPMP Lampung	91	93,82	103,1	Baik
23	BPMP Jawa Timur	91	93,69	102,96	Baik
24	BPMP Sumatera Selatan	91	93,63	102,89	Baik
25	BPMP Sultra	91	93,51	102,76	Baik
26	BPMP Sumatera Barat	91	92,89	102,08	Baik
27	BPMP Kalsel	91	92,78	101,96	Baik
28	BRMP Sulawesi Barat	91	92,56	101,71	Baik
29	BPMP Papua Barat	91	91,78	100,86	Baik
30	BPMP Sulawesi Utara	90,15	90,27	100,13	Baik

No	Satker	Nilai IKPA		%	Persentase Capaian	Kategori
		Target		Realisasi		
31	BBPPMP	90,15		90,25	100,11	Baik
32	BPMP Sulawesi Tengah	90		90,02	100,22	Baik
33	BPMP Kalteng	89		89,5	100,56	Baik
34	BPMP Kalimantan Barat	89		89,49	100,55	Baik

Permasalahan yang dihadapi dalam penilaian IKPA antara lain:

1. Blokir anggaran yang menghambat pelaksanaan kegiatan, meningkatkan devisi halaman 3 DIPA, menghambat penyerapan anggaran, menghambat penyelesaian tagihan. Dalam rangka mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, dapat dilakukan dengan melakukan mitigasi resiko pelaksanaan kegiatan dan anggaran, mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian SPJ, serta mendetailkan pelaksanaan anggaran dan melakukan penyesuaian dengan penarikan anggaran,
2. Selain itu adanya kegiatan I care dengan proses pengadaan yang berbeda antara leander dengan Pemerintah Indonesia mengakibatkan terhambatnya penyelesaian kontraktual. Dalam mengatasi kendala tersebut di lakukan koordinasi intens dengan leander dan pelaksanaan pengadaan dengan segera.

3.1.2. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Pengukuran perbandingan capaian indikator kinerja kurun waktu 2024 dan 2025 berdasarkan pada indikator kinerja yang terdapat pada PK Tahun 2024 dan 2025. Perbandingan ini disesuaikan dengan PK yang yang berlaku sejak terbentuknya BBPPMP. Secara rinci perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 18. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian indikator tahun 2025 menurun sedikit dibandingkan tahun 2024 yakni dari 106,54% menjadi 106,13%. Untuk capaian pada indikator kegiatan strategis pada tahun 2024 yakni jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dan jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan tidak dapat dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2025 karena berbeda indikator yaitu persentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian.

Penurunan capaian disebabkan karena persentase capaian ZI dan IKPA tahun 2024 lebih besar dibandingkan 2025 yakni ZI: 104,30%; 100,65% dan IKPA: 105,82%; 100,11%. Hal ini disebabkan adanya dinamika kelembagaan dari BBPSIP menjadi BBPPMP dan kegiatan ICARE dengan anggaran besar tidak bisa terserap dengan waktu pelaksanaan kegiatan dengan hanya beberapa bulan saja yaitu pada triwulan IV, karena buka blokir anggaran perjalanan menjelang akhir tahun serta adanya perbedaan proses pengadaan antara leander dengan Pemerintah Indonesia. Walaupun untuk indikator Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian capaian nilai kinerja tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan karena pengumpulan eviden pada tahun 2025 lebih baik dari tahun 2024, namun demikian persentase capaian 2025 dibandingkan 2024 lebih kecil karena BBPPMP baru bertransformasi dari BBPSIP menjadi BBPPMP sehingga beberapa eviden belum terpenuhi terutama Renstra. Untuk kegiatan capaian indikator persentase Persentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian sebenarnya bisa tercapai dengan nilai tinggi

namun berdasarkan Permentan 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi yang menjelaskan bahwa capaian kinerja output maksimal 120%. Dengan demikian, tahun 2025 capaian output disesuaikan agar tidak melebihi 120%. Sehingga capaian yang tinggi pada satu indikator tetap tidak dapat mendongkrak peningkatan capaian yang lebih tinggi dari tahun 2024.

Tabel 18. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 - 2025

No	Indikator Kinerja		Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	Target	34	-
		Realisasi	40	-
		%	117,65	-
2.	Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (Lembaga)	Target	34	-
		Realisasi	36	-
		%	105,88	-
3.	Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	Target	832	-
		Realisasi	824,16	-
		%	99,06	-
4.	Persentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian	Target	-	14,29
		Realisasi	-	34,03
		%	-	117,63
5.	Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	Target	-	-
		Realisasi	-	-
		%	-	-
6.	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penerapan dan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	Target	82	85,53
		Realisasi	85,53	86,09
		%	104,30	100,65
7.	Nilai kinerja anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Target	-	
		Realisasi	-	
		%	-	
8.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	Target	90	90,15
		Realisasi	95,24	90,25
		%	105,82	100,11
	Capaian Rata-rata		**106,54**	**106,13**

3.1.3. Perbandingan Kinerja Antar Tahun (2023–2025)

Pengukuran perbandingan capaian indikator kinerja pada kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja masing-masing tahun. Dalam periode tersebut, terjadi dinamika perubahan kelembagaan yang cukup signifikan, yaitu perubahan dari Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) menjadi Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) pada Tahun 2023, serta selanjutnya bertransformasi menjadi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP) pada Tahun 2025 sebagai bagian dari pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi

Pertanian (BRMP). Perubahan kelembagaan tersebut berdampak pada penyesuaian Renstra dan indikator kinerja yang digunakan. Capaian kinerja anggaran pada periode sebelum transformasi kelembagaan menunjukkan hasil yang relatif baik namun bersifat fluktuatif selama 3 tahun terakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja yang dapat dibandingkan secara konsisten antar tahun pada periode 2023–2025 hanya terbatas pada dua indikator, yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dan indikator kinerja anggaran, yang dalam perjalanannya mengalami perubahan nomenklatur dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Perbandingan capaian kedua indikator tersebut disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 – 2025

Indikator Kinerja	**Tahun 2023**		**%**	**Tahun 2024**		**%**	**Tahun 2025**		**%**
	T	**R**		**T**	**R**		**T**	**R**	
Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai BBP2TP/BBPSIP /BPPPMP (Nilai)	81	85,35	105,37	82	85,53	104,30	85,53	86,09	100,65
Nilai kinerja anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	91,5	92,57	101,17	91,5	92,57	-	-	-	-
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai BBPSIP/BBPPMP (Nilai)	-	-		90	95,24	105,82	90,15	90,25	100,11

a. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM

Capaian pembangunan Zona Integritas menunjukkan dinamika yang sejalan dengan perubahan organisasi. Pada Tahun 2023, setelah terbentuk sebagai organisasi baru BBPSIP, capaian Nilai Pembangunan ZI tercatat sebesar 85,35 dari target 81,00 atau sebesar 105,37%. Pada Tahun 2024, capaian Nilai Pembangunan ZI BBPSIP mengalami peningkatan menjadi 85,53 dari target

82,00 atau sebesar 104,30%. Peningkatan realisasi nilai ZI ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola, penguatan sistem pengendalian internal, serta konsistensi dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. Walaupun secara persentase bila dibandingkan dengan target maka tahun 2023 lebih tinggi daripada tahun 2024.

Selanjutnya pada Tahun 2025, setelah bertransformasi menjadi BBPPMP, capaian Nilai Pembangunan ZI kembali meningkat secara signifikan dengan nilai sebesar 86,09 dari target 85,53 atau mencapai 100,65%. Capaian tersebut mengantarkan BBPPMP memperoleh predikat lulus Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yang mencerminkan keberhasilan organisasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik, meskipun berada dalam fase awal pelaksanaan tugas sebagai lembaga hasil transformasi.

b. Nilai Kinerja Anggaran / Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pada Tahun 2023 berbeda dengan tahun 2024 untuk indikator anggaran, pada tahun 2024 terjadi perubahan indikator dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sesuai dengan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-1477/OT.240/A.1/08/2024 tentang Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi dan Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian. Pada tahun tersebut, capaian IKPA BBPSIP mencapai 95,24 dari target 90,00 atau sebesar 105,82%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan akuntabel.

Selanjutnya pada Tahun 2025, seiring perubahan organisasi menjadi BBPPMP, indikator IKPA tetap digunakan dengan target sebesar 90,15. Capaian IKPA Tahun 2025 tercatat sebesar 90,25 atau 100,11% dari target. Capaian tersebut masih berada pada kategori baik dan mencerminkan adanya proses penyesuaian internal organisasi dalam masa transisi kelembagaan, khususnya terkait penataan sistem kerja, penyesuaian struktur organisasi, serta pengelolaan anggaran pada tahun pertama operasional BBPPMP.

c. Kesimpulan Perbandingan Antar Tahun

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja Tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan kelembagaan dan penyesuaian indikator kinerja, BBPPMP mampu menjaga kesinambungan kinerja organisasi. Capaian indikator kinerja utama, khususnya pembangunan Zona Integritas dan pengelolaan anggaran, menunjukkan tren positif dan mencerminkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap dinamika perubahan kelembagaan, sekaligus mempertahankan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan tata kelola yang baik.

3.1.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Target Renstra Revisi Tahun 2025– 2029

Pengukuran capaian Renstra Tahun 2025-2029 dilihat dengan cara membandingkan realisasi tahun 2025 dengan target Renstra tahun 2025. Indikator yang dijadikan perbandingan yaitu indikator yang terdapat pada Renstra Revisi Tahun 2025-2029.

Pengukuran capaian dihitung pada indikator Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian, nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian sesuai dengan capaian tahun 2025 dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2025.

Target BBPPMP pada tahun 2025 untuk indikator Persentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian dengan nilai yang lebih tinggi di target Perjanjian Kinerja yaitu 14,29 % sedangkan target Renstra sebesar 4,67%, karena BBPPMP mendapat alokasi kegiatan ICARE, perbenihan dan pendampingan program strategis yang memiliki potensi besar yang bisa memfasilitasi pencapaian output terhadap peningkatan jumlah pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian.

Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya Adopsi Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif dengan indikator Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif tahun 2025 ini belum memiliki target baik di Renstra maupun PK, hal ini disebabkan kegiatan BRMP yang berbasis modernisasi pertanian yang adaptif yang baru dimulai tahun ini, dimana proses adopsi terdiri dari beberapa tahapan sehingga untuk mencapai tingkat adopsi maka masih membutuhkan waktu.

Secara rinci pengukuran nilai capaian Tahun 2025 dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 20. Berdasarkan tabel 20, capaian tahun 2025 dibandingkan dengan target 2025 pada Renstra Revisi Tahun 2025-2029 BBPPMP untuk semua telah dapat tercapai.

Tabel 20. Capaian Kinerja BBPPMP Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2025-2029

Indikator	**Target Perjanjian Kinerja 2025**	**Target Renstra 2025-2029**					**Realisasi Tahun 2025**	**Persentase Capaian Tahun 2025 Dibandingkan Target Renstra Tahun 2025**
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**		**%**
Persentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian	14,29	4,67	15,89	15,89	31,78	31,78	34,03	117,63
Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	-	-	20	20	20	20		
Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)	85,53	85,53	86,09	86,20	86,25	86,30	86,09	100,65
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)	90,15	90,15	91,5	92,0	92,5	93,0	90,25	100,11
		Rata-Rata persentase capaian Tahun 2025 dibanding target tahun 2025						106,13

3.1.5. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi Keberhasilan

Secara rata-rata persentase capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa BBPPMP telah dapat mencapai dan melampaui target Renstra pada indikator strategis, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek pengelolaan dan pelaksanaan anggaran agar kinerja ke depan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2025 didukung oleh: 1) Kecepatan, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan tersedia tepat waktu; 2) Penanggung jawab dan anggota pelaksana kegiatan secara reguler dan intensif bertemu untuk mengevaluasi capaian dan kendala teknis untuk diantisipasi; 3) Sistem monitoring yang dilaksanakan secara berkala dan intensif oleh BBPPMP untuk menjamin capaian output sesuai target dan terkendalinya hambatan yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target; 4) Input substansi teknis dari narasumber yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan pada waktu pengawalan atau pendampingan; 5) Kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia (tenaga fungsional dan tenaga administrasi); serta 6) Sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Kendala

Permasalahan dalam pencapaian kinerja BBPPMP tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan akibat dinamika penganggaran, khususnya kegiatan dengan alokasi anggaran besar yang baru dapat dilaksanakan pada triwulan IV setelah buka blokir anggaran, sehingga waktu pelaksanaan menjadi sangat terbatas;
2. Dinamika perubahan Lembaga dari BBPSIP menjadi BBPPMP;
3. Kurangnya pemahaman pelaku usaha tani dalam pelaksanaan penerapan standar pertanian.

Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan dalam pencapaian output kinerja maka perlu dilakukan beberapa hal antara lain:

1. Ketersediaan dokumen perencanaan yang tepat waktu dan memadai, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat segera dilakukan setelah penganggaran tersedia;
2. Koordinasi yang intensif antara penanggung jawab kegiatan dan tim pelaksana, melalui pertemuan rutin untuk mengevaluasi progres capaian serta mengidentifikasi kendala teknis sejak dini;

3. Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala dan berjenjang, yang memungkinkan pengendalian pelaksanaan kegiatan serta penyesuaian strategi untuk memastikan capaian output sesuai target;
4. Sinergi dan kesiapan sumber daya manusia, baik tenaga fungsional maupun tenaga administrasi, dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja;
5. Mempersiapkan draft dokumen Renstra, PK, Renja dan DIPA yang sesuai dengan lembaga baru; serta
6. Melakukan pelatihan, bimbingan teknis, meningkatkan intensitas pendampingan pada usaha tani, serta mendorong penerapan standar secara berkelompok melalui kelompok tani, koperasi untuk peningkatan daya saing.

3.1.6. Capaian Kinerja BBPPMP Lainnya

1. Capaian Perbenihan Padi BBPPMP Dalam Mendukung Swasembada Pangan

Kegiatan perbenihan merupakan salah satu program strategis dalam mendukung peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan nasional. Kegiatan perbanyakan benih tanaman pangan tahun Anggaran 2025 lingkup BBPPMP meliputi komoditas padi dengan total target sebesar 1.967 ton dan total anggaran sebesar Rp32.163.640.000, pagu blokir Rp58.423.000, dan pagu efektif Rp32.105.217.000. Realisasi perbanyakan benih mencapai 2.039,12 ton atau sebesar 103,67 % dari target capaian sebesar 1.967 ton dengan realisasi anggaran sebesar Rp31.794.891.690 atau sebesar 98,85% dari pagu total dan 99,03% dari pagu efektif. Secara rinci lokasi, target produksi serta realisasi masing-masing komoditas benih padi pada Tabel 21.

Tabel 21. Data Monitoring Produksi Benih Padi Sertifikasi Lingkup BBPPMP

No	Satker	Produksi Benih Padi					Anggaran (Rp. 000)	Realisasi Anggaran (Rp000)	%
		Target	Produksi sampai 31 Desember 2025	Calon Benih Terser tifikasi (Ton)	Total Per Satker (ton)	%			
	Total	**1.967**	**1.478,49**	**560,63**	**2.039,12**	**103,67**	**32.163.640**	**31.794.035**	**98.85**
1	BBPPMP	50	58,65		58,65	117,30	1.026.300	1.025.468	99,91
2	Aceh	100	100,80		100,8	100,80	1.552.600	1.538.841	99.11
3	Sumut	100	110,01		110,01	110,01	1.552.600	1.551.287	99.92
4	Riau	70	74,75		74,75	106,79	1.086.820	1.086.585	99.98
5	Jambi	80	63,24	16,76	80	100	1.242.080	1.239.556	99.80
6	Babel	20	20,89		20,89	104,45	310.520	309.938	99.81
7	Sumsel	150	120,40	29,60	150	100	2.328.900	2.310.814	99.22
8	Lampung	120	14,58	116,05	130,63	108,86	1.863.120	1.859.298	99.79
9	Bengkulu	30	2,75	27,25	30	100	465.780	452.544	97.16
10	Banten	50	60,84		60,84	121,68	896.300	895.648	99.93
11	Jawa Barat	137	140,95		140,95	102,88	2.346.435	2.346.008	99.98
12	Jawa Tengah	136	150		150	110,29	2.324.980	2.122.256	91.28
13	Jawa Timur	136	56,98	82,5	139,48	102,56	2.324.980	2.316.883	99.65
14	NTB	126	76,73	63,57	140,30	111,35	2.169.720	2.122.446	97.82

No	Satker	Produksi Benih Padi					Anggaran (Rp. 000)	Realisasi Anggaran (Rp000)	%
		Target	Produksi sampai 31 Desember 2025	Calon Benih Terser tifikasi (Ton)	Total Per Satker (ton)	%			
15	NTT	50	29,38	3,48	32,86	65,72	776.300	759.442	97.83
16	Kalbar	110	36,26	71,25	110,01	100,01	1.707.860	1.706.452	99.92
17	Kalteng	100	37,28	62,72	100	100	1.552.600	1.533.729	98.78
18	Kalsel	100	111,45		111,45	101,32	1.707.860	1.707.716	99.99
19	Kaltim	60	37,50	23	60,5	100,83	931.560	923.271	99.11
20	Sulsel	100	62,55	37,45	100	100	1.552.600	1.542.961	99.38
21	Papua	77	55	27	82	106,49	1.567.425	1.566.812	99.96
22	Sulawesi Barat	55	55		55	100	876.300	876.080	99.97

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan produksi benih padi BRMP pada tahun berjalan telah menunjukkan efektivitas dari sisi pengelolaan anggaran dan pelaksanaan lapangan. Produksi bersertifikat Tahun 2025 hampir seluruh satker BRMP Provinsi dapat mencapai sesuai target, dengan capaian benih bersertifikat sebesar 2.039,12 ton (103,67%), dari target sebesar 1.967 Ton. Realisasi anggaran sebesar Rp31.794.035.000 dari target pagu efektif Rp32.163.640.000 (98,85%). Capaian tertinggi dicapai oleh BRMP Banten yatu sebesar 121,68% dari target 50 ton dapat mencapai 60,84 ton.

Keberhasilan ini didukung dengan adanya : 1) Koordinasi secara intensif dengan UPTD Perlindungan Tanaman Hortikultura dan Tanaman Pangan Provinsi Banten terkait dengan pemetaan serangan hama dan penyakit, 2) Tim Perbenihan menyusun upaya mitigasi dan perlindungan terhadap Organisme Penggangu Tanaman (OPT) berdasarkan prediksi serangan yang diperoleh dari UPTD Perlindungan Tanaman Hortikultura dan Tanaman Pangan Provinsi Banten, 3) Koordinasi dengan Pengawas Benih Tanaman (PBT) UPTD PSBTPHP Provinsi Banten dalam penetapan lokasi dan petani kooperator yang memiliki riwayat kinerja penangkaran benih yang baik serta lokasi pertanaman yang optimal, 4) Penggalian informasi dari penyuluh dan petani kooperator terkait dengan informasi serangan hama dan penyakit di lokasi produksi dan sistem budidaya produksi yang sebelumnya diterapkan di lokasi, 5) Pelaksanaan budidaya produksi benih sumber padi dilaksanakan sesuai SOP Perbenihan yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama dan 6) Pengawasan berkala bersama PBT, POPT, dan Penyuluh selama proses produksi benih.

BRMP Propinsi yang tidak dapat mencapai produksi sesuai dengan yang ditargetkan hanya BRMP NTT. Capaian produksi benih padi bersertifikat hanya sebesar 32,86 ton dari target 50 ton (65,72%). Belum tercapainya produksi sesuai dengan target yang ditetapkan disebabkan karena: 1) Secara prosedural perbenihan, sudah mengikuti ketentuan dan dikawal oleh Tim Pengawas Lapangan PBT NTT mulai dari persiapan lahan dan sampai pasca panen; 2) Faktor Utama yang sangat mempengaruhi adalah faktor cuaca karena pada saat panen dan prosesing pada bulan Mei-Juni 2025, terjadi hujan terus menerus, kemudian faktor pendukung lantai jemur, sangat terbatas dan tidak layak karena penjemuran dilakukan diatas jalan aspal yang tidak rata dan mudah tergenang serta luasan sangat terbatas, 3) Ruang penyimpanan/Gudang juga belum memenuhi standar, karena sering terjadi kebocoran, sehingga air hujan masuk dalam gudang, 4) Proses pengujian benih di laboratorium PBT NTT, menggunakan pengujian biasa tanpa ada perlakuan tambahan berupa zat pematangan dormasi benih, sehingga hasil benih yang diuji tidak 100% lulus dan 5) Dengan adanya faktor pembatas seperti dijelaskan diatas, maka sesungguhnya benih tersebut dalam pengujian harus mendapat tambahan perlakuan khusus, seperti pematangan dormansi. Hal ini dilakukan di Balai Pengujian Benih di BRMP Sukamandi dengan sampel yang sama dan mendapatkan perlakuan

pematangan dormansi, dan hasilnya daya tumbuh 98% lulus dan tumbuh dengan baik. Benih yang tidak lulus uji saat ini sedang diuji ulang di Balai Pengujian Benih Sukamandi dengan hasil pengujian lulus. Laporan hasil pengujian dapat dilihat pada Lampiran 13.

Dari sisi pemanfaatan hasil, benih padi yang diproduksi direncanakan untuk dimanfaatkan baik melalui penjualan sebagai PNBP dan melalui kegiatan diseminasi dan bantuan benih. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan produksi benih tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian output fisik program, tetapi juga mendukung penerimaan negara serta penyediaan benih unggul bagi petani.

2. Capaian Perbenihan Bawang Putih

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Pertanian untuk mempercepat peningkatan produksi komoditas pangan yang selama ini masih bergantung pada impor, bawang putih ditetapkan sebagai salah satu komoditas prioritas. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian melalui BRMP mengambil peran aktif dalam mendukung pencapaian swasembada bawang putih, khususnya melalui penyediaan benih sumber yang bermutu, berkelanjutan, dan sesuai standar perbenihan nasional.

Dalam konteks tersebut, BBPPMP melaksanakan kegiatan produksi benih sumber bawang putih sebagai bagian dari program produksi benih/bibit sumber tanaman hortikultura. Pada tahun berjalan, BBPPMP menetapkan target produksi benih sumber bawang putih sebesar 148 ton, yang dilaksanakan melalui beberapa satuan kerja pelaksana, yaitu Jawa Tengah dengan target 40 ton, Jawa Timur 8 ton, dan Nusa Tenggara Barat 100 ton. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp7.412.800.000.

Secara rinci lokasi, target produksi serta realisasi masing-masing komoditas Bawang putih termuat pada Tabel 22.

Tabel 22. Data Monitoring Produksi Benih Bawang Putih Sertifikasi Lingkup BBPPMP

No	Satker	Produksi Benih Bawang Putih				Realisasi		
		Target (Ton)	Produksi sampai dengan 31 Des 2025	Calon Benih Tersertifikasi (Ton)	%	Target (Rp000)	Realisasi (Rp000)	%
		148		**36**	**24,32**	**7.412.800**	**7.159.028**	**96,58**
1	Jawa Tengah	40	0	8	20	2.005.658	1,925,634	96.01
2	Jawa Timur	8	0	8	100	397.900	397,422	99.88
3	NTB	100	0	20	20	5.009.242	4,835,972	96.54

Sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2025 belum dapat tercapai produksi benih bawang putih tersertifikasi. Namun demikian terdapat calon benih tersertifikasi dengan total capaian 36 ton dari target 148 ton (24,32%). Panen dilaksanakan mulai Januari–Maret 2026, sedangkan proses sertifikasi benih diproyeksikan selesai pada Juni–Juli 2026. Hal ini dikarenakan anggaran perbenihan bawang putih baru tersedia di bulan September 2025 sehingga pelaksanaan perbenihan dilakukan di luar musim tanam serta panen yang akan dilakukan lewat tahun.

Di Provinsi Jawa Tengah, kegiatan produksi benih sumber bawang putih ditargetkan menghasilkan 40 ton benih. Pada tahun 2025, kegiatan ini tidak menganggarkan biaya panen, dan alokasi biaya sertifikasi benih sumber belum tersedia, kecuali untuk kegiatan pemeriksaan lapangan dan sertifikasi kompetensi. Pelaksanaan budidaya dilakukan pada musim hujan yang kurang optimal, sehingga menghadapi kendala berupa pertumbuhan gulma yang tinggi dan meningkatnya serangan penyakit. Meskipun demikian, melalui monitoring rutin, penyiangan intensif, dan pengendalian hama penyakit, kondisi pertanaman dilaporkan tumbuh optimal.

Di Provinsi Jawa Timur, targat produksi benih sumber bawang putih ditetapkan sebesar 8 ton. Sama halnya dengan Jawa Tengah, pada tahun 2025 tidak dialokasikan biaya panen. Pemeriksaan lapangan telah dilakukan pada fase vegetatif, sedangkan tahapan sertifikasi lanjutan direncanakan akan dibiayai pada tahun anggaran 2026. Kegiatan budidaya dilaksanakan di luar musim tanam (*off season*) dengan intensitas hujan yang tinggi, sehingga tanaman rentan terhadap serangan hama dan penyakit terutama jamur, serta pertumbuhan gulma yang cepat. Upaya mitigasi dilakukan melalui monitoring dan pemeliharaan tanaman secara lebih intensif, terutama aplikasi fungisida.

Pada kegiatan di NTB, biaya panen tahun 2025 telah dianggarkan dan panen awal telah dilaksanakan pada akhir Desember 2025. Namun, biaya sertifikasi benih pada tahun 2025 belum dialokasikan, sehingga proses sertifikasi baru dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya. Pelaksanaan kegiatan di NTB juga menghadapi kendala *off season* dan intensitas hujan yang tinggi, yang berdampak pada pertumbuhan gulma, frekuensi aplikasi pestisida, serta lamanya proses pengeringan calon benih. Melalui penguatan monitoring drainase, penyiangan intensif, dan pengendalian OPT, kondisi pertanaman tetap dapat dijaga optimal.

Secara keseluruhan, tingginya realisasi anggaran yang belum sepenuhnya diikuti oleh capaian fisik disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu belum dilaksanakannya panen di sebagian lokasi, kegiatan sertifikasi yang belum atau baru sebagian dialokasikan, serta pengaruh musim tanam yang tidak optimal (*off season*). Terhambatnya capaian target benih di tahun 2025 akibat penganggaran kegiatan baru teralokasi di bulan September sehingga pelaksanaan baru dilaksanakan pada bulan Oktober.

3. Capaian BBPPMP Sebagai PPID Informatif Terbaik Ke-5 Kementan

BBPPMP meraih peringkat ke-5 kategori Eselon II dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian seperti dapat dilihat pada Gambar 2. Capaian ini menjadi wujud komitmen BBPPMP dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk evaluasi dan apresiasi terhadap unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian yang dinilai konsisten dalam menyelenggarakan layanan informasi publik sesuai dengan prinsip keterbukaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian dilakukan terhadap berbagai aspek, mulai dari ketersediaan informasi, kualitas layanan PPID, hingga inovasi dan responsivitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung percepatan pelaksanaan program strategis pembangunan pertanian nasional.

Gambar 2. PPID Informatif Terbaik Peringkat ke 5 Kementan

Inovasi dalam layanan informasi, kecepatan respons terhadap permohonan informasi, serta peningkatan kualitas konten publikasi perlu terus diperkuat agar manfaat keterbukaan informasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Keberhasilan BBPPMP meraih peringkat ke-5 kategori Eselon II ini tidak terlepas dari kerja kolaboratif seluruh jajaran, mulai dari pimpinan, pengelola Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga tim kehumasan yang secara konsisten menjalankan tugas pelayanan informasi publik secara profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Melalui capaian ini, BBPPMP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya kerja yang transparan dan terbuka, sejalan dengan upaya Kementerian Pertanian dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern menuju Indonesia yang berdaulat pangan.

4. Capaian BBPPMP Sebagai Perpustakaan Terbaik ke-7 Kementan

Gambar 3. Capaian Perpustakaan Terbaik ke-7 lingkup Kementerian Pertanian

Perpustakaan BBPPMP secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan perpustakaan. Pada aspek pengembangan koleksi, kegiatan pengkatalogan, alih media koleksi dari bentuk cetak ke elektronik, serta pelestarian fisik koleksi melalui preservasi telah dilaksanakan untuk menjamin keteraturan, keberlanjutan, dan kemudahan akses terhadap bahan pustaka. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas koleksi sekaligus menyesuaikan layanan perpustakaan dengan perkembangan teknologi informasi.

Dalam bidang pelayanan informasi dan referensi, perpustakaan memberikan layanan peminjamanan atau sirkulasi, pemberian bahan pustaka, layanan bahan rujukan dan penelusuran literatur, serta pelaksanaan silang layan perpustakaan bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang. Selain itu, perpustakaan juga berperan aktif dalam pembinaan melalui bimbingan desain media informasi koleksi dan bimbingan digitalisasi koleksi perpustakaan bagi siswa Praktek Kerja Lapangan (PKL).

Pada aspek layanan keanggotaan dan promosi, perpustakaan BBPPMP secara berkelanjutan menerima pendaftaran anggota baru bagi pemustaka yang

memerlukan guna memperluas jangkauan pengguna layanan. Promosi perpustakaan dilakukan melalui pengelolaan konten website dan media sosial secara rutin setiap minggu sebagai sarana diseminasi informasi layanan dan kegiatan perpustakaan kepada masyarakat, khususnya melalui konten literasi "Markica (Mari Kita Membaca)". Upaya ini bertujuan meningkatkan minat baca, visibilitas perpustakaan, serta keterlibatan masyarakat terhadap layanan perpustakaan.

Sejalan dengan peningkatan kualitas layanan, pengembangan kompetensi pustakawan juga menjadi perhatian utama melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan pengembangan diri, antara lain Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan Tahun 2025, *knowledge sharing* berbasis SKKNI, penguatan sertifikasi kompetensi pustakawan, workshop editing, serta Forum Komunikasi Perpustakaan dan Literasi Pertanian (FKP). Berbagai upaya tersebut berkontribusi pada pencapaian penting perpustakaan, yaitu diraihnya Akreditasi A dari Perpustakaan Nasional serta Piagam Penghargaan Anugerah Cipta Agro Lestari dari Menteri Pertanian sebagai instansi produktif menulis buku pertanian peringkat ke-7, yang menegaskan peran strategis perpustakaan BBPPMP sebagai pusat informasi pertanian yang unggul dan berdaya saing.

Untuk itu BBPPMP menerima Anugerah Cipta Agro Literasi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam pengembangan literasi pertanian, pada event Forum Komunikasi Perpustakaan dan Literasi Pertanian 2025 seperti dapat dilihat pada Gambar 3.

Dalam satu tahun terakhir, BBPPMP aktif menerbitkan beragam buku dan karya pengetahuan yang memperkaya informasi publik sekaligus mendorong modernisasi pertanian di Indonesia. Penghargaan ini menegaskan peran BBPPMP dalam memperkuat ekosistem literasi pertanian nasional serta mendukung upaya pemerintah mewujudkan kemandirian dan swasembada pangan.

5. Capaian BBPPMP Untuk Outstanding Country Winners AFACI

Penghargaan untuk Enti Sirnawati, S.P., M.Sc., Penyuluh dari BBPPMP, atas pencapaiannya sebagai *Outstanding Country Winner* dalam ajang AFACI 2025. Terpilih sebagai yang terbaik di antara para ahli dan praktisi dari 15 negara anggota AFACI seperti dapat dilihat pada Gambar 4. Keberhasilan melalui Project *Rural Agricultural Technology Extension System* (RATES) merupakan bukti nyata bahwa sistem penyuluhan pertanian Indonesia memiliki kualitas yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global.

Kegiatan AFACI–RATES (*Rural Agricultural Technology Extension System in Asia*) yang dilaksanakan oleh BBPPMP pada periode November 2023 hingga November 2025 merupakan bagian dari upaya penguatan sistem penyuluhan pertanian berbasis desa melalui penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) sebagai simpul diseminasi inovasi dan standar instrumen pertanian. Kegiatan ini didukung melalui komitmen pendanaan sebesar USD 90.000 dan

diarahkan untuk meningkatkan kapasitas teknis, kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyuluhan pertanian.

Gambar 4. Capaian BBPPMP Untuk Outstanding Country Winners AFACI

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada empat lokasi *pilot project*, yaitu dua lokasi di Kabupaten Bogor dan dua lokasi di Kabupaten Karawang, dengan karakteristik komoditas yang beragam meliputi peternakan, biofarmaka, pertanian perkotaan, dan padi. Pendekatan yang digunakan bersifat bertahap, dimulai dari tahap persiapan, pembangunan, hingga pengembangan, dengan menekankan pada peningkatan kapasitas teknis petani dan penyuluh, penguatan kelembagaan Posluhdes, serta digitalisasi layanan penyuluhan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Secara kinerja, kegiatan AFACI–RATES menunjukkan capaian yang positif. Program ini berhasil meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial kelompok tani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta champion lokal, yang ditunjukkan melalui meningkatnya partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan hingga sekitar 70 persen. Selain itu, penerapan praktik pertanian yang lebih baik dan terstandar berdampak pada peningkatan produktivitas usaha tani hingga sekitar 30 persen, serta mendorong diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah ekonomi di tingkat desa.

Dari aspek kelembagaan dan keberlanjutan, kegiatan ini berhasil memperkuat fungsi Posluhdes sebagai pusat data, informasi, dan pembelajaran melalui pengembangan website layanan Posluhdes dan penguatan *branding digital.* Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BRMP komoditas,

pemerintah desa, penyuluh, *champion,* serta mitra akademisi dan swasta, menjadi faktor kunci keberhasilan dalam membangun model kolaborasi penyuluhan yang berkelanjutan.

Kegiatan AFACI–RATES memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan sistem diseminasi inovasi dan standar instrumen pertanian di tingkat desa. Model Posluhdes yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyuluhan, tetapi juga sebagai wahana pembelajaran kolektif dan penguatan jejaring kemitraan. Dengan berakhirnya kegiatan pada November 2025, hasil dan pembelajaran yang diperoleh menjadi modal penting bagi replikasi dan pengembangan model penyuluhan pertanian modern di wilayah lain, serta mendukung pencapaian sasaran kinerja BBPPMP dalam peningkatan adopsi inovasi dan modernisasi pertanian.

3.1.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Berdasarkan hasil pemantauan pada aplikasi MONEV Kementerian Keuangan, pelaksanaan anggaran pada Program Dukungan Manajemen Satuan Kerja BRMP, BBPPMP, menunjukkan kinerja efisiensi yang baik. Terdapat tiga indikator kinerja berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) jenis layanan (SBKU) yang dipantau, yaitu Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat, Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, serta Dokumen Pemantauan dan Evaluasi.

Realisasi anggaran pada ketiga indikator tersebut berada di bawah indeks SBK yang ditetapkan, dengan tingkat efisiensi masing-masing sebesar 98 persen, 99 persen, dan 73 persen. Nilai efisiensi per Rincian Output (RO) ditetapkan sebesar 20 persen sesuai ketentuan, karena indeks realisasi anggaran berada lebih dari 20 persen di bawah indeks SBKU. Kondisi ini mencerminkan adanya pengendalian belanja yang efektif serta pemanfaatan anggaran yang optimal dalam mendukung pencapaian keluaran program.

Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran Program Dukungan Manajemen pada satuan kerja BRMP telah dilaksanakan secara efisien dan akuntabel, serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja organisasi sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan kinerja tahunan. Capaian nilai efisiensi dapat dilihat pada Gambar 5.

No.	Unit	Satker	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9/11	13 = 8-12	14 = 13/8	15	16
1	09 Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	648673 Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat	480.000.000	7.517.000	1,00	1,00	7.517.000	472.483.000	98	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
2	09 Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	648673 Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	SBKU	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi [Layanan]	458.000.000	2.654.000	1,00	1,00	2.654.000	455.346.000	99	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
3	09 Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	648673 Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000.000	64.170.118	1,00	1,00	64.170.118	175.829.882	73	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.

Gambar 5. Nilai Efisiensi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 Berdasarkan Standar Biaya Keluaran

3.2. Akuntabilitas Keuangan

3.2.1. Satker BBPPMP

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik dan terkendali. Pada belanja pegawai, dari pagu total sebesar Rp5.825.636.000, realisasi melalui SPM mencapai Rp5.784.675.000 atau 99,30 persen, dan realisasi melalui SP2D sebesar Rp5.782.885.000 atau 99,27 persen terhadap pagu. Capaian ini mencerminkan pemenuhan kewajiban belanja pegawai secara optimal dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada belanja barang, pagu total sebesar Rp61.638.432.000 dengan pagu efektif Rp59.426.428.000, terealisasi melalui SPM sebesar Rp51.681.805.000 atau 83,85 persen terhadap pagu total dan 86,97 persen terhadap pagu efektif. Sementara itu, realisasi SP2D mencapai Rp51.569.356.000 atau 83,66 persen terhadap pagu total dan 86,78 persen terhadap pagu efektif. Realisasi ini menunjukkan adanya ruang efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan pengendalian belanja.

Selanjutnya, belanja modal dengan pagu sebesar Rp9.322.986.000 menunjukkan realisasi yang tinggi, yaitu Rp9.102.873.000 baik pada SPM maupun SP2D, atau 97,64 persen dari pagu. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan dan investasi aset telah dilaksanakan secara efektif sesuai rencana.

Secara keseluruhan, dari total pagu anggaran sebesar Rp76.787.054.000 dan pagu efektif Rp74.575.050.000, realisasi anggaran melalui SPM mencapai Rp66.569.353.000 atau 86,69 persen terhadap pagu total dan 89,26 persen terhadap pagu efektif. Adapun realisasi melalui SP2D sebesar Rp66.455.114.000 atau 86,54 persen terhadap pagu total dan 89,11 persen terhadap pagu efektif seperti dapat dilihat pada Tabel 23. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Tabel 23. Serapan Anggaran BBPPMP berdasarkan data SPM dan SP2D 2025

Jenis Belanja	Pagu Total	Pagu Efektif	Realisasi SPM			Realisasi SP2D		
	Rp (000)	Rp(000)	Rp(000)	% Pagu Total	% Pagu Efektif	Rp(000)	% Pagu Total	% Pagu Efektif
Belanja Pegawai	5.825.636	5.825.636	5.784.675	99,30	99,30	5.782.885	99,27	99,27
Belanja Barang	61.638.432	59.426.428	51.681.805	83,85	86,97	51.569.356	83,66	86,78
Belanja Modal	9.322.986	9.322.986	9.102.873	97,64	97,64	9.102.873	97,64	97,64
Total	**76.787.054**	**74.575.050**	**66.569.353**	**86,69**	**89,26**	**66.455.114**	**86,54**	**89,11**

Realisasi anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024. Total realisasi belanja meningkat dari sebesar Rp26,13 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp66,46 miliar pada tahun 2025, seperti dapat dilihat pada Tabel 24, mencerminkan adanya penguatan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas kebijakan yang ditetapkan.

Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan dari Rp5,53 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp5,78 miliar pada tahun 2025 atau meningkat sebesar 4,57 persen. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian kebutuhan belanja pegawai dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Realisasi belanja barang meningkat cukup signifikan dari Rp20,17 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp51,57 miliar pada tahun 2025 atau naik sebesar 155,57 persen. Peningkatan ini sejalan dengan intensifikasi pelaksanaan kegiatan operasional, program layanan teknis, perbenihan, pendampingan program serta dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas (tambahan kegiatan ICARE)

Sementara itu, belanja modal menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dari Rp428,18 juta pada tahun 2024 menjadi Rp9,10 miliar pada tahun 2025 atau meningkat sebesar 2.026,94 persen. Kenaikan ini mencerminkan adanya akselerasi investasi pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung diantaranya melalui kegiatan ICARE guna meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan serta keberlanjutan pelaksanaan program strategis.

Secara keseluruhan, peningkatan realisasi belanja pada tahun 2025 mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja dan tujuan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan dan kebijakan yang berlaku.

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 Satker BBPPMP.

Uraian	Realisasi Per 31 Desember 2024	Realisasi Per 31 Desember 2025	%
Belanja Pegawai	5.529.948.121	5.782.884.864	4,57%
Belanja Barang	20.174.446.375	51.569.355.937	155,57%
Belanja Modal	428.178.000	9.102.872.588	2026,94%
Total Belanja	**26.132.572.496**	**66.455.113.389**	**154,3%**

3.2.2. Lingkup BBPPMP

Secara agregat, pagu anggaran Tahun Anggaran berjalan sebesar Rp470,44 miliar dengan pagu efektif Rp454,97 miliar telah direalisasikan melalui SPM sebesar Rp437,01 miliar atau 92,89 persen terhadap pagu total dan 96,05 persen terhadap pagu efektif. Sementara itu, realisasi melalui SP2D mencapai Rp436,79 miliar, setara 92,85 persen dari pagu total dan 96,00 persen dari pagu efektif. Capaian ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi dan pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai dengan rencana.

Ditinjau menurut jenis belanja, belanja pegawai dengan pagu sebesar Rp147,94 miliar seluruhnya merupakan pagu efektif dan telah direalisasikan melalui SPM sebesar Rp147,13 miliar atau 99,46 persen, serta melalui SP2D sebesar Rp147,06 miliar atau 99,41 persen. Capaian ini mencerminkan pengelolaan belanja pegawai yang sangat optimal dan sesuai dengan kebutuhan riil satuan kerja.

Pada belanja barang, dari pagu total sebesar Rp300,88 miliar, pagu efektif yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp285,41 miliar. Realisasi melalui SPM mencapai Rp268,79 miliar atau 89,33 persen terhadap pagu total dan 94,18 persen terhadap pagu efektif, sedangkan realisasi melalui SP2D tercatat sebesar Rp268,64 miliar atau 89,28 persen terhadap pagu total dan 94,12 persen terhadap pagu efektif. Selisih antara pagu total dan pagu efektif terutama dipengaruhi oleh penyesuaian anggaran serta efisiensi pelaksanaan kegiatan, tanpa mengurangi pencapaian output yang telah direncanakan.

Selanjutnya, belanja modal dengan pagu sebesar Rp21,62 miliar seluruhnya merupakan pagu efektif. Realisasi anggaran melalui SPM dan SP2D masing-masing sebesar Rp21,09 miliar, atau 97,54 persen, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan investasi dan pengadaan aset tetap telah dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai perencanaan. Serapan anggaran lingkup BBPPMP berdasarkan data SPM dan SP2D Tahun 2025 per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 25.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran tersebut mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Secara rinci capaian anggaran masing-masing satker dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 25. Serapan Anggaran Lingkup BBPPMP Berdasarkan Data SPM dan SP2D Per Jenis Belanja Tahun 2025.

No	Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Efektif	Realisasi SPM			Realisasi SP2D		
		Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	% Pagu Total	% Pagu Efektif	Rp (000)	% Pagu Total	% Pagu Efektif
1	Belanja Pegawai	147.937.336	147.937.336	147.134.304	99,46	99,46	147.062.256	99,41	99,41
2	Belanja Barang	300.882.365	285.411.036	268.787.374	89,33	94,18	268.641.758	89,28	94,12
3	Belanja Modal	21.622.161	21.622.161	21.089.739	97,54	97,54	21.089.739	97,54	97,54
	Total	**470.441.862**	**454.970.533**	**437.011.416**	**92,89**	**96,05**	**436.793.753**	**92,85**	**96,00**

Tabel 26. Realisasi Per Satker

No	Kode | Nama Satker	Pagu Awal (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	% dibanding Pagu Awal	% dibanding Pagu Efektif
1	634036 | SULAWESI SELATAN	25.225.341.000	25.178.331.000	24.988.763.884	99,06	99,25
2	567830 | PAPUA	8.238.107.000	8.186.417.000	8.155.479.681	99,00	99,62
3	567460 | RIAU	8.469.398.000	8.423.599.000	8.378.704.272	98,93	99,47
4	634001 | JAMBI	9.663.136.000	9.615.214.000	9.556.747.249	98,90	99,39
5	567495 | SUMATERA SELATAN	10.076.344.000	10.028.424.000	9.962.056.634	98,87	99,34
6	567392 | ACEH	9.782.771.000	9.750.051.000	9.574.738.591	97,87	98,20
7	567517 | LAMPUNG	18.466.439.000	18.417.169.000	17.983.702.602	97,39	97,65
8	567428 | SUMATERA UTARA	10.661.637.000	10.611.657.000	10.348.129.163	97,06	97,52
9	567449 | SUMATERA BARAT	12.013.402.000	11.687.878.000	11.655.451.146	97,02	99,72
10	567364 | JAWA TIMUR	21.582.379.000	21.069.309.000	20.844.150.649	96,58	98,93
11	450831 | BANTEN	8.866.288.000	8.532.198.000	8.526.902.505	96,17	99,94
12	567296 | JAWA BARAT	22.347.434.000	21.802.734.000	21.394.095.471	95,73	98,13
13	567702 | SULAWESI TENGGARA	16.158.440.000	15.743.230.000	15.466.039.505	95,71	98,24
14	567563 | KALIMANTAN BARAT	17.815.639.000	16.990.292.000	16.902.146.214	94,87	99,48
15	633975 | YOGYAKARTA	11.615.149.000	11.046.649.000	10.985.197.592	94,58	99,44
16	633996 | BENGKULU	9.826.062.000	9.340.197.000	9.258.918.485	94,23	99,13
17	567783 | NUSA TENGGARA TIMUR	11.597.568.000	11.041.082.000	10.907.053.574	94,05	98,79
18	633961 | JAKARTA	6.092.861.000	5.747.111.000	5.709.063.899	93,70	99,34
19	567673 | SULAWESI TENGAH	7.172.065.000	6.769.455.000	6.717.123.836	93,66	99,23
20	450856 | GORONTALO	6.417.919.000	6.009.189.000	6.002.191.445	93,52	99,88
21	500957 | SULAWESI BARAT	6.304.810.000	5.910.315.000	5.895.063.759	93,50	99,74
22	634040 | NUSA TENGGARA BARAT	28.524.527.000	28.040.043.000	26.613.969.648	93,30	94,91
23	633982 | BALI	8.942.433.000	8.412.943.000	8.336.341.277	93,22	99,09
24	567737 | MALUKU	6.467.386.000	6.059.446.000	6.025.483.335	93,17	99,44
25	450871 | PAPUA BARAT	5.913.021.000	5.501.698.000	5.493.832.762	92,91	99,86
26	567570 | KALIMATAN TENGAH	9.421.696.000	8.752.415.000	8.726.363.780	92,62	99,70

No	Kode | Nama Satker	Pagu Awal (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	% dibanding Pagu Awal	% dibanding Pagu Efektif
27	567627 | KALIMANTAN TIMUR	10.109.730.000	9.289.693.000	9.269.833.323	91,69	99,79
28	634015 | KALIMANTAN SELATAN	10.074.826.000	9.305.786.000	9.232.388.908	91,64	99,21
29	567318 | JAWA TENGAH	23.309.671.000	22.521.027.000	21.248.151.113	91,16	94,35
30	450840 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	6.923.775.000	6.277.885.000	6.262.679.080	90,45	99,76
31	320091 | KEPULAUAN RIAU	4.076.469.000	3.652.657.000	3.631.358.856	89,08	99,42
32	648673 | BRMP PENERAPAN	76.787.054.000	74.575.050.000	66.455.113.389	86,54	89,11
33	450862 | MALUKU UTARA	5.404.185.000	4.996.453.000	4.670.419.641	86,42	93,47
34	634022 | SULAWESI UTARA	16.093.900.000	15.684.936.000	11.616.096.823	72,18	74,06
	LINGKUP BRMP PENERAPAN	470.441.862.000	454.970.533.000	436.793.752.091	92,85	96.00

3.2.3. Hibah Langsung Luar Negeri

Hibah adalah setiap penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Tujuan penerimaan hibah adalah untuk mendukung program pembangunan nasional dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Walaupun hibah merupakan penerimaan yang tidak perlu dibayar kembali, namun hibah yang diterima oleh pemerintah harus memenuhi kriteria antara lain tidak disertai ikatan politik dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara.

BBPPMP mengelola kegiatan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri, berdasarkan data OMSPAN, tahun 2025 dialokasikan di kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Posluhdes (melalui *capacity building dan partnership)* yang didanai oleh *Asian Food And Agriculture Cooperaton Initiative* (AFACI) dengan total pagu sebesar Rp 451.612.000 dengan realisasi Rp451.612.000 sebesar 100% dari target seperti dapat dilihat pada Tabel 27.

Lokasi kegiatan AFACI di Desa Sukaresmi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor dan Desa Pucung, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang.

Tabel 27. Kegiatan yang Telah Dilaksanakan Selama Tahun 2025

No	Lokasi	Kegiatan
1.	Desa Sukaresmi, Kec Megamendung Kab. Bogor	1. Project evaluation workshop On RATES 2. Pelatihan : (a) pengolahan produk jahe, (b) pencegahan dan penanganan penyakit pada domba, (c) Sanitasi Kandang ternak domba. 3. Pendampingan : (a) pembuatan PIRT dan sertifikasi halal olahan pangan, (b) Kelembagaan Posluhdes dan Penguatan TIK sebagai Branding Produk Pertanian Posluhdes, (c) konsolidasi data recording dan koleksi data ternak di desa Sukaresmi, (d) Medsos Kelompok tani, dan (e) penilaian kelembagaan Posluhdes. 4. Kunjungan lapang 5. Pembuatan video before after project AFACI
2.	Desa Sukawangi, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor	Pendampingan : (a) kelembagaan posluhdes dalam meningkatkan branding olahan pangan , (b) Medsos Kelompok tani, (c) Pemasaran produk Olahan Pangan KWT Sugalaya, (d) Pembuatan PIRT hasil olahan Pangan, (e) standar budidaya GAP Cabai dan Kopi.
3.	Desa Pucung, Kec. Kota Baru, Kab, Karawang	1. Pelatihan: (a) Pengendalian OPT HDB di Posluhdes Pucung, dan (b) Pasca Panen KWT. 2. Bimtek Posluhdes 3. Pendampingan : (a) Transformasi kelembagaan Posluhdes, (b) ICT, (c) literasi informasi di posluhdes, dan (d) Rencana Pertanian Desa Tahun 2025.

Selain kegiatan langsung di tiga lokasi, dilaksanakan pula kegiatan : 1) Sosialisasi keamanan produk sertifikasi halal dan prosesnya di Balithi Segunung Cianjur, 2) Koordinasi penyusunan bahan evaluasi workshop ON RATES di Bogor, 3) Pelaksanaan expose AFACI RATES 2023-2025 di Permata Bogor, dan 4) Menghadiri AFACI Projeck Evaluation Workshop ON Rates 2025 di Usbekistan.

3.2.4. Pinjaman Luar Negeri

***Agriculture Value Chain Development Project/Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE)**

Kementerian Pertanian bersama dengan *World Bank* pada tahun 2022 telah menyusun Program *Integrated Corporation of Agriculutural Resources Empowerment* (ICARE) yang difokuskan pada komoditas-komoditas bernilai ekonomis tinggi, untuk mitigasi adanya risiko impor komoditas strategis yang cenderung terus meningkat, serta untuk meningkatkan nilai tambah (*value-added*) sektor pertanian dan tentunya untuk mendorong ekspor. Melalui program ICARE yang didukung oleh Bank Dunia dan Bappenas, BRMP telah merancang pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan standar instrumen pertanian di Indonesia.

Program ICARE BRMP difokuskan pada pembangunan kawasan penerapan standar instrumen pertanian dengan dukungan dari korporasi petani. Program ini dijalankan selama 5 tahun, dimulai pada tahun 2023 sampai dengan 2027, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BRMP, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Swasta, *off taker*, serta *stakeholder* lainnya. Lokasi kegiatan mencakup 9 provinsi di Indonesia, yakni Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

ICARE dirancang untuk mendukung Rantai Nilai Pertanian yang Berkelanjutan Secara Lingkungan dan Finansial serta Inklusif, sehingga dapat meningkatkan akses petani terhadap aset/sarana dan prasarana, serta layanan pertanian; terbangunnya kemitraan rantai nilai komoditas pertanian; meningkatnya penjualan hasil/produk pertanian korporasi petani; dan meningkatnya produktivitas pertanian.

Berdasarkan data realisasi anggaran per satuan kerja, total pagu anggaran sebesar Rp 130 miliar, setelah memperhitungkan blokir anggaran sebesar Rp 247,46 juta, menghasilkan pagu efektif sebesar Rp 129,75 miliar. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp 109,68 miliar, atau 84,37 persen terhadap pagu total dan 84,53 persen terhadap pagu efektif. Seluruh pagu efektif tersebut telah direalisasikan melalui mekanisme pembayaran tanpa menyisakan komitmen kontraktual yang masih berjalan.

Secara rinci, beberapa satuan kerja menunjukkan tingkat penyerapan sangat tinggi, diantaranya BRMP Kalimantan Barat dengan realisasi 99,54 persen, BRMP

Sulawesi Selatan sebesar 98,29 persen, dan BRMP Jawa Timur sebesar 97,70 persen terhadap pagu efektif. Capaian tersebut mencerminkan kesiapan pelaksanaan kegiatan, ketepatan perencanaan, serta efektivitas pengendalian anggaran di masing-masing satuan kerja.

Selanjutnya, BRMP Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan Lampung juga mencapai realisasi yang relatif optimal dengan capaian di atas 95 persen dari pagu efektif, menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan rencana dan jadwal yang ditetapkan.

Di sisi lain, terdapat beberapa satuan kerja dengan tingkat realisasi di bawah rata-rata nasional, antara lain BRMP NTB dengan realisasi 89,94 persen setelah memperhitungkan blokir anggaran, serta BBPPMP sebesar 86,27 persen. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran, tanpa mengurangi pencapaian output utama.

Adapun satuan kerja dengan tingkat realisasi yang relatif rendah adalah BRMP Jawa Tengah sebesar 80,63 persen dan BRMP Sulawesi Utara sebesar 61,99 persen terhadap pagu efektif. Capaian tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan dalam percepatan pelaksanaan kegiatan, yang memerlukan penguatan perencanaan, pengendalian, dan mitigasi risiko pelaksanaan pada periode selanjutnya.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran per satuan kerja menunjukkan bahwa mayoritas satker telah mampu mengelola pagu efektif secara optimal, meskipun masih diperlukan langkah perbaikan dalam hal percepatan realisasi dan penajaman perencanaan pada satker dengan capaian realisasi yang belum optimal guna mendukung pencapaian kinerja program secara menyeluruh. Tindak lanjut dari belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran ICARE 2025, maka akan dilakukan pengusulan DIPA Luncuran di tahun 2026.

Secara rinci, realisasi anggaran ICARE dapat dilihat pada Tabel 28. Sedangkan Perencanaan Anggaran Tahunan Kegiatan ICARE dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 28. Realisasi Pinjaman Luar Negeri Lingkup BBPPMP Tahun 2025

No	Satker	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	% thd Pagu	% thd Pagu Efektif	Kontrak (Rp)	Realisasi + Kontrak (Rp)	% thd Pagu Efektif
1	Kalbar	8.480.597.000	-	8.480.597.000	8.442.633.002	99,54	99,54	0	8.442.633.002	99,55
2	Sulsel	6.922.613.000	-	6.922.613.000	6.804.204.040	98,29	98,29	0	6.804.204.040	98,29
3	Jatim	7.129.774.000	-	7.129.774.000	6.965.944.913	97,70	97,70	0	6.965.944.913	97,70
4	Jabar	9.326.884.000	-	9.326.884.000	8.991.375.674	96,40	96,40	0	8.991.375.674	96,40
5	Lampung	6.882.929.000	-	6.882.929.000	6.611.738.081	96,06	95,23	0	6.611.738.081	96,06
6	Sultra	7.457.749.000	-	7.457.749.000	7.230.006.739	96,95	96,95	0	7.230.006.739	96,95
7	NTB	11.073.395.000	33.200.000	11.040.195.000	9.930.003.971	89,67	89,94	0	9.930.003.971	89,94
8	BBPPMP	57.710.208.000	-	57.710.208.000	49.672.468.538	86,07	86,27	0	49.672.468.538	86,07
9	Jateng	4.875.638.000	208.237.000	4.667.401.000	3.763.251.366	77,18	80,63	0	3.763.251.366	80,63
10	Sulut	10.140.213.000	6.024.000	10.134.189.000	6.282.249.403	61,95	61,99	0	6.282.249.403	61,99
	Total	**130.000.000.000**	**247.461.000**	**129.752.539.000**	**114.690.254.187**	**88,22**	**88,39**	**0**	**114.690.254.187**	**88,39**

Tabel 29. Perencanaan Anggaran Tahunan (Annual Work Plan-AWP) Tahun 2025

	Angggaran (Rp Milyar)											
Komponen	**BBPPMP**	**Lampung**	**Jawa Barat**	**Jawa Tengah**	**Jawa Timur**	**Kalbar**	**NTB**	**Sulsel**	**Sultra**	**Sulut**	**Ditjen PSP**	**TOTAL**
TOTAL	57,71	6,88	9,33	4,88	7,13	8,48	11,07	6,92	7,46	10,14	320	**450**
Komponen A: Penguatan rantai nilai di kawasan pertanian terpilih	17,43	5,68	7,98	3,88	6,04	7,20	9,44	5,06	5,97	8,94	320	**397,62**
Komponen B: Penguatan Kapasitas institusi untuk pengembangan rantai nilai	31,6	0,50	0,65	0,30	0,39	0,58	0,93	1,16	0,79	0,50		**37,40**
Komponen C : Dukungan Manajemen Program	8,68	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,7	0,7	0,7	0,70		**14,98**

3.2.5. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah salah satu komponen penerimaan yang timbul sebagai akibat adanya pelayanan terhadap pengguna jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Salah satu unsur pokok yang menentukan keberhasilan pengelolaan PNBP adalah dengan mewujudkan pengelolaan yang optimal, akuntabel dan transparan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sampai saat ini target PNBP TA. 2025 terdiri dari penerimaan fungsional dan umum. Realisasi pendapatan PNBP Satker BBPPMP sebesar Rp5.000.000 untuk pendapatan penggunaan sarana dan prasarana dan terealisasi sebesar Rp38.313 yang merupakan pendapatan mess BBPPMP, selama Tahun 2025 tidak ada tamu yang menginap. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Tahun 2025		
Akun Pendapatan	**Target (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**%**
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	5.000.000	38.313	0,76
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	45.026.504	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8.698.000	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2.573.700	
Jumlah	**5.000.000**	**56.336.517**	

Realisasi PNBP pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp56.336.517, mengalami penurunan sebesar Rp73.277.668 atau 56,54 persen dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp129.614.185 seperti dapat dilihat pada Tabel 31. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan dari pos Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu serta berkurangnya pendapatan dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi.

Meskipun demikian, terdapat peningkatan pada pendapatan dari penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang meningkat sebesar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyelesaian kewajiban keuangan negara pada Tahun 2025. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BBPPMP adalah sebagai berikut.

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Selisih (Realisasi 2025-Realisasi 2024)	YoY (%)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	38.313	1.600.000	-1.561.687	-97,61%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	45.026.504	36.019.872	9.006.632	25,00%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	138.313	-138.313	-100,00%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	8.698.000	87.967.000	-79.269.000	-90,11%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.573.700	3.889.000	-1.315.300	-33,82%
Jumlah	**56.336.517**	**129.614.185**	**-73.277.668**	**-56,54%**

Ket. YoY% = (Realisasi 2025-Realisasi 2024)/Realisasi 2024 x 100%

Realisasi PNBP untuk lingkup BBPPMP sebesar Rp13.151.998.375,- (167,22%). Secara rinci besarnya PNBP lingkup BBPPMP tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 32.

Tabel 32. Realisasi PNPB Lingkup BBPPMP Tahun 2025

No	Nama Satker	Target	Realisasi	%
1	BRMP ACEH	325.800.000	388.429.713	119,22
2	BRMP SUMATERA UTARA	570.000.000	453.415.242	79,55
3	BRMP RIAU	44.987.000	108.520.950	241,23
4	BRMP JAMBI	161.400.000	209.721.733	129,94
5	BRMP SUMATERA BARAT	1.527.369.000	1.601.863.185	104,88
6	BRMP BENGKULU	284.960.000	449.288.335	157,67
7	BRMP SUMATERA SELATAN	150.000.000	252.094.151	168,06
8	BRMP BANGKA BELITUNG	191.628.000	340.024.119	177,44
9	BRMP LAMPUNG	85.000.000	177.543.481	208,87

No	Nama Satker	Target	Realisasi	%
10	BRMP BANTEN	279.085.000	622.181.100	222,94
11	BRMP DKI JAKARTA	7.965.000	168.289.285	2.112,86
12	BRMP JAWA BARAT	146.800.000	138.081.784	94,06
13	BRMP JAWA TENGAH	587.368.000	903.949.639	153,90
14	BRMP YOGYAKARTA	450.000.000	605.070.881	134,46
15	BRMP JAWA TIMUR	586.008.000	1.007.830.078	171,98
16	BRMP BALI	40.200.000	189.240.950	470,75
17	BRMP NUSA TENGGARA BARAT	240.600.000	276.554.400	114,94
18	BRMP NUSA TENGGARA TIMUR	279.000.000	389.935.300	139,76
19	BRMP KALIMANTAN BARAT	44.800.000	165.151.899	368,64
20	BRMP KALIMANTAN TENGAH	170.400.000	181.191.206	106,33
21	BRMP KALIMANTAN SELATAN	185.796.000	1.251.811.679	673,76
22	BRMP KALIMANTAN TIMUR	285.735.000	363.805.073	127,32
23	BRMP GORONTALO	98.232.000	128.302.963	130,61
24	BRMP SULAWESI UTARA	95.000.000	172.320.867	181,39
25	BRMP SULAWESI TENGAH	91.070.000	380.817.214	418,16
26	BRMP SULAWESI TENGGARA	65.000.000	212.878.956	327,51
27	BRMP SULAWESI SELATAN	383.972.000	960.773.015	250,22
28	BRMP SULAWESI BARAT	99.828.000	200.835.000	201,18
29	BRMP MALUKU UTARA	67.600.000	118.338.000	175,06
30	BRMP PAPUA	36.650.000	174.648.210	476,53
31	BRMP PAPUA BARAT	118.000.000	378.400.700	320,68
32	BRMP MALUKU	154.695.000	118.007.100	76,28
33	BRMP KEPULAUAN RIAU	4.920.000	6.345.650	128,98
34	BBPPPMP	5.000.000	56.336.517	1.126,73
	JUMLAH	**7.864.868.000**	**13.151.998.375**	**167,22**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Kementerian Pertanian telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan RI untuk menggunakan sebagian PNBP dari penerimaan fungsionalnya. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 769/KMK.05/2017 tanggal 23 Oktober 2017. Penggunaan PNBP rata-rata Satuan Kerja diharapkan dapat menjadi pendorong dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP di Lingkup BBPPMP.

3.2.6. Penggunaan PNBP lingkup BBPPMP Tahun 2025

Realisasi PNBP di lingkup BBPPMP pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.537.831.113 atau 94,2% dari pagu PNBP yang ditetapkan sebesar Rp5.879.270.000,- . Secara rinci realisasi penggunaan PNPB masing-masing satker dapat dilihat pada Tabel 33.

Tabel 33. Realisasi Penggunaan PNBP lingkup BBPPMP Tahun Tahun 2025

NO	Satker	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Sulbar	72.874.000	72.874.000	100
2	Papua	22.374.000	22.374.000	100
3	Jakarta	5.813.000	5.813.000	100
4	Bali	29.346.000	29.346.000	100
5	Gorontalo	65.700.000	65.699.000	100
6	Kalsel	129.791.000	129.759.000	100
7	Kaltim	193.969.000	193.897.561	100
8	Sumbar	1.065.256.000	1.064.534.569	99,9
9	Lampung	62.041.000	61.986.600	99,9
10	Banten	448.915.000	448.328.440	99,9
11	Babel	127.020.000	126.767.783	99,8
12	Kalteng	124.391.000	124.057.200	99,7
13	Jateng	428.778.000	427.625.190	99,7
14	Yogyakarta	315.389.000	314.425.929	99,7
15	Sulsel	280.299.000	279.099.000	99,6
16	Papua Barat	64.238.000	63.770.230	99,3
17	Sumsel	156.539.000	155.142.197	99,1
18	Jatim	420.484.000	416.319.300	99
19	Jambi	103.222.000	101.334.258	98,2

NO	Satker	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
20	NTB	166.434.000	163.360.110	98,2
21	Sulteng	65.700.000	64.410.000	98,
22	Sulut	69.350.000	67.768.360	97,7
23	Aceh	221.185.000	215.883.450	97,6
24	NTT	203.670.000	197.638.707	97,0
25	Riau	29.785.000	28.710.266	96,4
26	Kalbar	30.879.000	28.847.638	93,4
27	Bengkulu	280.749.000	255.478.281	91
28	Maluku	97.528.000	73.479.000	75,3
29	Sumut	410.260.000	272.151.844	66,3
30	Malut	40.150.000	24.090.000	60
31	Jabar	107.163.000	42.860.200	40
32	Kepri	3.591.000	-	0
33	Sultra	32.737.000	-	0
34	BBPPMP	3.650.000	-	0
	TOTAL	**5.879.270.000**	**5.537.831.113**	**94,2**

IV. PENUTUP

4.1. Simpulan

Secara umum capaian kinerja di BBPPMP di Tahun 2025 berdasarkan hasil analisis evaluasi kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan tahun 2025 telah dicapai dengan baik. Indikator keberhasilan ditunjukkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2025 lingkup BBPPMP sebesar Rp469.023.555.000. Seiring dengan dinamika adanya perubahan kebijakan nasional maka dilakukan penyesuaian anggaran, pagu total anggaran lingkup BBPPMP sampai akhir bulan Desember 2025 menjadi sebesar Rp470.441.862.000 berdasarkan pagu total, sedangkan berdasarkan pagu efektif sebesar Rp454.970.533.000. Realisasi anggaran lingkup BBPPMP per 31 Desember 2025 berdasarkan data SP2D, sebesar Rp436.793.753.000, atau sebesar 92,85% dari pagu total dan 96% dari pagu efektif.
2. Hasil pengukuran capaian kinerja lingkup BBPSIP tahun 2025 menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar 106,13% dengan kategori sangat berhasil.
3. Secara umum indikator kinerja lingkup BBPPMP telah memenuhi target dari Perjanjian Kinerja (PK) dengan perolehan nilai capaian kinerja > 100 persen (Sangat Berhasil) pada indikator yaitu:
   a. Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian dengan nilai capaian 117,63%;
   b. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian dengan nilai capaian 100,65%;
   c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian dengan nilai capaian 100,11%.
4. Indikator Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif belum ada capaiannya karena belum dialokasikan anggaran.
5. Indikator kinerja yang merupakan kinerja Satker BBPPMP adalah Nilai Pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Sedangkan untuk indikator Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian merupakan kinerja lingkup BBPPMP.

4.2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

4.2.1. Permasalahan

Permasalahan dalam pencapaian kinerja BBPPMP tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan akibat dinamika penganggaran, khususnya kegiatan dengan alokasi anggaran besar yang baru dapat dilaksanakan pada triwulan IV setelah buka blokir anggaran, sehingga waktu pelaksanaan menjadi sangat terbatas;
2. Dinamika perubahan Lembaga dari BBPSIP menjadi BBPPMP
3. Kurangnya pemahaman pelaku usaha tani dalam pelaksanaan penerapan standar pertanian.

4.2.2. Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan dalam pencapaian output kinerja maka perlu dilakukan beberapa hal antara lain:

a. Ketersediaan dokumen perencanaan yang tepat waktu dan memadai, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat segera dilakukan setelah penganggaran tersedia;
b. Koordinasi yang intensif antara penanggung jawab kegiatan dan tim pelaksana, melalui pertemuan rutin untuk mengevaluasi progres capaian serta mengidentifikasi kendala teknis sejak dini;
c. Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala dan berjenjang, yang memungkinkan pengendalian pelaksanaan kegiatan serta penyesuaian strategi untuk memastikan capaian output sesuai target;
d. Sinergi dan kesiapan sumber daya manusia, baik tenaga fungsional maupun tenaga administrasi, dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja; serta
e. Melakukan pelatihan, bimbingan teknis, meningkatkan intensitas pendampingan pada usaha tani, serta mendorong penerapan standar secara berkelompok melalui kelompok tani, koperasi untuk peningkatan daya saing.

4.2.3. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan BBPPMP adalah :

1. Berkoordinasi dengan *stakeholder* di daerah dalam perencanaan kegiatan terkait lokasi, waktu pelaksanaan, pelaksana kegiatan dan dukungan terhadap program daerah.
2. Perlu perencanaan yang matang dalam proses pelaksanaan anggaran dan kegiatan agar efektif, efisien dan berdayaguna.
3. Peranan pimpinan dan koordinasi yang baik antar bagian dalam menyiapkan dokumen-dokumen penilaian ZI sangat diperlukan untuk pelaksanaan Zona Integritas dan mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BBPPMP Berdasarkan Permentan No. 39 Tahun 2025

Lampiran 2. Data Aset Laboratorium Lingkup BBPPMP yang sudah terakreditasi

No.	Satker BRMP	Jenis Lab	No. Akreditasi
1	Sumatera Utara	Lab. Pengujian Kimia	LP-863-IDN
2	Sumatera Barat	1. Lab. Pengujian Tanah, Pupuk Organik dan Tanaman	LP-2076-IDN
		2. Lab Kultur Jaringan dan HPT (Non-RL)	
		3. Lab. Pascapanen (Non-RL)	
		4. Lab. Mekanisasi (Non-RL)	
		5. Lab. Benih (Non-RL)	
3	Lampung	Lab Pengujian Tanah	LP-1110-IDN
4	Bengkulu	1. Lab. Pengujian Tanah	LP-1106-IDN
		2. Lab Pascapanen (Non-RL)	
		3. Lab Proteksi (Non-RL)	
		4. Lab Perbenihan (Non-RL)	
5	Jawa Barat	Lab Pengujian Mutu Benih Padi, Kedelai dan Beras	LP-982-IDN
6	Jawa Tengah	Lab. Pengujian Kimia (Tanah, Pupuk Organik, Pupuk Anorganik, Jaringan Tanamn, Pakan Ternak)	LP-936-IDN
7	D.I. Yogyakarta	Lab Pengujian Kimia dan Fisika Tanah, Tanaman, Pupuk dan Air	LP-1751-IDN
8	NTB	Lab. Pengujian Kimia Tanah	LP-394-IDN
9	Kaltim	Lab. Pengujian Tanah	LP-610-IDN
10	Papua Barat	Lab. Pengujian Pascapanen	LP-1345-IDN

Lampiran 3. Data Aset Laboratorium Lingkup BBPPMP yang Operasional dan belum terakreditasi

	Satker BRMP	Jenis Laboratorium
1	Riau	Lab Pengujian Tanah dan Pupuk Organik
2	Jambi	Lab Pengujian Tanah dan Pupuk Organik
3	Sumatera Selatan	1. Lab Pengujian Kimia Tanah
		2. Lab Mutu Beras
4	Banten	Lab Pengujian Mutu Beras
5	DKI Jakarta	Lab Pengujian Mutu Benih
6	Jawa Timur	Lab Pengujian Tanah
7	NTT	Lab Pengujian Kimia Tanah
8	Kalimantan Barat	Lab Pengujian Tanah
9	Sulawesi Utara	Lab Pengujian Mutu Benih
10	Gorontalo	Lab Pengujian Kimia Tanah

Lampiran 4. Data Aset Laboratorium Lingkup BBPPMP yang Belum Operasional dan belum terakreditasi

No.	Satker BRMP	Jenis Lab
1	Kalimantan Tengah	Lab Pengujian Benih dan Tanah
2	Kalimantan Selatan	Lab Pengujian Benih
3	Maluku Utara	Lab Pengujian Pascapanen
4	Sulawesi Barat	Lab Pengujian Pascapanen
5	Sulawesi Tenggara	Lab Pengujian Tanah dan Pupuk
6	Aceh	Lab Pengujian Tanah, Pupuk Organik dan Tanaman
7	Kepulauan Riau	Lab Pengujian Pascapanen

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan (SNI)	34
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	21
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	**Rp**	**218.386.450.000,00**
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	**218.386.450.000,00**
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	**Rp**	-
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	-
	Program Dukungan Manajemen	**Rp**	**250.637.105.000,00**
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	250.637.105.000,00

Bogor, 30 Desember 2024

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Fadjry Djufry

Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

M Syamsuddin

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	-	Ton
		Produksi Benih Jagung	-	Ton
TOTAL			**UNIT**	

Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi I)

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
Jl. Tentara Pelajar No 10, Bogor 16114 Telepon (0251) 8351277, Faksimili (0251) 8350028
WEBSITE : bbpenerapan.brmp.pertanian.go.id; E-MAIL : brmp.bbpenerapan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syamsuddin
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Mei 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Fadjry Djufry	Syamsuddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Presentase pelaku usaha pertanian yang menerapkan standar pertanian (%)	%	50
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif	Persentase pemenuhan kebutuhan benih/ bibit sumber spesifik lokasi (%)	%	80
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Nilai	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Nilai	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	**Rp**	**134.856.450.000**
1	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp	134.856.450.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	**Rp**	**32.163.640.000**
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	32.163.640.000
	Program Dukungan Manajemen	**Rp**	**297.494.386.000**
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	297.494.386.000

Total anggaran terblokir senilai Rp. 156.283.590.000 terdiri dari:
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp. 134.856.450.000,-
- Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp. 167.353.000,-
- Program Dukungan Manajemen Rp. 21.259.787.000,-

Kepala Badan Perakitan
dan Modernisasi Pertanian

Fadjry Djufry

Kepala Balai Besar Pengembangan dan
Penerapan Modernisasi Pertanian

Syamsuddin

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	Produksi Benih Padi kelas FS	145	Ton
		Produksi Benih Padi kelas SS	1.817	Ton
TOTAL			**1.962**	Ton

Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi II)

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
Jl. Tentara Pelajar No. 10 Bogor 16114, Telepon (0251) 2000199
WEBSITE : bbpenerapan.brmp.pertanian.go.id; E-MAIL : brmp.bbpenerapan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syamsuddin

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Fadjry Djufry	Syamsuddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian	1.1. Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian	14,29	%
2	Meningkatnya Adopsi Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	2.1. Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	-	%
		LAINNYA		
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3.1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	85,53	Nilai (0-100)
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	90,15	Nilai (0-100)

Kode	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
EC	**Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	**Rp**	**136.330.882.000**
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Rp	136.330.882.000
HA	**Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	**Rp**	**39.576.440.000**
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	39.576.440.000
WA	**Dukungan Manajemen**	**Rp**	**294.534.540.000**
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	294.534.540.000
		Rp	**470.441.862.000**

Total anggaran terblokir senilai Rp. 15.471.329.000 terdiri dari:
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp. 248.661.000,-
- Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp.58.423.000,-
- Program Dukungan Manajemen Rp. 15.164.245.000,-

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Fadjry Djufry

Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

Syamsuddin

Lampiran 8. Rencana Aksi BBPPMP Tahun 2025

TABEL KENDALI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

No	IKSK	IKU	Nilai	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/ Evidence
								Fisik	Persen				
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Meningkatnya Pelaku Usaha Tani Yang Mennerapkan Standar Pertanian	Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian (%)	%	14,29	Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	B01 :							
						B02 :							Belum dilaksanakan kegiatan
						B03 :							Belum dilaksanakan kegiatan
						B04 :							Belum dilaksanakan kegiatan
						B05 :							Belum dilaksanakan kegiatan
						B06 :							Belum dilaksanakan kegiatan
						B07 :							Belum dilaksanakan kegiatan
						B08 :							Belum dilaksanakan kegiatan
						B09 :							Belum dilaksanakan kegiatan
						B10 :							Belum dilaksanakan kegiatan
						B11 :							Belum dilaksanakan kegiatan
						B12 :	Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian	34,03	238,14	1. Rendahnya pemahaman terhadap standar GAP. 2. Intensitas penyuluhan dan bimbingan teknis terkait GAP masih terbatas, sehingga penerapan di lapangan belum optimal.	1. Dalam rangka mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, dapat dilakukan beberapa langkah tindak lanjut diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis petani dan penyuluhan 2. Dalam rangka mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, dapat dilakukan beberapa langkah tindak lanjut diantaranya melalui monitoring dan evaluasi		

No	IKSK	IKU	Nilai	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/
								Fisik	Persen				
1	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya Adopsi Teknologi Modernisasi Pertanian Yang Adaptif	Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	%	-	Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	B01 :							Belum ada anggaran dii tahun 2025
						B02 :							Belum ada anggaran dii tahun 2025
						B03 :							Belum ada anggaran dii tahun 2025
						B04 :							Belum ada anggaran dii tahun 2025
						B05 :							Belum ada anggaran dii tahun 2025
						B06 :							Belum ada anggaran dii tahun 2025
						B07 :							Belum ada anggaran dii tahun 2025
						B08 :							Belum ada anggaran dii tahun 2025
						B09 :							Belum ada anggaran dii tahun 2025
						B10 :							Belum ada anggaran dii tahun 2025
						B11 :							Belum ada anggaran dii tahun 2025
						B12 :							Belum ada anggaran dii tahun 2025

No	IKSK	IKU	Nilai	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/ Evidence
								Fisik	Persen				
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakit dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien dan Berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Nilai	85,53	Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	B01 :	Melaksanakan Kegiatan yang Mendukung Capaian ZI	20	23,38	Kurangnya koordinasi dantara Tim SPI	Perlu peran serta seluruh Tim SPI termasuk keterlibatan pimpinan	Melakukan pertemuan secara periodik dengan Tim SPI	
						B02 :	Melaksanakan Kegiatan yang Mendukung Capaian ZI	35	40,92	Kurangnya koordinasi dantara Tim SPI	Perlu peran serta seluruh Tim SPI termasuk keterlibatan pimpinan	Melakukan pertemuan secara periodik dengan Tim SPI	
						B03 :	Melaksanakan Kegiatan yang Mendukung Capaian ZI	45	52,61	Kurangnya koordinasi dantara Tim SPI	Perlu peran serta seluruh Tim SPI termasuk keterlibatan pimpinan	Melakukan pertemuan secara periodik dengan Tim SPI	
						B04 :	Melaksanakan Kegiatan yang Mendukung Capaian ZI	55	64,30	Kurangnya koordinasi dantara Tim SPI	Perlu peran serta seluruh Tim SPI termasuk keterlibatan pimpinan	Melakukan pertemuan secara periodik dengan Tim SPI	
						B05 :	Melaksanakan Kegiatan yang Mendukung Capaian ZI	60	70,15	Kurangnya koordinasi dantara Tim SPI	Perlu peran serta seluruh Tim SPI termasuk keterlibatan pimpinan	Melakukan pertemuan secara periodik dengan Tim SPI	
						B06 :	Melaksanakan Kegiatan yang Mendukung Capaian ZI	65	76,00	Kurangnya koordinasi dantara Tim SPI	Perlu peran serta seluruh Tim SPI termasuk keterlibatan pimpinan	Melakukan pertemuan secara periodik dengan Tim SPI	
						B07 :	Melaksanakan Kegiatan yang Mendukung Capaian ZI	75	87,69	Kurangnya koordinasi dantara Tim SPI	Perlu peran serta seluruh Tim SPI termasuk keterlibatan pimpinan	Melakukan pertemuan secara periodik dengan Tim SPI	
						B08 :	Melaksanakan Kegiatan yang Mendukung Capaian ZI	80	93,53	Kurangnya koordinasi dantara Tim SPI	Perlu peran serta seluruh Tim SPI termasuk keterlibatan pimpinan	Melakukan pertemuan secara periodik dengan Tim SPI	
						B09 :	Melaksanakan Kegiatan yang Mendukung Capaian ZI	82	95,87	Kurangnya koordinasi dantara Tim SPI	Perlu peran serta seluruh Tim SPI termasuk keterlibatan pimpinan	Melakukan pertemuan secara periodik dengan Tim SPI	
						B10 :	Melaksanakan Kegiatan yang Mendukung Capaian ZI	84	98,21	Kurangnya koordinasi dantara Tim SPI	Perlu peran serta seluruh Tim SPI termasuk keterlibatan pimpinan	Melakukan pertemuan secara periodik dengan Tim SPI	
						B11 :	Terlaksananya penilaian mandiri ZI	85	99,38	Kurangnya koordinasi dantara Tim SPI	Perlu peran serta seluruh Tim SPI termasuk keterlibatan pimpinan	Melakukan pertemuan secara periodik dengan Tim SPI	
						B12 :	Tercapainya Nilai ZI	86,09	100,05	Evidence yang ada belum seluruhnya sesuai dengan parameter yang	Tahun mendatang pengumpulan evidence dilakuka n mulai awal tahun	Melakukan koordinasi dengan tim SPI di Satker	

No	IKSK	IKU	Nilai	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/ Evidence
								Fisik	Persen				
1	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Nilai	90,15	Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	B01 :	Terkelolanya Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	100	110,93	1. Aplikasi masih maintenance 2. Nilai IKPA baru dapat dilihat H + 5 bulan berikutnya 3. Penginputan capaian utama sering dilakukan setelah H+5 sehingga capaian baru dapat diketahui setelah H +5	Melakukan penginputan pada bulan berjalan agar dapat dilihat harilnya H+3	Penginputan data capaian pada bulan berjalan telah mulai dilakukan lebih awal, namun masih diperlukan konsistensi agar nilai IKPA dapat terpantau lebih cepat.	
						B02 :	Terkelolanya Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	100	110,93	1. Penginputan data capaian rincian output masih sering terlambat. 2. Rekap data dukung belum siap pada awal bulan berjalan.	Melakukan penginputan data capaian Rincian Output tepat waktu	Penginputan data capaian rincian output telah dilakukan sesuai jadwal pelaporan, namun perlu ditingkatkan ketepatan waktunya agar tidak terjadi keterlambatan pada periode berikutnya.	
						B03 :	Terkelolanya Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	100	110,93	1. Keterlambatan penyampaian laporan dari pelaksana kegiatan kepada pengelola IKPA. 2. Validasi data dukung belum dilakukan secara berkala	Melakukan penginputan data capaian Rincian Output tepat waktu	Koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan telah dilakukan dan penginputan data capaian rincian output sudah berjalan, namun masih perlu penguatan disiplin pelaporan rutin.	
						B04 :	Terkelolanya Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	91,21	101,18	-	-		
						B05 :	Terkelolanya Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	95,89	106,37	-	-		

No	IKSK	IKU	Nilai	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/ Evidence
								Fisik	Persen				
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
						B06 :	Terkelolanya Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	95,63	106,07	-	-		
						B07 :	Terkelolanya Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	90,77	100,68	-	-		
						B08 :	Terkelolanya Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	89,69	99,49	1. Penginputan data capaian masih dilakukan mendekati batas waktu. 2. Proses rekapitulasi data rincian output belum berjalan cepat	Melakukan penginputan data capaian rincian output lebih awal (tepat waktu)	Penginputan data capaian rincian output telah dilakukan lebih awal dibandingkan periode sebelumnya, sehingga proses pemantauan capaian dapat dilakukan lebih cepat.	
						B09 :	Terkelolanya Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	91,63	101,64	Pengumpulan data dari pelaksana kegiatan belum dilakukan secara berkala.	Melakukan penginputan data capaian rincian output lebih awal (tepat waktu)	Penginputan data capaian rincian output sudah mulai dilakukan lebih awal, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang memerlukan percepatan penyampaian data dukung.	
						B10 :	Terkelolanya Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	89,46	99,23	Penginputan capaian rincian output masih menunggu laporan lengkap dari unit pelaksana.	Melakukan penginputan data capaian rincian output lebih awal (tepat waktu)	Pengecekan data sebelum submit telah dilakukan sehingga kesalahan input dapat diminimalisir, namun masih diperlukan percepatan rekap data agar penginputan lebih tepat waktu.	
						B11 :	Terkelolanya Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	89,54	99,32	Keterlambatan penginputan berdampak pada keterlambatan pembacaan nilai IKPA.	Melakukan penginputan data capaian rincian output lebih awal (tepat waktu)	Monitoring capaian mulai dilakukan secara rutin dan penginputan data capaian telah dilakukan lebih awal, namun konsistensi pelaporan masih perlu ditingkatkan agar capaian IKPA optimal.	

No	IKSK	IKU	Nilai	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/ Evidence
								Fisik	Persen				
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
						B12 :	Tercapainya Nilai IKPA	90,25	100,11		Melakukan penginputan data capaian rincian output lebih awal (tepat waktu)waktu)	Penginputan data capaian rincian output telah dilakukan lebih awal serta koordinasi pengumpulan data dukung sudah ditingkatkan, sehingga capaian nilai IKPA dapat dipantau lebih baik dan berkontribusi pada peningkatan nilai IKPA.	

Jakarta, Desember 2025

Kepala BBPPMP

Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc
NIP 19670511411997031002

Lampiran 9. Manual IKU

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Sasaran dan Indikator Kinerja:

BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
1	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Presentase pelaku usaha pertanian yang menerapkan standar pertanian	%
2	Meningkatnya Adopsi Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif (%)	%
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)	Nilai
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)	Nilai

Manual Indikator 1: Presentase pelaku usaha pertanian yang menerapkan standar pertanian

Program	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah Pelaku Usahatani yang Menerapkan Standar pada tahun berjalan di lingkup Balai Besar Pengembangan Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase pelaku usaha pertanian yang menerapkan standar pertanian (%)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	**Definisi** Jumlah Pelaku Usahatani yang Menerapkan Standar pada tahun berjalan di lingkup Balai Besar Pengembangan Penerapan Standar Instrumen Pertanian
	Formula $\frac{\text{Jumlah Pelaku Usahatani yang Menerapkan Standar Tahu}}{\text{Total Target Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standa}}$
	Tujuan
Satuan	%
Target	2025: 14,29 2026: 14,29 2027: 14,29 2028: 28,57 2029: 28,57
Link dengan RPJMN	~~Ya~~/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/BBPPMP
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)

Program	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya	
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High	
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact	
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading	
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)	
Polarisasi	☒ Maximaize ☐ Minimize ☐ Stabilize	
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Penerapan	
Sumber Data	BRMP Penerapan	
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐Triwulanan ☐Semesteran ☒Tahunan	
Mitigasi Risiko		
	Potensi Risiko	**Mitigasi**
	rendahnya jumlah pelaku usaha tani yang menerapkan standar	Pendampingan teknis berkelanjutan, dan pelatihan berbasis praktik.
	Penerapan standar tidak konsisten	Monitoring dan evaluasi berkala, dan penggunaan checklist penerapan standar di tingkat lapang
	Catatan	

Manual Indikator 2: Persentase peningkatan adopsi teknologi modernisasi pertanian yang adaptif

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya adopsi teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah adopsi teknologi modernisasi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan di lingkup Balai Besar Pengembangan Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase peningkatan adopsi teknologi modernisasi pertanian yang adaptif (%)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	**Definisi** Jumlah adopsi teknologi pertanian adaptif pada tahun berjalan di lingkup Balai Besar Pengembangan Penerapan Standar Instrumen Pertanian
	Formula $\frac{Jumlah\ adopsi\ teknologi\ pertanian\ yang\ adaptif}{Total\ target\ teknologi\ pertanian\ yang\ adaptif\ \ yang\ di\ adopsi\ selama\ 5\ t}$
	Tujuan
Satuan	%
Target	2025: - 2026: 22,08 2027: 22,73 2028: 25,97 2029: 29,22
Link dengan RPJMN	~~Ya~~/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/BBPPMP
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximaize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Penerapan
Sumber Data	BRMP Penerapan
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐Triwulanan ☐Semesteran ☒Tahunan
Mitigasi Risiko	

Potensi Risiko	Mitigasi
Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.	Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.
Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.
Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.
Catatan	

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Manual Indikator 3: Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

Program	Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Definisi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien melalui tata kelola yang akuntabel, proses kerja terstandar dan berbasis digital, serta pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada layanan prima.
Indikator Kinerja Kegiatan	**Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)**
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	**Definisi** Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian adalah tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur melalui pemenuhan komponen pengungkit dan hasil, yang mencerminkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas dari korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
	Formula Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil penilaian Tim Penilai PMPRB BRMP
	Tujuan Mewujudkan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian yang berintegritas dan profesional melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
Satuan	Nilai
Target	2025: 85,53

Program	Dukungan Manajemen
	2026: 86,09 2027: 86,20 2028: 86,40 2029: 86,60
Link dengan RPJMN	~~Ya~~/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/BBPPMP
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximaize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Penerapan
Sumber Data	BRMP Penerapan
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir

Program	Dukungan Manajemen
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐Triwulanan ☐Semesteran ☒Tahunan
Mitigasi Risiko	

Potensi Risiko	
Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja	Penetapan komitmen penilaian kinerja berbas
Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.	*updating* eviden ber mengumpulkan eviden.
SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas	Penyederhanaan SOP, inovasi yang berdampa

Catatan	

Manual Indikator 5: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

Program	Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Definisi Sasaran Kegiatan	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas melalui pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, patuh regulasi, serta efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja..
Indikator Kinerja Kegiatan	**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)**
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	**Definisi** Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART DJA..

Program	Dukungan Manajemen
	Formula Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian secara otomatis akan dihitung secara otomatis dalam Aplikasi Online SMART DJA..
	Tujuan Mendorong pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, patuh regulasi, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian kinerja..
Satuan	Nilai
Target	2025: 90,15 2026: 91,50 2027: 92,00 2028: 92,50 2029: 93,00
Link dengan RPJMN	~~Ya~~/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/BBPPMP
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading

Program	Dukungan Manajemen
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximaize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Penerapan
Sumber Data	BRMP Penerapan
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐Triwulanan ☐Semesteran ☒Tahunan
Mitigasi Risiko	

Potensi Risiko	Mitigasi
Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat	Penyusunan RPD dan kalender kegiatan terukur.
Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.	Standarisasi dokumen, review berjenjang sistem keuangan secara optimal.
Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan	Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan
Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal	Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan

Catatan	

Lampiran 10. SK Tim Pengelola Kinerja Organisasi

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR: 522/Kpts/OT.200/H.12/05/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian, perlu membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;

b. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan. Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 02 Tahun 2025 Tanggal 08 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

11. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2025 Tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian;

13. Pengesahan Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.648673/2024 tanggal 24 Nopember 2023 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;

14. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian yang selanjutnya disebut "TPKO BBPPMP" dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, dan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.;

KEDUA : TPKO BBPPMP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Pengarah
   memberikan arahan dan bimbingan kepada Penanggung Jawab, dan Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan. langkah-langkah strategis bagi pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

2. Penanggung Jawab
   bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja. organisasi di lingkungan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

3. Pelaksana

I. Ketua

a) memimpin TPKO BBPSIP dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi kinerja. dan capaian kinerja di level Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
b) b) memastikan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian berjalan sesuai ketentuan.

II. Sekretaris

a) memberikan dukungan teknis dan administratif kepada TPKO BBPPMP:
b) mengkoordinasikan penatausahaan dokumen kinerja organisasi di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Teknologi Pertanian.

III. Anggota

melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja di level Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

IV. Sub Tim Perencanaan Kinerja

a) menyusun konsep Kontrak Kerja, manual Indikator Kinerja Utama (IKU) dan matrik cascading Level II;
b) mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Kontrak Kinerja dan manual IKU Level III;
c) menetapkan batasan level cascading IKU Level II ke unit dibawahnya;
d) menetapkan SS dan/atau IKU yang bersifat mandatory untuk Level II sampai dengan Level IV;
e) melakukan reviu kontrak kinerja, manual IKU dan ketepatan cascading Level II dan apabila dianggap perlu dapat dilakukan terhadap level yang lebih rendah;
f) menatausahaan dokumen Level II yang meliputi Kontrak Kinerja, manual IKU, matrik cascading, serta dokumen lainnya yang terkait dengan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja;
g) mengkoordinasikan sosialisasi dan diseminasi pengelolaan kinerja berbasis Balance Score Card (BSC) di lingkungan unit eselon II;
h) menyusun konsep Rencana Strategis untuk unit Eselon II yang bersangkutan;
i) melakukan reviu atas Rencana Strategis unit Eselon II dan unit Eselon III UPT lingkup eselon II yang bersangkutan; dan
j) menatausahakan dokumen Rencana Strategis unit eselon II dan unit eselon III UPT.

V. Sub Tim Penilaian Kinerja

a) menghitung Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) Level II;
b) menyusun Laporan Kinerja (LKj) Level II;
c) mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja seluruh pejabat tinggi pratama bersama pejabat tinggi madya;
d) mereviu hasil perhitugan NCKO Level II;
e) menatausahakan dokumen Level II yang meliputi NCKO dan LKj serta dokumen lainnya yang terkait dengan pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya TPKO BBPPMP bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian selaku ketua pengarah;

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPKO BBPPMP dapat melibatkan narasumber/pakar/praktisi/tenaga ahli/konsultan untuk memperkaya sistem informasi pengelolaan kinerja organisasi sesuai kebutuhan;

KELIMA : Masa kerja TPKO BBPPMP sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana TPKO BBPPMP dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2025;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 28 Mei 2025
KEPALA BALAI BESAR

SYAMSUDDIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada.:
1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

Nomor : 522/Kpts/OT.200/H.12/05/2025
Tanggal : 28 Mei 2025

TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENGARAH		
Ketua	:	Kepala BBPPMP
Anggota	:	Kepala BRMP Provinsi
Penanggung Jawab	:	Kepala Bagian Tata Usaha
PELAKSANA		
Ketua	:	Ketua Kelompok Program dan Evaluasi
Sekretaris	:	Tania Pra Dhani, S.TP , MM
Sub Tim Perencanaan Kinerja		
a. Koordinator	:	Ketua Tim Kerja Program
b. Anggota	:	1. Yoshi Tri Sulistyaningsih, S.TP, M.Sc 2. Dhani Suryaningtiyas, S.IP 3. Dwi Purmanto, S.ST 4. Rizky Restu Widiyatna, SE 5. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi 33 BRMP Provinsi
Sub Tim Penilaian Kinerja		
a. Koordinator	:	Ketua Tim Kerja Evaluasi
b. Anggota	:	1. Ketua Kelompok Penerapan dan Pengelolaan Standardisasi Instrumen Pertanian 2. Ketua Tim Kerja Penerapan Standar Instrumen Pertanian 3. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian 33 BRMP Provinsi 4. Bambang Suryaningrat, SP 5. Jane Carolina, C.H, SP, M.Si 6. Soimah Munawaroh, S.Pt

KEPALA BALAI BESAR,

BRMP - KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

SYAMSUDDIN

Lampiran 11. SOP Laporan Kinerja

KEMENTERIAN PERTANIAN RI **BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)** **BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBPPMP)**	Nomor SOP	074/SOP/BBPPMP/2025
	Tanggal Pembuatan	28 Mei 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	28 Mei 2025
	Disahkan Oleh	KEPALA BALAI BESAR **Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc** NIP. 19670514 199703 1 002
	Nama SOP	**LAPORAN KINERJA**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara • Permenpan dan RB No 53 tahun 2014 • Perpres No 29 tahun 2014 • PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan • Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BRMP	• Penanggungjawab kegiatan • Minimal berpendidikan S1 • Memahami SAKIP
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
• SOP Laporan bulanan • SOP Laporan Tahunan	• Seperangkat komputer dan ATK
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan : - tidak terinformasikannya kinerja BBPPMP - tidak tersedianya bahan evaluasi AKIP	• LAKIN

KEMENTERIAN PERTANIAN RI

	Nomor	:	074/SOP/BBPPMP/2025
	Tanggal Pembuatan	:	28 Mei 2025
	Tanggal Penetapan	:	28 Mei 2025
	Tanggal Revisi	:	

SOP LAPORAN KINERJA

SATUAN KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBPPMP)

Pengertian	:	Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja
Tujuan	:	Terselesaikannnya laporan kinerja
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara • Permenpan dan RB No 53 tahun 2014 • Perpres No 29 tahun 2014 • PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan • Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BRMP
Prosedur	:	• Menyusun bahan laporan kinerja BRMP Provinsi • Mengumpulkan data bahan laporan kinerja dari BRMP Provinsi • Merekap data dan informasi bahan laporan kinerja • Menyusun draft laporan kinerja dan menyerahkan draft laporan kinerja kepada pimpinan • Mengoreksi dan mengarahkan perbaikan laporan kinerja, serta menyetujui untuk pencetakan laporan kinerja • Mendokumentasikan laporan
Keterkaitan	:	• SOP Laporan bulanan • SOP Laporan Tahunan

No: 074/SOP/BBPPMP/2025

SOP LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Tim Penyusun Laporan BRMP Prov	Katimker Evaluasi	Tim Penyusun Laporan Kinerja	Kapoksi PE	Ka. BBPPMP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun bahan laporan kinerja BRMP Provinsi dan menyampaikan ke seksi evaluasi									
2	Mengumpulkan data bahan laporan kinerja dari BRMP Provinsi						Data dan informasi	1 bulan	Berkas	
3	Merekap data dan informasi bahan laporan kinerja						Data dan informasi	7 hari	Draf Laporan	
4	Menyusun draft laporan kinerja dan menyerahkan draft laporan kinerja kepada pimpinan						Draf Laporan	2 bulan	Draf laporan	
5	Mengoreksi dan mengarahkan perbaikan laporan kinerja, serta menyetujui pencetakan laporan kinerja						Draft	15 hari	Buku Laporan kinerja	
6	Pencetakan Laporan						Buku Laporan kinerja	3 hari	Buku Laporan kinerja	
7	Mendokumentasikan laporan						Buku laporan kinerja	1 hari	Buku Lakin	

Lampiran 12. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR: 521/Kpts/OT.200/H.12/05/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LAKIN)
TAHUN ANGGARAN 2025
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan *good governance* perlu disusun Laporan Kinerja (LAKIN) lingkup Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;

b. bahwa dalam rangka menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 perlu dibentuk Tim Penyusun LAKIN;

c. bahwa para petugas yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
7. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 02 Tahun 2025 Tanggal 08 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2025 Tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Pengesahan Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.648673/2024 tanggal 24 Nopember 2023 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;

12. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian, dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun LAKIN bertugas:

1. Penanggung Jawab:
   a. Menetapkan kebijakan umum dan arah penyusunan LAKIN agar sesuai dengan visi, misi, dan tujuan instansi
   b. Memastikan seluruh tahapan penyusunan LAKIN berjalan sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan
   c. Mengawal agar LAKIN yang dihasilkan akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Ketua:
   a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan tim
   b. Menyusun rencana kerja tim
   c. Memastikan data kinerja dari unit-unit kerja terkumpul lengkap, valid, dan sesuai indikator
   d. Mengarahkan tim dalam menganalisis capaian kinerja, hambatan, serta rekomendasi perbaikan
   e. Memastikan LAKIN konsisten dengan dokumen perencanaan dan sesuai pedoman Kementerian PANRB
   f. Melaporkan perkembangan kepada Penanggung Jawab

3. Sekretaris:
   a. Mengelola administrasi tim
   b. Menghimpun data dan informasi
   c. Mengkoordinir Penyusunan LAKIN
   d. Mengarsipkan dokumen

4. Anggota:
   a. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data serta informasi capaian kinerja Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
   b. Menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Tim Penyusun LAKIN Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bogor
Pada Tanggal: 28 Mei 2025
KEPALA BALAI BESAR

SYAMSUDDIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada.:
1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

Nomor : 521/Kpts/OT.200/H.12/05/2025
Tanggal : 28 Mei 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN ANGGARAN 2025
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN.

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc	Kepala Balai Besar	Penanggung Jawab	Terlampir
2	Adhe Phoppy Wira Etika, SP, M.Si	Ketua Kelompok Substansi Program	Ketua	Terlampir
3	Tania Pra Dhani, SP, M.Si	Perencana Ahli Madya	Sekretaris	Terlampir
4	Ahmadi, SP, M.Sc	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota	Terlampir
5	Haryo Radianto, S.IP, M.Si	Ketua Kelompok Substansi Penerapan, Kerjasama, dan Penilaian Kesesuaian	Anggota	Terlampir
6	Widia Siska, SP, M.Si	Ketua Tim Kerja Program	Anggota	Terlampir
7	Dr. Harmi Andrianyta, SP, M.Si	Ketua Tim Kerja Pengembangan Teknologi dan Modernisasi Pertanian	Anggota	Terlampir
8	U. Humaedah, SP, M.Si	Ketua Tim Kerja Diseminasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Anggota	Terlampir
9	Didu Wahyudi, SE, M.Si	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama	Anggota	Terlampir
10	Putri Nirwana Sari, SP, M.Si	Ketua Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian	Anggota	Terlampir
11	Revi Sepriana, S.Sos	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumberdaya Manusia	Anggota	Terlampir
12	Mumuh Muharam, SE, M.Si	Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota	Terlampir
13	Gita Nurdiniati, SE, MM	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara	Anggota	Terlampir
14	Soimah Munawaroh, S.Pt	Fungsional Umum	Anggota	Terlampir

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
15	Bambang Suryaningrat, SP	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota	Terlampir
16	Dhani Suryaningtiyas, S.IP	Perencana Ahli Muda	Anggota	Terlampir
17	Dwi Purmanto, SP,M.Si	Penyuluh Ahli Muda	Anggota	Terlampir
18	Rizky Restu, SE	Perencana Ahli Pertama	Anggota	Terlampir

KEPALA BALAI BESAR,

SYAMSUDDIN

Lampiran 13. Hasil Uji Benih Padi Satker BRMP NTT oleh Balai Pengujian Padi

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN PADI
JALAN RAYA IX SUKAMANDI, CIASEM - SUBANG KODE POS 41256
TELEPON (0260) 520157
WEBSITE: padi.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.padi@pertanian.go.id

KAN
LP-1350-IDN

Laboratorium Penguji
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi
Email: laboratoriumbbpadi@gmail.com
Admin: 0813 1293 5710

Tanggal Terbit:15 Oktober 2025

LAPORAN HASIL PENGUJIAN
No. Register: R-117-09-25

Informasi Umum

Nama Pelanggan	:	Rafael Do Santos, S.ST
Alamat	:	Jl. Timor Raya Km. 32 Naibonat, Kupang-NTT
Telp./HP/Email	:	081230069074
Tanggal Terima Contoh	:	24 September 2025
Tanggal Pengujian	:	26 September 2025
Lokasi Pengujian	:	Laboratorium Penguji Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi
Hasil Pengujian	:	Terlampir

Laboratorium menerima contoh dalam bentuk benih. Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diterima oleh Laboratorium. Laporan hasil pengujian ini tidak memuat pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi maupun persyaratan standar tertentu. Laboratorium tidak bertanggung jawab atas hasil pengujian akibat ketidaksesuaian kondisi contoh.

Koordinator Laboratorium

Dr. Indria W Mulsanti
NIP. 19800716 200312 2 002

Tanggal terbit: 21/03/2019
Tanggal revisi: 16/04/2025

Halaman 1 dari 2
Verifikasi dokumen:....

FR-782-01-L

Lampiran 1 (R-117-09-25)

Parameter : Mutu Benih
Metode Pengujian : ISTA Rules 2021

No.	Contoh	Daya Berkecambah (%)	Daya Berkecambah *) (%)
1.	Inpari 42 GSR/ UPBS	75	82
2.	Inpari IR Nutri Zinc	75	93
3.	Inpari 6 Jete/ KP	81	87
4.	Inpari 6 Jete/ UPBS	78	87
5.	Inpari 32 HDB	57	81
6.	Ciherang	61	85
7.	Inpari 42 GSR/ KP	65	71

Ket *) dilakukan perlakuan pematahan dormansi perlakuan oven suhu 50 ^{o}C 48 jam, KNO_3 3 % 48 jam

Tanggal terbit: 21/03/2019
Tanggal revisi: 16/04/2025

Halaman 2 dari 2
Verifikasi dokumen:....